

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KETELADANAN
BERBASIS TRILOGI PENDIDIKAN YANG DIMEDIASI
KETERAMPILAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH
TERHADAP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

DISERTASI

Oleh

**SULPAKAR
NPM 2133031001**



**PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KETELADANAN
BERBASIS TRILOGI PENDIDIKAN YANG DIMEDIASI
KETERAMPILAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH
TERHADAP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

**Oleh:
SULPAKAR**

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
DOKTOR**

**Pada
Program Studi Doktor Pendidikan**



**PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Disertasi yang berjudul “PENGARUH KEPEMIMPINAN KETELADANAN BERBASIS TRILOGI PENDIDIKAN DIMEDIASI KETERAMPILAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH TERHADAP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI” ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas Nomor 17, Tahun 2010).
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Disertasi* pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai *author* dan FKIP UNILA sebagai Institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester (enam bulan sejak pengesahan Disertasi*) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Disertasi* ini, maka Program Studi Doktor Pendidikan, FKIP UNILA berhak mempublikasikan pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Doktor Pendidikan, FKIP UNILA. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



SULPAKAR

NPM. 2133031001

MOTTO

**“Kerja Keras, Sungguh - Sungguh, dan Ikhlas,
adalah Modal Utama Menuju Kesuksesan”**

(Sulpakar, 1989)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan untuk:

Pori Karlia, S.Pd. (Istri) dan keempat putera/i: Dhania Apisha, S.STP (anak ke-1); Ahmad Reza Padria, A.Md.A.Pj. (anak ke-2); Ahmad Duta Al-Ihya (anak ke-3); dan Ghaza Ahmad Al-Ghifari (anak ke-4), yang senantiasa menjadi penyemangat.

ABSTRAK

PENGARUH KEPEMIMPINAN KETELADANAN BERBASIS TRILOGI PENDIDIKAN YANG DIMEDIASI KETERAMPILAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH TERHADAP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Oleh:
SULPAKAR

Penyalahgunaan kekuasaan yang dikenal sebagai korupsi telah diakui secara global sebagai kejahatan luar biasa dan merupakan ancaman serius terhadap kehidupan bersama dalam suatu negara. Dampak yang dihasilkan dari tindakan ini tidak terbatas pada kerugian finansial bagi negara, melainkan juga dapat merusak norma-norma etika, keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi sejak dini di tingkat satuan pendidikan adalah melalui Pendidikan Antikorupsi (PAk). Pendidikan Antikorupsi (PAk) adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama Pendidikan Antikorupsi (PAk) adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, serta berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan tentang peran kepemimpinan keteladanan kepala sekolah berbasis trilogi pendidikan yang dimediasi oleh keterampilan manajerial kepala sekolah bagi keberhasilan Pendidikan Antikorupsi (PAk) di sekolah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif survey yang melibatkan responden sebanyak 392 guru. Responden dipilih menggunakan teknik *multistage random sampling* dari populasi guru yang bekerja pada jenjang SMA/SMK Negeri dan Swasta di provinsi Lampung. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan berbantuan aplikasi Amos versi-23. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) melalui kepemimpinan keteladanan berbasis trilogi pendidikan yang kuat, upaya pemberantasan korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan; (2) kepemimpinan keteladanan berbasis trilogi pendidikan memiliki efek kuat dalam mempengaruhi perkembangan keterampilan manajerial seorang pemimpin; (3) keterampilan manajerial berperan dalam mengarahkan, mengorganisir, dan mengendalikan usaha pencegahan korupsi; (4) keterampilan manajerial memainkan peran yang signifikan dalam memediasi pengaruh kepemimpinan keteladanan berbasis trilogi pendidikan terhadap pendidikan antikorupsi.

Kata kunci: kepemimpinan keteladanan, keterampilan manajerial, pendidikan antikorupsi.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF EXAMPLE LEADERSHIP BASED ON THE EDUCATIONAL TRILOGY MEDIATED BY THE MANAGERIAL SKILLS OF THE SCHOOL PRINCIPAL ON ANTI-CORRUPTION EDUCATION

**By:
SULPAKAR**

Abuse of power known as corruption has been recognized globally as an extraordinary crime and poses a serious threat to collective life in a country. The impact resulting from this action is not limited to financial losses for the state, but can also damage ethical norms, justice, democracy and the supremacy of law. One step that can be taken in an effort to eradicate corruption from an early age at the education unit level is through Anti-Corruption Education (PAk). Anti-Corruption Education (PAk) is an educational program about corruption which aims to build and increase students' awareness of the dangers and consequences of acts of corruption. The main target of Anti-Corruption Education (PAk) is to introduce the phenomenon of corruption which includes the criteria, causes and consequences, increasing intolerant attitudes towards acts of corruption, as well as various possible efforts to fight corruption. This research aims to provide insight into the role of exemplary leadership of school principals based on the educational trilogy mediated by the principal's managerial Skills for the success of Anti-Corruption Education (PAk) in schools. This research is a quantitative survey research involving 392 teachers as respondents. Respondents were selected using a multistage random sampling technique from the population of teachers working at the public and private high school/vocational school levels in Lampung province. The collected data was then analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM) technique with the help of the Amos version-23 application. The results of this research found that: (1) through exemplary leadership based on a strong educational trilogy, efforts to eradicate corruption through Anti-Corruption Education can become more effective and sustainable; (2) exemplary leadership based on the educational trilogy has a strong effect in influencing the development of a leader's managerial Skills; (3) managerial Skills play a role in directing, organizing and controlling corruption prevention efforts; (4) managerial Skills play a significant role in mediating the influence of exemplary leadership based on the educational trilogy on anti-corruption education.

Key words: exemplary leadership, managerial Skills, anti-corruption education.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul “Kepemimpinan Keteladanan Berbasis Trilogi Pendidikan Dimediasi Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah Bagi Keberhasilan Pendidikan Antikorupsi” dengan lancar. Penulis menyadari disertasi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN., Eng. Rektor yang telah memfasilitasi dan bertanggung jawab atas proses kegiatan akademik di lingkungan Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., Direktur yang telah memfasilitasi dan bertanggung jawab atas proses kegiatan akademik di lingkungan Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan sekaligus Co-Promotor yang telah memfasilitasi dan bertanggung jawab atas proses kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Een Yayah Haenilah, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sekaligus Pembahas I, yang dengan kesabaran selalu memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, dan perhatian yang luar biasa sehingga disertasi ini terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Dina Maulina, S.Pd., M.Si. selaku sekretaris Program Studi Doktor Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
6. Hasan Hariri, S.Pd., M.B.A., Ph.D, selaku Promotor dalam penyelesaian disertasi ini yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, dan perhatian yang luar biasa sehingga disertasi ini terselesaikan dengan baik.
7. Dr. Riswandi, M.Pd., selaku pembahas II yang telah memberikan koreksi dan masukan yang sangat berharga atas disertasi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen, khususnya Program Studi Doktor Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Keluarga dan teman-teman mahasiswa Program Studi Doktor Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung angkatan 2020 dan 2021 yang telah banyak memberikan motivasi dan masukan dalam penyusunan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan disertasi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan disertasi ini. Akhirnya penulis berharap semoga disertasi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan.

Bandar Lampung, Maret 2024

SULPAKAR
NPM. 2133031001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	16
C. Pembatasan Masalah	17
D. Rumusan Masalah	18
E. Tujuan Penelitian.....	18
F. Manfaat Penelitian.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS	19
A. Kajian Pustaka	19
1. Korupsi	19
2. Pendidikan.....	39
3. Pendidikan Karakter	41
4. Pendidikan Antikorupsi (PAk).....	63
5. Pendidikan Antikorupsi dan Teori Pendidikan Karakter Lickona	83
6. Kepemimpinan.....	87
7. Kepemimpinan Keteladanan	90
8. Keterampilan Manajerial.....	98
9. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara	103
9.1 Biografi Ki Hajar Dewantara	103
9.2 Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara	104
10. Teori Belajar Sosial Albert Bandura	113
B. Kerangka Berpikir	119
C. Hipotesis.....	121

BAB III METODE PENELITIAN	111
A. Tempat dan Waktu Penelitian	111
B. Metode Penelitian	112
C. Populasi, Sampel, dan Sampling	112
D. Teknik Pengumpulan Data	114
E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	114
F. Skala Pengukuran Instrumen Penelitian	123
G. Teknik Analisis Data	128
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	150
A. Hasil Penelitian	150
1. Deskripsi Data Penelitian	150
2. Uji Prasyarat Analisis	159
2. Pengujian Hipotesis	177
B. Pembahasan	179
1. Pengaruh variabel Kepemimpinan Keteladanan (KT) terhadap variabel Pendidikan Antikorupsi (PAk)	179
2. Pengaruh Kepemimpinan Keteladanan (KT) terhadap variabel Keterampilan Manajerial (KM)	209
3. Pengaruh variabel Keterampilan Manajerial (KM) terhadap variabel Pendidikan Antikorupsi (PAk)	240
4. Pengaruh Kepemimpinan Keteladanan (KT) yang dimediasi oleh Keterampilan Manajerial (KM) terhadap Pendidikan Antikorupsi (PAk)	256
5. Keterkaitan Dimensi Kepemimpinan Keteladanan Kouzes & Posner dengan Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara	271
6. Pendidikan Antikorupsi dan Teori Pendidikan Karakter Lickona	276
7. Hubungan Teori Belajar Sosial Bandura dengan Kepemimpinan Keteladanan (KT), Keterampilan Manajerial (KM) dan Pendidikan Antikorupsi (PAk)	279
C. Temuan Penelitian	284
D. Novelty atau Kebaruan Penelitian	286
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	288
A. Simpulan	288
B. Implikasi	288
C. Saran dan Rekomendasi	291
DAFTAR PUSTAKA	294

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter	45
Tabel 3. 1 Gambaran Tahapan Kegiatan Penelitian	111
Tabel 3. 2 Jumlah Guru Perkabupaten di Propinsi Lampung	113
Tabel 3. 3 Variabel, Indikator, dan Butir Angket.....	124
Tabel 3. 4 Perbedaan antara SEM, analisis jalur, dan analisis regresi	128
Tabel 3. 5 Kriteria Uji Validitas	147
Tabel 3. 6 Kriteria Goodness of Fit.....	149
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	150
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	151
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	153
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan	154
Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Sekolah	155
Tabel 4. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Sertifikasi Guru	156
Tabel 4. 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja Guru	157
Tabel 4. 8 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja dengan Kepala Sekolah	158
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Instrumen Kepemimpinan Keteladanan.....	160
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Instrumen Keterampilan Manajerial	162
Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Instrumen Pendidikan Antikorupsi	163
Tabel 4. 12 Case Processing Summary Variabel Kepemimpinan Keteladanan ..	165
Tabel 4. 13 Tabel Reliability Statistics Variabel Kepemimpinan Keteladanan ..	165
Tabel 4. 14 Case Processing Summary Variabel Keterampilan Manajerial.....	166
Tabel 4. 15 Tabel Reliability Statistics Keterampilan Manajerial	166
Tabel 4. 16 Case Processing Summary Pendidikan Antikorupsi	167
Tabel 4. 17 Tabel Reliability Statistics Variabel Pendidikan Antikorupsi	167
Tabel 4. 18 Output CMIN	169
Tabel 4. 19 <i>Output</i> RMSEA	170
Tabel 4. 20 <i>Output</i> CFI	171
Tabel 4. 21 <i>Baseline Comparisons</i>	171
Tabel 4. 22 Rekapitulasi <i>Goodness of Fit Index</i>	172
Tabel 4. 23 <i>Regression Weights: (Group number 1 - Default model)</i>	173
Tabel 4. 24 <i>Standardized Regression Weights</i>	174
Tabel 4. 25 <i>Standardized Direct Effects</i>	175
Tabel 4. 26 <i>Standardized Indirect Effects</i>	176

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tiga Aspek Nilai Karakter Antikorupsi	77
Gambar 2. 2 Diagram Kerangka Pikir	121
Gambar 3. 1 Kerangka Penelitian Kuantitatif Survey	112
Gambar 4. 1 Diagram Data Demografi Berdasarkan Jenis Kelamin	151
Gambar 4. 2 Diagram Data Demografi Berdasarkan Usia	152
Gambar 4. 3 Diagram Data Demografi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	153
Gambar 4. 4 Diagram Data Demografi Berdasarkan Pangkat/Golongan	154
Gambar 4. 5 Diagram Data Demografi Berdasarkan Jenjang Sekolah	155
Gambar 4. 6 Diagram Data Demografi Berdasarkan Sertifikasi Guru	156
Gambar 4. 7 Diagram Data Demografi Berdasarkan Masa Kerja Guru	157
Gambar 4. 8 Diagram Data Demografi Berdasarkan Lama Bekerja	158
Gambar 4. 9 Structural Model Penelitian	168
Gambar 4. 10 Diagram Hasil Perhitungan	176
Gambar 4. 11 Pengaruh Langsung Kepemimpinan Keteladanan (KT) terhadap Pendidikan Antikorupsi (PAk)	185
Gambar 4. 12 Pengaruh Langsung Kepemimpinan Keteladanan (KT) terhadap Keterampilan Manajerial (KM)	218
Gambar 4. 13 Pengaruh Langsung Keterampilan Manajerial (KM) terhadap Pendidikan Antikorupsi (PAk)	241
Gambar 4. 14 Pengaruh Tidak Langsung Kepemimpinan Keteladanan (KT) yang Dimediasi oleh Kepemimpinan Keteladanan (KT) terhadap	258
Gambar 4. 15 Keterkaitan dimensi kepemimpinan keteladanan Kouzes & Posner dengan Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara	275

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KETELADANAN
BERBASIS TRILOGI PENDIDIKAN YANG DIMEDIASI
KETERAMPILAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH
TERHADAP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

DISERTASI

Oleh:

SULPAKAR

NPM 2133031001

**Komisi
Pembimbing**

Nama

Tanda Tangan

Promotor

Hasan Hariri, M.B.A., Ph.D.



NIP. 196705212000121001

Co-Promotor

Prof. Dr. Sunyono, M.Si.



NIP. 196512301991111001

Telah dinyatakan memenuhi syarat pada tanggal: 22 Desember 2023.

**Ketua Program Studi Doktor Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lampung,**



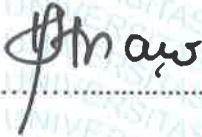



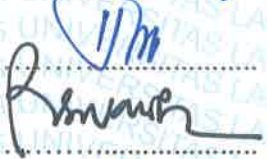


**Prof. Dr. Een Yayah Haenilah, M.Pd.
NIP 196203301986032001**

PENGESAHAN PENGUJI

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KETELADANAN
BERBASIS TRILOGI PENDIDIKAN YANG DIMEDIASI
KETERAMPILAN MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH
TERHADAP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

Oleh:
SULPAKAR
NPM 2133031001

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN., Eng. NIP. 196705212000121001	
Sekretaris	: Dr. Dina Maulina, M.Si. NIP. 198512032008122001	
Anggota	: Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D. NIP. 195811071986032004 Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd. NIP. 198708042014041001 Prof. Dr. Een Yayah Haenilah, M.Pd. NIP. 196203301986032001 Dr. Riswandi, M.Pd. NIP. 197608082009121001 Hasan Hariri, M.B.A, Ph.D. NIP. 196705212000121001 Prof. Dr. Sunyono, M.Si. NIP. 196512301991111001	    

Telah dipertahankan di depan penguji pada sidang terbuka dan dinyatakan telah memenuhi syarat pada tanggal 23 Februari 2024.

Dekan FKIP
Universitas Lampung

Prof. Dr. Sunyono, M.Si.
NIP. 196512301991111001

Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal lulus ujian disertasi : 23 Februari 2024.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Korupsi menjadi permasalahan serius dalam konteks tata pemerintahan yang baik di banyak negara di seluruh dunia (Pollitt, 2016). Tidak hanya merusak persepsi legitimasi dan efektivitas lembaga publik, korupsi juga memiliki potensi untuk merusak kerangka moral masyarakat, mengurangi motivasi masyarakat untuk menganut nilai kejujuran, dan melemahkan prinsip supremasi hukum. Dampak ekonomi dari korupsi juga signifikan, dengan data Bank Dunia menunjukkan bahwa sekitar lima persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global, atau sekitar \$2,6 triliun, digunakan untuk praktik suap kepada pejabat publik setiap tahunnya (Bashir & Hassan, 2020). Oleh karena itu, negara-negara di seluruh dunia bersatu untuk membentuk *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003, sebagai respons terhadap keprihatinan bersama akan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi.

Penyalahgunaan kekuasaan yang dikenal sebagai korupsi telah diakui secara global sebagai kejahatan luar biasa dan merupakan ancaman serius terhadap kehidupan bersama dalam suatu negara (Ariyanti & Ariyani, 2020). Dampak yang dihasilkan dari tindakan korupsi tidak terbatas pada kerugian finansial bagi negara, melainkan juga dapat merusak norma-norma etika, keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Korupsi mencerminkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, menjadi endemik, merusak struktur perekonomian nasional, serta menurunkan citra bangsa di panggung internasional. Kejadian korupsi di berbagai belahan dunia juga berkontribusi pada meningkatnya tingkat kemiskinan, kematian anak, kelaparan, tingkat buta huruf, dan sejumlah dampak negatif lainnya.

Korupsi merupakan kendala utama bagi pembangunan suatu negara dan telah merasuki banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Supramono, 2020). Praktik kejahatan ini merasuk ke berbagai lapisan masyarakat, mencakup mulai dari masyarakat berpendapatan rendah yang memberikan suap kepada

petugas agar dapat mempercepat penyelesaian urusan mereka, hingga masyarakat kelas menengah yang membayar suap untuk memperoleh persetujuan perizinan dengan cepat. Bahkan, kalangan atas atau orang kaya terlibat dalam suap kepada pejabat pajak atau konsultan pajak guna memanipulasi buku perusahaan mereka agar pembayaran pajaknya lebih rendah dari seharusnya.

Sejumlah kasus yang disebutkan di atas hanya sebagian kecil dari beragam perilaku korupsi yang umum terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Fenomena ini tercermin dalam *Corruption Perception Index* (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) tahun 2021 yang dirilis oleh *Transparency International* (TI), menempatkan Indonesia pada peringkat 96 dari 180 negara (Laporan *Transparency International*, 2021). Selain itu, laporan "*Global Corruption Barometer-Asia*" yang diterbitkan oleh TI menunjukkan bahwa Indonesia dinobatkan sebagai negara ketiga paling korup di Asia. Analisis dari *Transparensy International* juga mengungkapkan bahwa hanya 20 negara di dunia yang berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi, seperti Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Singapura, Swedia, Swiss, Norwegia, Belanda, Kanada, Luksemburg, Jerman, Inggris, Australia, Austria, Hong Kong, Islandia, Belgia, Estonia, Irlandia, dan Jepang.

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia berada pada fase kritis dengan penghapusan banyak ciri pemerintahan otoriter selama 32 tahun. Transformasinya dari sistem politik yang sangat represif menjadi sistem pemilihan yang terdesentralisasi dan demokratis adalah perubahan signifikan. Meskipun telah berlalu lebih dari dua dekade sejak Presiden Suharto lengser pada Mei 1998, tantangan terbesar yang belum teratasi oleh para reformis adalah penanggulangan korupsi. Ironisnya, korupsi kini tumbuh lebih merajalela, merasuk ke segala tingkatan pemerintahan, baik tingkat nasional maupun tingkat desa. Banyak lembaga, termasuk parlemen dan pengadilan nasional, dikritik sebagai salah satu yang paling korup di Asia (Alamsyah, 2020). Oleh karena itu, Emmerson (2010) menggambarkan Indonesia sebagai negara paling demokratis sekaligus paling korup di kawasan.

Pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia setelah reformasi. Upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama oleh eksekutif (baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah), legislatif, dan yudikatif. Pemerintah telah membentuk berbagai institusi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Waluyo, 2017).

Presiden telah mengeluarkan sejumlah instruksi dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi, seperti Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam Inpres ini, Presiden memberikan mandat untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis, termasuk Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009. Dokumen ini dijadikan acuan oleh pihak-pihak di pemerintahan Pusat dan Daerah untuk memberantas korupsi, dengan penekanan pada pencegahan, penindakan, serta panduan untuk monitoring dan evaluasi. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah lainnya, seperti memberikan sanksi tegas kepada pelaku korupsi, mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang lebih ketat, membentuk satgas di berbagai instansi, serta menjalin kerjasama dalam program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi (Ismantara et al., 2021).

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi perilaku korupsi di Indonesia belum menunjukkan dampak yang signifikan, bahkan dengan peningkatan jumlah pelaku korupsi yang ditangkap (Hussein, 2020; Khoirina, 2021; Mahmud; Simarmata et al., 2020; Siswanto, 2021; Soetardjo, 2021). Data menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2004 hingga 2020, terdapat 1442 kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan swasta di Indonesia (Alamsyah, 2020). Kasus ini melibatkan berbagai lembaga pemerintahan, termasuk Anggota DPR dan DPRD sebanyak 310 kasus, Pejabat Eselon I/II/III sebanyak 260 kasus, serta Gubernur/Bupati/Wali kota sebanyak 176 kasus. Bahkan, penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Pengacara, dan Polisi juga terlibat dalam 57 kasus. Selain itu, laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat bahwa selama periode

semester I tahun 2016 hingga tahun 2020, total anggaran negara yang terlibat dalam korupsi mencapai Rp28,8 triliun (Alamsyah, 2020).

Melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi, yang diterjemahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah menggagas tiga pendekatan utama dalam upaya pemberantasan korupsi yang dikenal sebagai "tiga sula." Menurut Zuber (2018), ketiga strategi tersebut melibatkan penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Penindakan, sebagai strategi represif, melibatkan serangkaian langkah seperti menangani laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi untuk membawa pelaku korupsi ke meja hijau. Pencegahan melibatkan perbaikan sistem guna meminimalisasi risiko tindak pidana korupsi dengan melakukan kajian dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada kementerian atau lembaga terkait. Sedangkan pendidikan dilakukan dengan menggalang kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak mereka terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, dan membangun perilaku serta budaya antikorupsi.

Jika dibandingkan dengan upaya pemberantasan korupsi yang lain, pendekatan melalui sistem pendidikan formal di sekolah dianggap memberikan sejumlah keuntungan bagi negara, baik secara pragmatis maupun secara teoritis dan filosofis. Pertama, lembaga pendidikan formal dianggap sebagai entitas yang sudah mapan. Kedua, pendekatan ini tidak menambah beban anggaran pemerintah secara signifikan. Ketiga, dapat diimplementasikan secara sistematis dan berkesinambungan. Terakhir, pendekatan ini dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa (Montessori, 2012).

Pemberantasan tindak korupsi melalui pendekatan pendidikan bukanlah inisiatif baru di tingkat global. Beberapa negara telah mengimplementasikan program pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan mereka, menghasilkan pencapaian yang signifikan seperti yang dicatat oleh Montessori pada tahun 2012. Hongkong, sebagai contoh, telah menerapkan Pendidikan Antikorupsi sejak tahun 1974 dan mencatat kemajuan luar biasa. Pada periode tersebut, Hongkong mengalami tingkat korupsi yang tinggi, diilustrasikan dengan frasa "*from the*

womb to tomb". Namun, saat ini, Hongkong berhasil meraih peringkat ke-11 dari 180 negara di dunia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) versi *Transparency International* pada tahun 2021. Keberhasilan ini merupakan hasil simultan dari berbagai upaya pemberantasan korupsi, termasuk implementasi Pendidikan Antikorupsi secara formal di institusi pendidikan, seperti yang dikemukakan oleh Man-wai pada tahun 2006.

Pemberantasan tindak korupsi tidak hanya dapat diandalkan melalui pendekatan penindakan hukum dan tindakan pencegahan. Pendidikan juga menjadi sarana penting dalam upaya ini dengan mengintegrasikan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi (PAk) di berbagai tingkatan pendidikan. Satuan pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai karakter bebas korupsi. Dengan memulai proses ini sejak dini, baik pada tingkat dasar, menengah, maupun tinggi, diharapkan generasi penerus bangsa dapat membangun sikap yang kokoh terhadap segala bentuk praktik korupsi. Pembelajaran antikorupsi di lembaga pendidikan diharapkan mampu melindungi generasi muda agar tidak mewarisi perilaku koruptif dari generasi sebelumnya (Zuber, 2018).

Salah satu langkah pemerintah provinsi Lampung dalam upaya pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan melalui sektor pendidikan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAk) di provinsi Lampung. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa semua satuan pendidikan menengah dan khusus, baik negeri maupun swasta yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, diwajibkan untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan menyisipkan materi Pendidikan Antikorupsi (PAk) ke dalam kurikulum sekolah. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah bahwa semua sekolah di bawah pengawasan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung diharuskan untuk mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Antikorupsi (PAk), yang termasuk dalam mata pelajaran muatan lokal yang wajib.

Pendidikan Antikorupsi (PAk) merupakan inisiatif pendidikan yang bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap risiko dan konsekuensi dari praktek korupsi. Fokus utama dari PAk adalah mengenalkan

fenomena korupsi, termasuk kriteria, penyebab, dan dampaknya, dengan tujuan meningkatkan ketidakmampuan terhadap perilaku korupsi. Program ini juga berupaya menunjukkan berbagai upaya yang dapat diambil untuk melawan korupsi dan berkontribusi pada pembentukan standar nilai serta kapasitas untuk menentang korupsi di kalangan generasi muda. Siswa juga didorong untuk menganalisis nilai-nilai yang mendukung terjadinya korupsi dan nilai-nilai yang menolak atau menentang tindakan korupsi. Dengan demikian, PAk pada dasarnya merupakan upaya penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan dapat membentuk sikap antikorupsi pada peserta didik (Kemendikbud, 2013).

Pendidikan Antikorupsi (PAk) memiliki tujuan yang jelas, yaitu pertama, untuk menanamkan semangat antikorupsi pada seluruh warga negara. Kedua, PAk bertujuan untuk menyadarkan bahwa pemberantasan korupsi bukan semata tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, melainkan merupakan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Ketiga, pendidikan ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama dengan menyelamatkan dana korupsi sehingga dapat dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Dharma, yang secara umum menjelaskan bahwa pendidikan anti-korupsi memiliki tiga tujuan utama, yaitu pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi beserta aspek-aspeknya, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, serta pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang diperlukan untuk melawan praktik korupsi (Kemendikbud, 2013; Dharma, 2004).

Pembentukan sikap antikorupsi melalui Pendidikan Antikorupsi dapat dilaksanakan dengan cara menginternalisasi nilai-nilai karakter antikorupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggagas sembilan nilai internal antikorupsi yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai karakter antikorupsi tersebut dapat diimplementasikan melalui berbagai metode, seperti (1) model sebagai mata pelajaran mandiri; (2) model terintegrasi (insersi) dalam seluruh mata pelajaran; (3) model di luar lingkup pembelajaran; (4) model

pembudayaan pembiasaan; dan (5) model gabungan yang mengkombinasikan pendekatan terintegrasi dan di luar pembelajaran secara bersama-sama (Kemendikbud, 2013).

Pendidikan karakter antikorupsi dapat diimplementasikan melalui dua pendekatan utama di satuan pendidikan. Pertama, dengan menambahkan mata pelajaran Pendidikan Antikorupsi (PAk) sebagai kurikulum wajib yang diajarkan setiap minggu di dalam kelas. Alternatif kedua adalah melalui pendekatan terintegrasi, di mana nilai-nilai karakter antikorupsi disisipkan dalam semua mata pelajaran yang ada. Guru memiliki kebebasan untuk memilih nilai-nilai yang akan ditanamkan dalam materi pembelajaran mereka, dengan fokus pada pokok-pokok atau sub-pokok bahasan yang terkait dengan nilai-nilai hidup. Selain melalui proses pembelajaran formal, penanaman karakter antikorupsi juga dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental di luar pembelajaran klasikal, sesuai dengan panduan yang telah disarankan sebelumnya (Elwina, 2008; Kemendikbud, 2013; Zuber, 2018).

Penanaman nilai-nilai karakter antikorupsi melalui mata pelajaran pendidikan antikorupsi (PAk) telah diajarkan di Provinsi Lampung mulai dari siswa sekolah dasar (SD) hingga siswa sekolah menengah atas (SMA). Mata pelajaran ini berdiri sendiri sebagai satu mata pelajaran muatan lokal wajib. Mata pelajaran ini diajarkan di sekolah dengan durasi waktu satu jam pelajaran (1 JP) setiap pekannya. Namun, meskipun mata pelajaran pendidikan antikorupsi (PAk) ini telah dilaksanakan lebih dari dua tahun di Provinsi Lampung, akan tetapi mata pelajaran antikorupsi (PAk) ini belum memiliki basis teori yang kuat.

Salah satu teori yang cocok digunakan untuk membelajarkan pendidikan antikorupsi adalah teori pendidikan karakter Lickona (2009). Lickona (2009) menyebutkan bahwa komponen karakter terdiri dari tiga ranah yang saling terkait dan saling memengaruhi, yakni pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral acting*). Dengan menggunakan teori ini, diharapkan pembelajaran PAk dapat lebih terstruktur dan efektif dalam membentuk karakter siswa terkait pencegahan korupsi.

Pendidikan Antikorupsi (PAk) berbasis Pendidikan Karakter Thomas Lickona melibatkan pemberian pengetahuan tentang nilai-nilai moral anti korupsi (pengetahuan moral) melalui mata pelajaran PAk. Tahapan berikutnya adalah penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi yang terintegrasi dalam segala aktivitas dan lingkungan sekolah. Melalui pembudayaan anti korupsi, diharapkan terbentuk perasaan dan sikap anti korupsi pada siswa (perasaan moral). Proses pembudayaan yang berkelanjutan diharapkan mampu membentuk kebiasaan, sehingga siswa dapat terbiasa patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku di sekolah dan masyarakat (tindakan moral).

Keberhasilan Pendidikan Antikorupsi (PAk) tidak dapat diraih secara instan, mengingatnya sebagai upaya jangka panjang untuk mengubah budaya dan perilaku masyarakat serta mengurangi tingkat korupsi di berbagai sektor. Evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran antikorupsi yang telah dilaksanakan perlu dilakukan, namun hingga saat ini belum ditemukan alat pengukuran yang sesuai melalui hasil kajian lapangan dan literatur. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan alat pengukuran yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di lingkungan sekolah.

Menyimak perkembangan masyarakat yang terjangkit praktek korupsi di berbagai sektor, penerapan Pendidikan Antikorupsi (PAk) menjadi suatu keharusan tanpa tawar-menawar (Zulqarnain et al., 2022). Upaya pemberantasan perilaku korupsi sejak dini di lingkungan sekolah melalui pendidikan antikorupsi (PAk) dengan penanaman nilai-nilai karakter tidak hanya dapat dilakukan dengan cara diajarkan (teori). Namun lebih dari itu, penanaman nilai-nilai karakter juga harus dicontohkan (praktik). Dalam konteks ini peran *role model* dalam implementasi pendidikan antikorupsi menjadi niscaya.

Salah satu yang dapat dijadikan *role model* (teladan) di lingkungan sekolah yaitu Kepala Sekolah. Kepala sekolah sesuai dengan Permendikbud No. 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah adalah guru yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola departemen pendidikan (Kemendikbud, 2018). Itu berarti selain tugas pokoknya sebagai guru, kepala

sekolah adalah penanggung jawab umum di sekolah (tugas tambahan). Hal ini menegaskan bahwa kepala sekolah berfungsi ganda, yaitu sebagai tenaga pendidik sekaligus sebagai tenaga kependidikan. Dalam posisinya sebagai tenaga pendidik, perannya sebagai *role model* (teladan) sangat dibutuhkan karena kepala sekolah dianggap sebagai sosok yang berkharisma. Apa yang menjadi perintahnya dilaksanakan, apa yang menjadi sikap dan kebiasaannya diteladani, dan nasehat-nasehatnya didengarkan serta ditaati.

Hubungan antara kepemimpinan dan korupsi erat kaitannya, karena keduanya mencerminkan aspek penting dalam suatu konteks yang dapat dianggap serupa (Polzenhagen & Wolf, 2021). Apabila kita mengaitkan pemahaman bahwa kepemimpinan memiliki potensi untuk mencegah atau bahkan menciptakan tindakan korupsi, maka penting untuk menganggap kepemimpinan dan korupsi sebagai dua isu yang saling terkait dan berpotensi memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, sejumlah peneliti telah memfokuskan penelitian mereka pada efektivitas praktik kepemimpinan sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di lingkungan organisasi publik (Bashir & Hassan, 2020; Brauckmann & Pashiardis, 2011; Orazi et al., 2013). Namun, hingga saat ini, penelitian yang telah dilakukan lebih berfokus pada praktik kepemimpinan transformasional dan transaksional (Orazi et al., 2013), serta kepemimpinan etis (Bashir & Hassan, 2020). Secara khusus, masih terbatasnya penelitian yang mencoba menyelidiki dampak kepemimpinan keteladanan (*exemplary leadership*) terhadap upaya pemberantasan korupsi di organisasi publik, terutama di lingkungan sekolah.

Beberapa pakar menguraikan kepemimpinan keteladanan dengan berbagai cara. Kouzes dan Posner (2017) menggambarkan kepemimpinan keteladanan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan contoh dan menginspirasi anggota tim terkait visi bersama, ketangguhan dalam menghadapi peluang yang menantang dan inovatif, kemampuan membangun kepercayaan dalam anggota untuk bertindak, serta kemauan tulus untuk mengakui dan menghargai prestasi serta kontribusi anggota terhadap keberhasilan organisasi. Sementara itu, Bass dan Bass Bernard (2005) menekankan bahwa perilaku pemimpin yang layak dicontoh berasal dari nilai-nilai dan keyakinan

pribadi pemimpin tersebut, serta kemampuan untuk memotivasi bawahan agar melampaui harapan yang ada. Keseluruhan, teladan dari seorang pemimpin diharapkan dapat menciptakan perasaan kepercayaan, kekaguman, loyalitas, dan rasa hormat dalam kalangan pengikut, sehingga mereka termotivasi untuk memberikan lebih dari yang diharapkan. Pendekatan kepemimpinan berbasis teladan ini pada akhirnya diharapkan dapat memotivasi pengikut dengan membuat mereka lebih sadar akan pentingnya hasil kinerja, mendorong untuk melampaui kepentingan pribadi demi keberhasilan organisasi atau tim, dan merangsang pemenuhan kebutuhan tingkat tinggi mereka (Peter & Sunday, 2018).

Di Indonesia, sebelum Kouzes and Posner menerbitkan buku "*The Five Practices of Exemplary Leadership*" pada tahun 2003, Ki Hajar Dewantara pada dekade 1920-an telah terlebih dahulu mengemukakan filosofi kepemimpinan keteladanan yang dikenal dengan trilogi pendidikan. Filosofi kepemimpinan keteladanan yang dikenal dengan trilogi pendidikan ini adalah buah pemikiran sang Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mencerminkan perpaduan antara tradisi Jawa dan pengaruh modern (Hermawati et al., 2020). Hal ini dikarenakan sejak kecil, Ki Hajar Dewantara mendapatkan pendidikan dalam tradisi Jawa. Beliau belajar budaya Jawa, bahasa Jawa, dan nilai-nilai kebangsawanan. Pendidikan tradisional ini memberinya dasar yang kuat dalam memahami budaya dan nilai-nilai lokal. Kemudian Pada awal abad ke-20, Ki Hajar Dewantara berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Ia mendapatkan kesempatan untuk masuk *School tot Opleiding voor Inlandsche Artsen* (STOVIA) atau yang sering disebut Sekolah Dokter Jawa. Di sana, ia terpapar pada pemikiran-pemikiran progresif dan konsep pendidikan modern. Pengalaman ini memengaruhi pemikirannya tentang bagaimana pendidikan seharusnya diarahkan (Sunardiyah et al., 2023).

Setelah kembali ke Indonesia, tepatnya pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara merumuskan konsep trilogi pendidikan sebagai pedoman dasar untuk pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Konsep ini mencakup tiga prinsip: *Ing Ngarso Sung Tulodo* (dari depan memberi contoh), *Ing Madyo Mangun Karso* (di tengah membangun semangat), dan *Tut Wuri Handayani* (di belakang

mengarahkan dan memberdayakan). Filosofi ini mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa dan visi modern Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara mencerminkan integrasi antara nilai-nilai budaya lokal dengan konsep pendidikan modern. Filosofi ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem pendidikan nasional di Indonesia dan tetap relevan dalam diskusi tentang pendidikan di Indonesia hingga saat ini (Hermawati et al., 2020).

Prinsip filosofi pertama dari Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah "*Ing Ngarso Sung tulodho*". Konsep ini mengandung makna bahwa seorang pemimpin harus menempatkan dirinya di depan atau di muka sebagai contoh yang patut diikuti. Kata "*Ing Ngarso*" menunjukkan posisi di depan, "*Sun*" berasal dari kata "*Ingsun*" yang artinya saya, dan "*Tulodho*" memiliki makna tauladan. Oleh karena itu, esensi dari konsep ini adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memberikan contoh atau teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Prinsip ini menekankan pentingnya pemimpin sebagai figur yang dapat menginspirasi dan membimbing melalui perilaku dan moralitas yang positif, sehingga mampu membentuk lingkungan yang terarah dan bermartabat (Hermawati et al., 2020).

Konsep filosofi Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua, yaitu *Ing Madyo Mangun Karso*, mengandung makna yang dalam. "*Ing Madyo*" yang berarti di tengah-tengah, "*Mangun*" sebagai simbol membangkitkan atau menggugah, dan "*Karso*" diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Dengan demikian, konsep ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin perlu memiliki keseimbangan dan kebijaksanaan untuk berada di tengah-tengah, memicu semangat, serta membentuk niat yang kuat pada para pengikutnya. Pemimpin yang menerapkan konsep *Ing Madyo Mangun Karso* diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi, memotivasi, dan merangsang inovasi bagi anggota timnya, sehingga dapat terus berkembang dan maju. Penyampaian konsep ini mengacu pada karya Sunardiyah et al. (2023).

Konsep filosofi Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang ketiga adalah "*Tut Wuri Handayani*." Tut Wuri, yang berarti mengikuti dari belakang, dan Handayani, yang artinya memberikan dorongan moral atau semangat,

menggambarkan bahwa seorang pemimpin seharusnya mampu memberikan dukungan moral dan semangat kepada bawahannya secara bersifat mendalam. Dukungan moral ini menjadi kunci penting yang diperlukan oleh pengikutnya guna membangkitkan motivasi dan semangat kerja. Dalam konteks ini, pemimpin diharapkan untuk mendekati perannya dengan memberikan dorongan dari belakang, menciptakan lingkungan yang memungkinkan pengikutnya untuk berkembang, dan memberikan inspirasi yang diperlukan. Filosofi ini menekankan pada peran integral pemimpin dalam memberikan dukungan moral yang tidak hanya bersifat instruktif tetapi juga mendalam untuk menciptakan motivasi yang berkelanjutan (Hermawati et al., 2020).

Kepemimpinan keteladanan dalam konteks persekolahan tidak lepas dari peran seorang kepala sekolah. Hal ini dikarenakan kepala sekolah adalah seorang pimpinan tertinggi ditingkat satuan pendidikan, yang memiliki peran krusial dalam mengurangi potensi korupsi di lingkungan sekolah. Pandangan ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial (Bandura, 1986) dan pertukaran sosial (Adams, 1965; Blau, 1964). Menurut Yukl et al. (2013), kepemimpinan diartikan sebagai suatu proses pengaruh sosial, di mana pemimpin berupaya memengaruhi para pengikutnya dengan menanamkan nilai-nilai dan keyakinan yang mereka anut. Kepala sekolah, sebagai figur utama, menjadi teladan bagi bawahan dalam memahami perilaku yang dianggap pantas atau tidak pantas, seiring dengan pembelajaran sosial yang dipraktikkan sehari-hari (Bandura, 1986). Meskipun manajer publik, seperti kepala sekolah, dapat berperan dalam mengurangi korupsi di organisasi mereka dengan menunjukkan keteladanan (contohnya, tidak terlibat secara pribadi dalam korupsi), mengkomunikasikan harapan, dan memberikan sanksi terhadap perilaku korup, penelitian yang mencoba memahami dampak kepemimpinan keteladanan, terutama dalam konteks sekolah di Indonesia, masih belum tersedia dalam literatur penelitian.

Keteladanan dari seorang kepala sekolah saja dirasa belumlah cukup efektif agar penerapan Pendidikan Antikorupsi (PAk) dapat berjalan dengan optimal. Untuk itu diperlukan pula kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah yang efektif adalah kepala sekolah yang mampu berperan bukan

hanya sebagai pemimpin, akan tetapi berperan pula sebagai seorang manajer (Bush, 2020). Kepala sekolah adalah manajer di sekolah, keterampilan manajerial (*manajerial Skills*) yang mereka miliki memainkan peran penting dalam memastikan efisiensi operasional di sekolah yang mereka pimpin (Nwogu dan Ebunu, 2019).

Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang standar kompetensi kepala sekolah menyebutkan bahwa terdapat lima kompetensi yang harus dikuasai oleh kepala sekolah, meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Menurut Yulia Rachmawati & Santosa (2020), dari kelima kompetensi tersebut, keterampilan manajerial dianggap sebagai aspek yang paling signifikan dalam menentukan keberhasilan seorang kepala sekolah dalam menjaga mutu pendidikan di satuan pendidikan. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Nwogu dan Ebunu (2019) yang menyatakan bahwa keterampilan manajerial kepala sekolah memiliki peran krusial dalam memastikan efisiensi operasional di sekolah yang mereka pimpin. Oleh karena itu, penting bagi seorang kepala sekolah untuk memiliki keterampilan manajerial dalam upaya menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui Pendidikan Antikorupsi (PAk) di lingkungan satuan pendidikan yang mereka pimpin.

Keterampilan manajerial merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam melakukan analisis, berpikir secara logis, memiliki kefasihan dalam membentuk konsep, serta konseptualisasi hubungan yang kompleks. Selain itu, para pemimpin juga perlu dilengkapi dengan keterampilan teknis yang sesuai dengan jenis pekerjaan atau aktivitas tertentu, yang didukung oleh kemampuan mereka untuk merangkul dan bekerja sama dengan orang lain (Katz, 2009). Siagian and Manajerial (1992) menggambarkan keterampilan manajerial sebagai keahlian untuk menggerakkan orang lain agar dapat bekerja dengan baik. Dalam konteks ini, Custódio et al. (2019) menyatakan bahwa keterampilan manajerial adalah suatu rangkaian kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang manajer atau pemimpin, yang digunakan untuk mengelola, mengarahkan, dan mengkoordinasi berbagai aspek dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Salah satu model keterampilan manajerial yang kerap dijadikan referensi oleh para peneliti adalah model keterampilan manajerial Katz (2009). Katz (2009) mengatakan bahwa efektivitas administrasi bergantung pada tiga keterampilan dasar yang dapat dikembangkan. Ketiga keterampilan dasar ini harus dimiliki oleh seorang manajer agar mampu menjadi pemimpin yang efektif. Meskipun ketiga keterampilan dasar tersebut saling terkait, namun mereka dapat diperkuat secara independen (El-Sabaa, 2001). Ketiga keterampilan tersebut mencakup: (1) keterampilan teknis (*technical Skills*); (2) keterampilan manusiawi/interpersonal (*human Skills*); dan (3) keterampilan konseptual (*conceptual Skills*).

Tanpa kemampuan manajerial atau keterampilan manajerial yang memadai dari seorang kepala sekolah, keterkaitan antara tujuan individu dengan tujuan organisasi dapat mengalami kelemahan, sebagaimana yang disoroti oleh Kurniawati (2020). Oleh karena itu, peran kepala sekolah sebagai pengelola sekolah menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah upaya pemberantasan korupsi melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi di sekolah yang dipimpin olehnya. Meskipun demikian, pada konteks Indonesia, penelitian yang secara khusus menginvestigasi dampak keterampilan manajerial kepala sekolah terhadap upaya pemberantasan korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi masih tergolong minim dalam literatur ilmiah.

Masalah korupsi telah menjadi isu serius yang merasuki hampir semua negara di dunia, terutama di negara-negara berkembang (Pollitt, 2016). Seiring dengan tingkat keparahan permasalahan tersebut, sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana prevalensi dan sumber korupsi. Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan tingkat korupsi antar negara dapat dijelaskan oleh berbagai faktor, termasuk sifat dan stabilitas sistem politik, efektivitas sistem peradilan, kualitas birokrasi publik, kekuatan masyarakat sipil, tingkat kebebasan pers, keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, dan norma-norma masyarakat (Treisman, 2007).

Penelitian lintas negara telah memberikan perspektif berharga, menekankan signifikansi peran lembaga pemerintahan dalam memerangi korupsi.

Meyer-Sahling dan Mikkelsen (2016) mencatat dalam literatur bahwa tingkat korupsi bervariasi di berbagai sektor dan organisasi publik suatu negara, tergantung pada struktur dan manajemen organisasi tersebut. Analisis variasi ini dapat membantu mengidentifikasi praktik manajerial yang efektif dalam mencegah perilaku korupsi dalam suatu organisasi (Meyer-Sahling & Mikkelsen, 2016).

Sejumlah studi terbaru telah mengeksplorasi faktor-faktor individu dan pekerjaan sebagai penyebab proksimal korupsi untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam. Sebagai contoh, Kwon (2014) melakukan survei terhadap pejabat publik di Korea Selatan dan menemukan bahwa birokrat dengan keterbatasan diskresi serta motivasi tinggi terhadap pelayanan publik cenderung kurang rentan terhadap penerimaan suap. De Graaf dan Huberts (2008), dalam penelitian mereka terkait kasus korupsi di Belanda, menyoroti bahwa motif pejabat publik untuk terlibat dalam korupsi tidak hanya terkait dengan keuntungan pribadi, melainkan juga melibatkan aspek-aspek seperti persahabatan, status sosial yang lebih tinggi, dan keinginan untuk memberikan kesan kepada orang lain. Selain itu, sebuah studi etnografi di Afrika Selatan oleh Sundström (2016) mengungkapkan bahwa pegawai sektor publik mungkin terlibat dalam korupsi sebagai bentuk perlindungan diri dari ancaman intimidasi dan kekerasan oleh penjahat serta rekan kerja yang berkolusi. Walaupun studi-studi ini memberikan wawasan yang berharga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi praktik khusus yang dapat diadopsi oleh manajer publik guna mencegah terjadinya insiden korupsi.

Berdasarkan paparan di atas, terdapat sejumlah penelitian yang telah dilakukan terkait upaya pemberantasan korupsi (Batubara, 2016; Soetardjo, 2021). Meskipun demikian, mayoritas penelitian cenderung fokus pada aspek penindakan dan pencegahan korupsi di lingkungan organisasi publik (Al-Gifari, 2020; Bashir & Hassan, 2020; Caesaringi et al., 2017; Hapsari et al., 2019; Joko, 2020; Yukl et al., 2013). Menariknya, hal ini beririsan dengan pendekatan yang diusung oleh Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi, yang kemudian dijabarkan oleh KPK. Dalam perspektif tersebut,

pemberantasan korupsi diarahkan melalui tiga strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan (Zuber, 2018).

Penelitian di sisi lain juga telah dimulai untuk menginvestigasi efektivitas praktik kepemimpinan sebagai langkah dalam memberantas korupsi di organisasi publik (Bashir & Hassan, 2020; Brauckmann & Pashiardis, 2011; Orazi et al., 2013). Namun, penelitian yang telah dilakukan sejauh ini baru terfokus pada kepemimpinan transformasional dan transaksional (Orazi et al., 2013), serta kepemimpinan etis (Bashir & Hassan, 2020). Penelitian yang mendalam mengenai dampak kepemimpinan keteladanan yang dilengkapi dengan keterampilan manajerial terhadap upaya pemberantasan korupsi di organisasi publik, khususnya di lingkungan sekolah, masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, fokus penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dengan penekanan pada usaha pemberantasan korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi (PAk). Pendekatan ini melibatkan penanaman sembilan nilai karakter antikorupsi (yaitu: jujur, disiplin, bertanggung jawab, adil, berani, peduli, pekerja keras, mandiri, dan sederhana) sejak dini, khususnya pada masa sekolah. Kepemimpinan yang menonjol dalam teladan dan keterampilan manajerial kepala sekolah dianggap sebagai faktor kunci. Diharapkan bahwa pemimpin yang memadai dalam hal tersebut dapat menjadi penopang utama dalam implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAk) di lingkungan sekolah, yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap upaya pemberantasan korupsi secara lebih luas.

B. Identifikasi Masalah

Latar belakang masalah di atas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan masalah serius bagi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi tidak terlepas dari peran seorang pemimpin. Setidaknya ketika mencoba mengaitkan pemahaman bahwa pemimpin dapat mencegah atau bahkan melahirkan terjadinya tindakan korupsi, maka sangat relevan jika kepemimpinan dan korupsi diposisikan sebagai dua isu yang dapat saling mendukung bahkan saling mengisi. Oleh sebab itu diperlukan

kepemimpinan yang efektif baik sebagai *leader* maupun sebagai *manager*. Untuk memahami peran keterkaitan itulah penelitian ini dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Fokus pemberantasan korupsi di Indonesia masih sebatas pada upaya pencegahan dan penindakan melalui proses penegakkan hukum. Begitu pula penelitian yang dilakukan selama ini masih sebatas pada upaya penindakan dan pencegahan korupsi pada organisasi publik.
2. Penelitian yang mengaitkan pengaruh kepemimpinan terhadap upaya pemberantasan korupsi sejauh ini masih sebatas pada praktik kepemimpinan transformasional, transaksional dan kepemimpinan etis.
3. Masih sangat sedikit penelitian tentang pengaruh kepemimpinan keteladanan (*exemplary leadership*) yang dilengkapi dengan keterampilan manajerial (*managerial Skills*) terhadap upaya pemberantasan korupsi pada organisasi publik utamanya di sekolah melalui pendidikan antikorupsi.
4. Instrumen untuk mengukur efektifitas dan keberhasilan pembelajaran pendidikan antikorupsi (PAk) belum ada.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan langkah yang diperlukan dalam penelitian guna menyusun batasan ruang lingkup agar terhindar dari penyimpangan atau pelebaran pokok masalah. Hal ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas pada penelitian, memudahkan pembahasan, dan mencapai tujuan penelitian. Meskipun dalam latar belakang masalah telah diidentifikasi tiga permasalahan utama, namun melibatkan penelitian terhadap semua permasalahan tersebut menjadi tidak memungkinkan. Kendala seperti keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan kemampuan menjadi faktor utama yang membatasi kemampuan untuk meneliti seluruh variabel yang diduga menjadi penyebab fenomena yang diamati.

Kendala dalam upaya memberantas korupsi sulit diatasi hanya melalui aspek penegakan hukum dan pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah pendidikan dengan menerapkan Pendidikan Antikorupsi (PAk) di lembaga pendidikan. Melalui integrasi nilai-nilai bebas korupsi dalam kurikulum, pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan di mana pemimpin berperan sebagai teladan. Pemimpin yang tidak hanya memiliki kredibilitas moral tetapi juga keterampilan manajerial akan menjadi pilar utama dalam menguatkan implementasi PAk di sekolah. Harapannya, hal ini akan berdampak positif pada upaya pemberantasan korupsi secara lebih menyeluruh.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan dan identifikasi masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemimpinan keteladanan berpengaruh terhadap pendidikan antikorupsi?
2. Bagaimana kepemimpinan keteladanan berpengaruh terhadap keterampilan manajerial?
3. Bagaimana keterampilan manajerial berpengaruh terhadap pendidikan antikorupsi?
4. Bagaimana kepemimpinan keteladanan yang dimediasi oleh keterampilan manajerial berpengaruh terhadap pendidikan antikorupsi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Pengaruh langsung kepemimpinan keteladanan terhadap pendidikan antikorupsi.
2. Pengaruh langsung kepemimpinan keteladanan terhadap keterampilan manajerial.
3. Pengaruh langsung keterampilan manajerial terhadap pendidikan antikorupsi.

4. Pengaruh tidak langsung kepemimpinan keteladanan yang dimediasi oleh keterampilan manajerial terhadap pendidikan antikorupsi.

F. Manfaat Penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks akademis. Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan dampak positif secara nyata, baik dalam mengembangkan pemahaman konsep maupun menyumbang terhadap literatur ilmiah yang ada. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berkelanjutan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidangnya serta dapat memberikan pandangan baru yang bernilai bagi pengembangan pengetahuan di masa depan, meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah yang signifikan terhadap perkembangan teori kepemimpinan dalam mempengaruhi pemberantasan korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi (PAk). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi pembaca yang tertarik dengan topik kepemimpinan keteladanan dan keterampilan manajerial, serta isu-isu terkait penerapan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi (PAk) di lingkungan satuan pendidikan di Provinsi Lampung.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi sekolah, kepala sekolah, guru, dan peneliti lainnya. Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan wawasan berharga dan pemahaman mendalam terkait dengan konteks pendidikan. Informasi yang ditemukan dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi pihak-pihak terkait dalam mengembangkan kebijakan, strategi pengajaran, dan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis dan memberikan panduan praktis yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah, meliputi:

a. Bagi peneliti selanjutnya

Harapan dari hasil penelitian ini adalah agar informasi dan rekomendasi yang ditemukan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi peneliti berikutnya dalam melaksanakan penelitian yang lebih komprehensif. Dengan demikian, diharapkan perkembangan penelitian dalam bidang pendidikan dapat terus berkembang sejalan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

b. Bagi Kepala Sekolah

Harapan dari penelitian ini adalah bahwa temuan yang diperoleh dapat menjadi sumbangan berharga bagi kepala sekolah untuk merefleksikan peran dan kompetensinya di sekolah, baik dalam kapasitas sebagai pemimpin maupun sebagai pengelola. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengembangan kompetensi kepala sekolah, memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam memimpin dan mengelola sekolah.

c. Bagi Dinas Pendidikan

Harapan dari hasil riset ini adalah agar dapat menjadi pijakan bagi dinas pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan mutu kepemimpinan kepala sekolah. Dengan demikian, diharapkan sekolah dapat berperan sebagai garda terdepan dalam mendukung implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAk) di lingkungan sekolah. Dampak positif dari upaya ini diharapkan dapat merambah lebih luas, termasuk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara menyeluruh.

d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk merumuskan kebijakan yang mewajibkan Pendidikan Antikorupsi (PAk) sebagai bagian integral dari kurikulum di semua tingkat satuan pendidikan di Indonesia.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Korupsi

1.1 Pengertian Korupsi

Jauh sebelum berdirinya republik ini dan terbentuknya negara-negara di dunia, korupsi telah menjadi kenyataan yang tidak dapat disangkal (Yamin, 2016). Menurut Brioschi (2017), sejarah korupsi telah ada sepanjang usaha manusia untuk hidup berdasarkan aturan hukum. Meskipun tidak ada studi sistematis yang mencatat tren tersebut, korupsi secara historis diakui sebagai salah satu masalah tertua di dunia, bersama dengan prostitusi (Abun et al., 2020). Kajian literatur lain mencatat bahwa korupsi telah terjadi sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, hingga abad pertengahan, dan terus berlanjut hingga saat ini. Pada masa Romawi, korupsi dilakukan oleh para jenderal yang memeras daerah jajahannya untuk memperkaya diri sendiri. Di abad pertengahan, bangsawan istana kerajaan juga terlibat dalam praktek korupsi. Singkatnya, korupsi merupakan benalu sosial dan masalah serius yang telah tercatat dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno (Nasir, 2006).

Praktik korupsi diyakini telah ada sejak zaman kuno, terdokumentasi dalam sejarah administrasi. Contohnya, Dinasti Pertama Mesir kuno (3100–2700 SM) mencatat kasus korupsi dalam sistem peradilan mereka (El-Saady, 1998). Di Cina kuno, praktek korupsi tercermin dalam mitologi Dewa Dapur yang memantau perilaku anggota rumah tangga. Sebelum tahun baru Cina, Dewa Dapur melaporkan tindakan tahunan kepada penguasa surga, memengaruhi nasib Kaisar Giok dan rumah tangga (Abun et al., 2020). Yunani kuno pada tahun ke-1400 SM juga mencatat perilaku korup, seperti penyipuan Pythia, pendeta tinggi Apollo, oleh keluarga Alcmaeonid yang kaya, untuk memanfaatkan bantuan militer Sparta dalam menaklukkan bangsa Athena, menggambarkan bahwa bahkan dewa pun bisa disuap, seperti yang dicatat oleh Aristoteles (Abun et al., 2020).

Isu korupsi telah menjadi perbincangan selama lebih dari 2000 tahun, dimulai sejak awal abad ke-4 SM sebagaimana dicerminkan dalam Arthashastra karya Kautilya yang hidup pada periode tersebut (Gupta & Abed, 2002). Menurut pandangan Kautilya, yang hidup sezaman dengan Aristoteles, penguasa harus menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, bahkan dengan mengabaikan aturan ketelitian dan kejujuran (Brioschi, 2017). Contoh skandal terkenal pada zaman Yunani kuno adalah skandal Harpalus pada tahun 324 SM, di mana Demosthenes dituduh mengambil deposit emas dari perbendaharaan dan akhirnya dihukum pengasingan. Sejarah korupsi juga mencatat insiden di Roma kuno pada abad ke-4 SM, di mana Raja Julius Caesar mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang korup, termasuk pemecatan dan tuntutan pengembalian uang atau emas yang dicuri (Brioschi, 2017).

Praktik korupsi di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman kerajaan, dimotivasi oleh keinginan akan kekuasaan, kekayaan, dan dalam beberapa kasus, nafsu terhadap wanita. Bahkan, kehancuran kerajaan yang megah seperti Sriwijaya dan Majapahit sebagian besar dapat diatribusikan pada perilaku korup dari para bangsawan setelah kepemimpinan yang adil dan bijaksana seperti Raja Bala Putra Dewa (Sriwijaya) dan Patih Gajah Mada (Majapahit) berakhir.

Thomas Stamford Raffles yang memerintah Pulau Jawa pada tahun 1811-1816, dalam karyanya "*History of Java*" tergambar gambaran menarik mengenai karakter penduduk Jawa. Masyarakat Jawa digambarkan sebagai individu yang sangat "*nrimo*" atau pasrah terhadap keadaan, namun di sisi lain, mereka memiliki keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Sifat tidak terus terang dan kecenderungan menyembunyikan masalah tercermin dalam perilaku mereka, seringkali mengambil keuntungan atau kesempatan tanpa pengetahuan orang lain. Buku ini juga mengungkapkan fenomena menarik terkait bangsawan Jawa yang gemar menumpuk kekayaan, memelihara abdi dalem yang cenderung mencari perhatian majikannya. Akibatnya, budaya tertutup dan penuh "keculasan" ini memberikan ruang bagi tumbuhnya "budaya korupsi" di Nusantara. Abdi dalem sering terlibat dalam praktik korupsi, seperti mengambil upeti (pajak) dari rakyat, yang kemudian diserahkan kepada Demang (Lurah), dan selanjutnya diteruskan

kepada Tumenggung. Di tingkat kabupaten atau provinsi, abdi dalem di Katemenggungan juga terlibat dalam korupsi harta yang akan diserahkan kepada Raja (Kemendikbud, 2013).

Pada masa kerajaan, konsep korupsi tidak dikenal karena belum terdapat pemisahan yang jelas antara kepemilikan privat dan publik. Raja, sebagai pemimpin tradisional, menganggap semua sumber daya di wilayahnya sebagai milik pribadinya. Korupsi baru muncul di Indonesia ketika sistem pemerintahan modern diperkenalkan oleh kolonialisme Belanda, yang memisahkan kepentingan pribadi dan umum. Dalam konteks ini, istilah "pejabat" mulai dikenal sebagai individu yang diberi otoritas dan kepercayaan umum, dengan penyalahgunaannya dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan tersebut. Santoso dan Meyrasyawati (2015) mencatat bahwa korupsi menjadi istilah yang terkait dengan sistem tersebut.

Asal-usul kata "korupsi" dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*," yang mengandung makna kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian (Fockema & Andrea, 1951). Jejak kata ini meluas ke berbagai bahasa Eropa, seperti *corruption* dan *corrupt* dalam bahasa Inggris, *corruption* dalam bahasa Perancis, serta *corruptie* dalam bahasa Belanda. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "korupsi" diadopsi dari bahasa Belanda, dengan arti harfiah mencakup kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral (Abdul, 2022).

Korupsi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang pejabat politik dengan menggunakan pertimbangan yang tidak semestinya, seperti suap, untuk melanggar tugas yang seharusnya dijalankan (Klitgaard, 1998). Definisi lain menggambarkan korupsi sebagai perbuatan buruk, seperti penggelapan uang dan penerimaan uang sogok (Poerwadarminta, 1976). Subekti Tjitrosoedibio (1973) menyatakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang bertujuan memperkaya diri sendiri, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 tahun

2001, korupsi melibatkan tindakan melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan seperti suap, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, pemerasan, gratifikasi, serta perbuatan curang dan mark up.

Program Global Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (GPAC) mendefinisikan korupsi sebagai "penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi" (Waziri, 2010). Sementara itu, *Transparency International* (2013) menggambarkan korupsi sebagai penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan untuk keuntungan pribadi. *World Bank* (2009) juga mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik guna mencapai keuntungan pribadi, di mana seorang pejabat menerima, meminta, atau memaksa suap. Meskipun berbagai definisi korupsi digunakan oleh para analis, dalam kebanyakan konteks, definisi dari *Transparency International* (TI) dan *World Bank* dianggap memadai (Holmes, 2015).

1.2 Tipologi Korupsi

Beberapa akademisi telah mengadopsi pendekatan holistik dalam mengkaji fenomena korupsi dengan mengelompokkannya ke dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, Taylor (2010) mengklasifikasikan korupsi ke dalam beberapa jenis. Pemahaman ini memungkinkan peneliti untuk melihat korupsi tidak hanya sebagai entitas tunggal, tetapi sebagai kompleksitas gejala sosial yang dapat dibagi menjadi berbagai manifestasi. Pendekatan ini membantu menggambarkan keragaman situasi korupsi dan mendukung upaya untuk memahami akar penyebab serta mencari solusi yang lebih kontekstual, mencakup:

- a. **Korupsi politik**, mencakup praktek-praktek tidak etis di dalam lingkungan politik, di mana para politisi dan pembuat keputusan publik yang seharusnya bertanggung jawab dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan rakyat, justru terlibat dalam tindakan korup. Fenomena ini dapat terjadi ketika perumusan kebijakan dan undang-undang disesuaikan demi keuntungan pribadi para politisi dan legislator,

merugikan prinsip-prinsip integritas dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan.

- b. **Korupsi pemilu**, sebagai kategori tindakan yang melibatkan kecurangan dalam proses pemilihan umum, mencakup berbagai praktik yang merugikan integritas demokrasi. Praktik ini mencakup, antara lain, penjanjian jabatan, pemberian bantuan khusus, pemaksaan, intimidasi, dan campur tangan yang menghambat kebebasan memilih. Selain itu, pembelian suara, pencabutan hak, perampasan kotak suara, tindakan kekerasan seperti mengorbankan dan melukai, serta manipulasi hasil pemilu guna menguntungkan pihak yang kalah menjadi bagian dari skenario korupsi pemilu. Keberadaan daerah-daerah di mana suara tidak diberikan menambah dimensi serius pada dampak negatif yang timbul akibat korupsi dalam konteks pemilihan umum.
- c. **Korupsi birokrasi**, yang terjadi dalam administrasi publik selama pelaksanaan kebijakan, merupakan realitas yang dihadapi warga setiap hari di titik-titik layanan seperti rumah sakit, sekolah, kantor perizinan lokal, kantor polisi, dan berbagai kementerian pemerintah. Fenomena ini terjadi ketika prosedur di sektor publik melenceng menjadi tindakan ilegal atau tidak pantas. Praktik korupsi semacam ini merugikan tidak hanya integritas sistem administrasi publik, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam tata kelola dan penegakan hukum guna memastikan keadilan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan publik.
- d. **Tindakan yang termasuk dalam kategori suap**, seperti memberikan suap, menggosok telapak tangan, dan melakukan pembayaran, dapat dianggap sebagai bentuk perilaku koruptif. Praktik ini melibatkan pemberian atau penerimaan hadiah atau uang dengan maksud mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang secara tidak sah. Tindakan suap ini sering kali dilakukan dalam konteks upaya memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan tidak sah lainnya. Fenomena ini merugikan integritas dan transparansi dalam lingkungan sosial dan bisnis, serta dapat merusak sistem peradilan dan ketertiban. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan terhadap praktik suap

menjadi krusial dalam memastikan tegaknya prinsip-prinsip etika dan hukum dalam kehidupan masyarakat.

- e. **Penipuan**, dalam konteks ini, merangkum praktik tipu daya, penipuan, pemalsuan, pemerasan, penyelundupan, dan tindakan pemalsuan. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk manipulasi yang bertujuan untuk mengelabui atau menyesatkan orang lain, seringkali melibatkan kegiatan yang melanggar norma dan hukum. Keberagaman tindakan penipuan mencakup segala upaya untuk memanipulasi informasi atau situasi, seperti pemalsuan dokumen, penipuan keuangan, atau penipuan identitas. Dalam konteks akademik, penanganan penipuan memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan hukum yang melibatkan tindakan tersebut, seiring dengan upaya untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penegakan hukum yang efektif.
- f. **Penggelapan**, atau yang dikenal sebagai *embezzlement*, dipandang sebagai tindakan mencuri sumber daya publik oleh pejabat pemerintah. Fenomena ini terjadi ketika seorang pejabat negara menyalahgunakan kepercayaan dengan mencuri dana dari lembaga publik tempatnya bekerja. Terutama di negara-negara berkembang di Afrika, praktik penggelapan dana publik sering dianggap sebagai metode umum untuk mengakumulasi kekayaan pribadi. Faktor utama yang mungkin memicu perilaku ini adalah kurangnya sistem regulasi yang ketat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya publik.
- g. **Pemerasan**, merujuk pada tindakan yang melibatkan penggunaan paksaan, kekerasan, atau ancaman dengan tujuan memperoleh sumber daya. Praktik ini mencerminkan upaya untuk memaksa individu atau entitas tertentu dengan menggunakan metode yang dapat merugikan atau menciptakan ketidaknyamanan. Dalam konteks ini, sumber daya dapat mencakup berbagai hal, seperti keuangan, barang, atau informasi. Perbuatan tersebut menunjukkan sebuah pendekatan yang melanggar etika dan hukum, serta dapat merugikan keseimbangan keadilan dalam suatu masyarakat.
- h. **Favoritisme**, merupakan praktek penyalahgunaan kekuasaan di mana alokasi sumber daya negara dipengaruhi secara signifikan oleh hubungan pribadi atau

koneksi tertentu. Fenomena ini menciptakan ketidakseimbangan yang mencolok dalam distribusi aset publik, dimana keuntungan lebih diberikan kepada individu yang memiliki keterkaitan tertentu. Praktik ini tidak hanya merugikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, tetapi juga dapat merusak integritas institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Dengan demikian, penanganan serius terhadap favoritisme menjadi esensial untuk memastikan tata kelola yang adil dan transparan dalam pemanfaatan sumber daya publik.

- i. **Nepotisme**, merujuk pada bentuk favoritisme khusus di mana individu yang menduduki jabatan publik cenderung memberikan perlakuan istimewa kepada anggota keluarga dan kerabatnya. Dalam konteks ini, pemegang jabatan tersebut lebih condong memilih atau memberikan keuntungan kepada orang-orang terdekatnya, seringkali tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kapabilitas secara objektif. Praktik ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan merugikan, karena kebijakan dan keputusan yang diambil mungkin lebih didasarkan pada hubungan personal daripada pertimbangan profesional. Nepotisme dapat menimbulkan dampak negatif pada integritas dan keadilan dalam administrasi publik, sehingga perlu adanya upaya untuk mendorong prinsip meritokrasi dan transparansi dalam proses seleksi dan pengambilan keputusan.

1.3 Faktor Penyebab Perilaku Korupsi

Terdapat berbagai bentuk perilaku korupsi, dan sejumlah faktor yang ikut berperan dalam memperkuat keberlanjutan korupsi. Kompleksitas fenomena ini membuatnya sulit untuk diklasifikasikan secara sistematis, seperti yang diungkapkan oleh Caiden et al. (2001). Menurut Heywood (1997), menjelaskan penyebab korupsi politik secara komprehensif menjadi suatu tantangan yang kompleks dan sulit dihadapi.

Penyebab korupsi dapat disederhanakan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup aspek moral, sikap, dan sosial. Aspek moral mencakup keimanan, kejujuran, dan rasa malu yang lemah,

sedangkan aspek sikap melibatkan pola hidup konsumtif. Aspek sosial mencakup pengaruh keluarga yang mendorong perilaku korup. Di sisi lain, faktor eksternal melibatkan aspek ekonomi, politis, manajemen organisasi, hukum, dan sosial. Aspek ekonomi melibatkan pendapatan yang tidak mencukupi, sedangkan aspek politis terkait dengan instabilitas politik dan kepentingan politis. Aspek manajemen organisasi mencakup ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, sementara aspek hukum terlihat dari buruknya perundang-undangan dan penegakan hukum yang lemah. Aspek sosial melibatkan lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku antikorupsi (Kemendikbud, 2013).

Menurut Kemendikbud (2013), korupsi dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup aspek-aspek internal dalam individu atau organisasi yang menjadi potensi pemicu korupsi. Di sisi lain, faktor eksternal melibatkan pengaruh dari lingkungan eksternal seperti kebijakan pemerintah, sistem hukum, dan faktor-faktor sosial. Dalam konteks ini, Kemendikbud (2013) menyajikan gambaran lebih terperinci mengenai kompleksitas korupsi dengan merinci faktor-faktor penyebabnya, membuka wawasan terhadap aspek-aspek yang perlu diperhatikan guna memahami dan mengatasi permasalahan korupsi secara holistik.

a. Faktor Internal

1) Sifat serakah/tamak/rakus manusia

Keinginan berlebih dan nafsu untuk memperoleh lebih banyak harta atau kekuasaan seringkali menciptakan perilaku keserakahan dan tamak pada seseorang, membuatnya sulit untuk merasa puas dengan apa yang telah dimilikinya. Meskipun seseorang mungkin telah mencapai tingkat kekayaan atau jabatan yang tinggi, dominasi sifat tamak dapat mengaburkan batasan antara halal dan haram dalam usaha mencari rezeki. Keadaan ini menjadi pendorong bagi para profesional dan mereka yang hidup berkecukupan untuk terjerumus dalam praktik korupsi, seperti yang dijelaskan oleh Kemendikbud pada tahun 2013.

2) Gaya hidup konsumtif

Nafsu serakah bersanding dengan gaya hidup yang berlebihan dapat menjadi pendorong internal terjadinya tindakan korupsi. Contoh gaya hidup konsumtif mencakup pembelian barang-barang mewah dan mahal, serta pengikut tren kehidupan perkotaan yang mengedepankan kesan glamor. Korupsi menjadi potensi nyata ketika seseorang terjerumus dalam gaya hidup konsumtif tanpa didukung oleh pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Kemendikbud, 2013).

3) Moral yang lemah

Seseorang yang memiliki kelemahan moral cenderung rentan tergoda untuk terlibat dalam tindakan korupsi. Kelemahan moral tersebut dapat mencakup rendahnya tingkat keimanan, kurangnya integritas, atau kekurangan rasa malu terhadap perilaku koruptif. Apabila moral seseorang lemah, godaan untuk terlibat dalam korupsi menjadi sulit untuk dihindari. Versi godaan tersebut dapat berasal dari berbagai pihak, seperti atasan, rekan sejawat, bawahan, atau entitas lain yang memberikan peluang atau insentif untuk melibatkan diri dalam praktik korupsi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

b. Faktor Penyebab Eksternal

1) Aspek Sosial

Pengaruh lingkungan sosial, terutama dalam konteks keluarga, dapat menjadi faktor penentu dalam mendorong perilaku korupsi seseorang. Ironisnya, sebaliknya, keluarga seringkali tidak hanya tidak menghukum, tetapi malah turut mendukung anggota keluarga yang terlibat dalam tindakan korupsi, mungkin sebagai bentuk pemenuhan keserakahan bersama. Selain itu, aspek nilai dan budaya dalam masyarakat juga menjadi pendorong terjadinya korupsi, di mana penilaian terhadap seseorang seringkali terkait dengan kekayaan yang dimilikinya, dan praktik memberikan gratifikasi kepada pejabat dianggap sebagai norma

yang diterima. Fenomena ini menciptakan lingkungan sosial yang mempermudah berkembangnya perilaku korupsi, seperti yang diungkapkan oleh Kemendikbud pada tahun 2013.

2) Aspek Politik

Keyakinan bahwa politik digunakan sebagai alat untuk mencapai keuntungan finansial yang besar dapat diidentifikasi sebagai faktor eksternal yang memicu tingginya tingkat korupsi. Tujuan politik yang bersifat oportunis, dengan fokus pada peningkatan kekayaan pribadi, pada akhirnya menciptakan praktik *money politics* yang merugikan integritas demokrasi. *Money politics* mencakup strategi kotor seperti pembelian suara atau memberi sogokan kepada pemilih dan anggota partai politik, menciptakan lingkungan politik yang rentan terhadap praktik-praktik korupsi. Hal ini sejalan dengan temuan Kemendikbud (2013) yang menyoroti dampak negatif dari *money politics* dalam konteks sistem politik di Indonesia.

3) Aspek Hukum

Hukum merupakan pemicu korupsi dapat dianalisis melalui dua perspektif utama, yaitu aspek perundang-undangan dan kelemahan dalam penegakan hukum. Para pelaku korupsi cenderung mencari celah dalam kerangka perundang-undangan untuk melancarkan tindakan mereka. Disamping itu, penegakan hukum yang tidak efektif dalam menciptakan efek jera cenderung memberikan keberanian lebih kepada pelaku korupsi, sehingga perilaku koruptif terus merajalela (Kemendikbud, 2013).

4) Aspek Ekonomi

Hukum merupakan pemicu korupsi dapat dianalisis melalui dua perspektif utama, yaitu aspek perundang-undangan dan kelemahan dalam penegakan hukum. Para pelaku korupsi cenderung mencari celah dalam kerangka perundang-undangan untuk melancarkan tindakan mereka. Disamping itu, penegakan hukum yang tidak efektif dalam menciptakan

efek jera cenderung memberikan keberanian lebih kepada pelaku korupsi, sehingga perilaku koruptif terus merajalela (Kemendikbud, 2013).

5) Aspek Organisasi

Salah satu faktor eksternal yang dapat menjadi pemicu korupsi adalah lingkungan organisasi di mana pelaku korupsi beroperasi. Keterlibatan organisasi ini seringkali memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindakan korupsi, karena membuka peluang atau kesempatan untuk praktik-praktik yang tidak etis. Hal ini dapat termanifestasi dalam kurangnya teladan integritas dari para pemimpin, keberadaan budaya yang tidak mendukung prinsip-prinsip kejujuran, sistem akuntabilitas yang kurang memadai, atau kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen. Menyoroti isu-isu tersebut menjadi penting dalam upaya pencegahan korupsi, karena menciptakan lingkungan organisasi yang sehat dan berintegritas merupakan aspek krusial dalam menjaga tata kelola yang baik. (Kemendikbud, 2013).

1.4 Teori Penyebab Korupsi

Teori GONE (*Greedy, Opportunity, Need, and Exposure*) mengidentifikasi empat faktor internal dan eksternal yang menjadi akar penyebab korupsi. Faktor pertama adalah keserakahan dan kerakusan pelaku korupsi (*greed*), yang mencerminkan dorongan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara berlebihan. Faktor kedua adalah kesempatan atau peluang (*opportunity*), yang memberikan celah bagi terjadinya tindakan korupsi. Faktor ketiga adalah kebutuhan (*needs*) atau sikap mental yang tidak pernah cukup, tercermin dalam konsumerisme berlebihan dan kebutuhan yang tidak pernah terpuaskan. Terakhir, faktor keempat adalah pengungkapan (*exposure*), yang terkait dengan hukuman rendah dan kurangnya efek jera terhadap para pelaku korupsi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem hukuman yang tidak memadai dapat memberikan dorongan bagi korupsi. (Kemendikbud, 2013).

Selain Teori GONE, terdapat beberapa pandangan lain yang mengupas akar penyebab korupsi. Beberapa teori tersebut melibatkan faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, kelemahan sistem hukum, dan rendahnya integritas lembaga pemerintahan. Teori tekanan ekonomi menekankan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan dapat menciptakan lingkungan yang memudahkan tindakan korupsi. Sementara itu, teori kelemahan sistem hukum menyoroti rendahnya efektivitas penegakan hukum dan keberlanjutan impunitas sebagai pendorong perilaku koruptif. Terakhir, teori rendahnya integritas lembaga pemerintahan menunjukkan bahwa kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal dalam institusi pemerintah dapat memberikan ruang bagi praktik korupsi. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh terhadap penyebab korupsi memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan sejumlah faktor yang saling terkait.

a. Teori Korupsi Robert Kittgard/ *CDMA Theory*

Teori korupsi Robert Kittgard, yang dikenal dengan istilah CDMA, mengajukan argumen bahwa korupsi muncul akibat adanya keberadaan kekuasaan dan monopoli tanpa didampingi oleh akuntabilitas. Kittgard menyusun teorinya dalam rumus $Corruption = (Directionary + Monopoly) - Accountability$ (CDMA). Dalam pandangannya, elemen kunci yang menyebabkan korupsi adalah arah kebijakan yang tidak jelas, dominasi monopoli, dan kurangnya pertanggungjawaban. Pandangan ini diperkuat oleh penelitian Syauket (2021). Teori ini menegaskan bahwa untuk mengurangi tingkat korupsi, diperlukan upaya untuk memperjelas arah kebijakan, mengurangi dominasi monopoli, dan meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola kekuasaan.

b. Teori Korupsi Donald R Cressey : *Fraud Triangle Theory*

Terdapat tiga elemen utama yang dapat memengaruhi terjadinya kecurangan atau fraud, yaitu kesempatan, motivasi, dan nasionalisasi, sebagaimana disoroti oleh Syauket (2021). Ketiga faktor ini dianggap memiliki tingkat pengaruh yang sebanding satu sama lain, saling memengaruhi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya kecurangan. Dengan

demikian, penekanan pada kesempatan, motivasi, dan aspek nasionalisasi menjadi krusial dalam memahami dan mencegah potensi kecurangan dalam suatu konteks tertentu.

c. *Teori Willingness and Opportunity to Corrupt*

Korupsi dapat terjadi ketika ada peluang atau kesempatan yang muncul akibat kelemahan dalam sistem atau kurangnya pengawasan, yang kemudian dipadukan dengan niat atau keinginan yang didorong oleh kebutuhan dan keserakahan individu (Syauket, 2021).

d. *Teori Cost-Benefit*

Korupsi terjadi ketika keuntungan yang diperoleh atau dirasakan dari praktik korupsi melebihi biaya atau risiko yang terkait (Syauket, 2021). Dalam konteks ini, fenomena korupsi dapat dijelaskan sebagai tindakan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan hal ini terjadi ketika manfaat yang diperoleh dari tindakan korupsi dianggap lebih tinggi daripada risiko atau biaya yang mungkin timbul sebagai konsekuensinya. Penekanan pada perbandingan antara manfaat dan biaya tersebut menggambarkan dinamika kompleks di balik terjadinya korupsi, dan pemahaman ini dapat membantu merancang strategi pencegahan yang efektif serta mendorong penegakan hukum yang tegas dalam upaya memerangi praktik korupsi.

e. *Teori berdasarkan Motivasi Pelaku*

Motivasi pelaku korupsi dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori utama, sebagaimana dijelaskan oleh Syauket (2021) dalam kajiannya tentang Nilai Manfaat Bersih Korupsi. Pertama, terdapat korupsi yang dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak. Kedua, korupsi dapat terjadi saat pelaku melihat peluang untuk melibatkan diri dalam tindakan yang merugikan secara finansial. Selanjutnya, motivasi korupsi mungkin timbul dari keinginan pribadi untuk memperkaya diri sendiri. Di samping itu, korupsi juga bisa menjadi sarana untuk merusak dan menjatuhkan pemerintahan. Terakhir, motivasi korupsi dapat mencakup ambisi yang lebih besar, yaitu menguasai suatu negara. Pemahaman

yang mendalam terhadap beragam motif ini penting dalam mengatasi dan mencegah korupsi, sehingga upaya pemberantasan dapat disusun dengan strategi yang tepat sesuai dengan akar permasalahan yang ada.

1.5 Dampak Korupsi

Korupsi memiliki dampak penghancuran yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Perilaku yang tidak bermoral ini telah merugikan keadilan sosial dan merusak kualitas pelayanan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan atas dasar korupsi juga telah merusak struktur kebijakan publik, mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak objektif dan merugikan masyarakat luas. Selain berdampak pada aspek kehidupan sehari-hari, korupsi juga membawa efek domino yang merugikan, bahkan mengancam eksistensi bangsa dan negara. Peningkatan kesadaran akan bahaya korupsi dan langkah-langkah pencegahan yang efektif menjadi krusial untuk menjaga integritas dan keberlanjutan pembangunan negara. (Kemendikbud, 2013).

Dalam konteks global, korupsi senantiasa menarik perhatian lebih daripada jenis tindak pidana lainnya, hal ini dapat dimaklumi karena dampak negatif yang merajalela di berbagai sektor kehidupan. Fenomena ini, sebagaimana diuraikan oleh Kemendikbud (2013), memberikan dampak yang meluas dan merugikan pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, dan lingkungan. Korupsi tidak hanya menghancurkan struktur perekonomian dengan memicu ketidakadilan dan ketidaksetaraan, tetapi juga merongrong kesejahteraan sosial dengan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam ranah pemerintahan, korupsi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga dan proses demokratis, menciptakan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Selain itu, dampak korupsi juga mewarnai aspek lingkungan dengan memicu praktik-praktik yang merusak alam demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi menjadi suatu keharusan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

a. Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi

Dampak merajalelanya korupsi terhadap kondisi ekonomi sangat beragam dan serius. Pertumbuhan ekonomi dan investasi terhambat, produktivitas menurun, kualitas barang dan jasa untuk masyarakat menjadi rendah, pendapatan negara dari sektor pajak menurun, dan hutang negara meningkat. Fenomena ini menciptakan lingkungan ekonomi yang lesu dan tidak berkelanjutan, memperkuat urgensi untuk mengatasi masalah korupsi guna menciptakan kestabilan ekonomi yang lebih baik.

b. Dampak Korupsi di Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Korupsi yang merajalela telah menciptakan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menyebabkan mereka kehilangan pegangan yang jelas. Akibatnya, masyarakat cenderung menjadi lebih individualis, hanya fokus pada kepentingan pribadi dan keluarga. Dampak sosial dan kemasyarakatan korupsi mencakup peningkatan biaya jasa dan pelayanan publik, lambatnya upaya pengentasan kemiskinan, keterbatasan akses bagi masyarakat miskin, dan peningkatan angka kriminalitas. Hal ini menciptakan lingkungan yang sulit bagi pembangunan yang berkelanjutan dan merugikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

c. Dampak Korupsi di Bidang Pemerintahan

Korupsi memiliki dampak serius terhadap sektor pemerintahan karena menghambat pelaksanaan fungsi-fungsi inti. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan karena terjadinya peningkatan korupsi seringkali tidak diimbangi dengan tindakan pemerintah yang tegas. Korupsi dengan karakter personal dapat merusak reputasi lembaga pemerintahan. Implikasi korupsi dalam pemerintahan mencakup penghancuran etika sosial politik, ketidakefisienan birokrasi, kehilangan fungsi pemerintah yang seharusnya, dan ketidakefektifan peraturan serta perundang-undangan. Fenomena ini membawa dampak yang merugikan, mengancam fondasi moralitas dan kinerja lembaga-lembaga yang seharusnya berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

d. Dampak Korupsi di Bidang Hukum

Di Indonesia, berbagai landasan hukum dan instrumen telah diterapkan untuk memberangus dan memberantas tindak pidana korupsi. Dengan mengandalkan undang-undang dan peraturan pemerintah, upaya pencegahan korupsi dilakukan, dan para pelaku dikenai hukuman yang sesuai. Dalam konteks dampaknya terhadap bidang hukum, korupsi berpotensi merugikan negara dalam beberapa aspek. Pertama, korupsi dapat menyebabkan fungsi pemerintahan menjadi terhambat dan tidak efektif. Kedua, peraturan perundang-undangan yang ada dapat kehilangan efektivitasnya akibat praktek korupsi. Ketiga, dampak yang signifikan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara, yang dapat merugikan integritas sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan korupsi menjadi esensial guna memastikan keberlanjutan fungsi pemerintahan yang adil dan berintegritas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

e. Dampak Korupsi di Bidang Politik dan Demokrasi

Hubungan antara budaya politik dan demokratisasi menunjukkan keterkaitan yang erat, dimana budaya politik memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan demokrasi. Kegagalan demokratisasi dapat terjadi ketika tidak didukung oleh pembentukan budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu hambatan utama dalam konteks ini adalah korupsi yang tidak terkendali. Dampak korupsi terhadap bidang politik dan demokrasi meliputi langkanya solidaritas sosial, demoralisasi, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, ketidakpercayaan terhadap politisi dan pejabat publik yang berimplikasi pada kehilangan kepercayaan terhadap negara. Selain itu, masyarakat cenderung menjadi apatis terhadap kegiatan publik dan demokrasi, sementara ketegangan sosial dan penurunan stabilitas politik negara semakin meningkat. Persaingan politik pun menjadi tidak sehat, dengan orientasi lebih pada kepentingan kelompok daripada kesejahteraan bersama.

f. Dampak Korupsi di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan negara mencakup upaya untuk menjaga kedaulatan, integritas wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan negara. Korupsi yang meluas dan sulit dikendalikan dapat menimbulkan dampak serius di sektor pertahanan dan keamanan, seperti menimbulkan kerawanan dalam pertahanan dan keamanan nasional karena melemahnya peralatan militer dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat. Selain itu, korupsi juga dapat melemahkan garis batas negara, meningkatkan risiko kekerasan dalam masyarakat, dan merugikan ketahanan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanganan korupsi di sektor ini menjadi krusial guna menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

g. Dampak Korupsi di Bidang Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup, yang dipicu oleh sejumlah faktor seperti kepentingan ekonomi yang mendorong eksploitasi besar-besaran hasil hutan demi keuntungan finansial, terkait erat dengan lemahnya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum saat ini hanya mampu menjangkau pelaku di lapangan, tanpa dapat mencapai aktor di balik perusakan yang diduga melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum, dan pengusaha nasional. Dampak korupsi dalam konteks lingkungan mencakup penurunan kualitas lingkungan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Fenomena ini memberikan dampak serius terhadap ekosistem dan kesejahteraan masyarakat, menyoroti urgensi perbaikan sistem penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam rangka melindungi lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang.

1.6 Solusi Penanganan Korupsi

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena berpotensi menimbulkan dampak yang masif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain merugikan negara secara finansial, korupsi juga menyengsarakan rakyat di dalamnya. Tidak terdapat jawaban tunggal dan sederhana untuk menjelaskan mengapa korupsi dapat timbul dan berkembang sedemikian masif di

suatu negara. Beberapa pandangan menggambarkan korupsi sebagai penyakit 'kanker ganas' yang bersifat kronis dan akut, secara perlahan menggerogoti perekonomian suatu negara. Korupsi menyebar pada semua aspek kehidupan masyarakat, menjadikannya sulit untuk diberantas. Penting untuk dipahami bahwa di mana pun dan hingga tingkatan tertentu, korupsi mungkin akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat.

Banyak yang berpendapat bahwa pendekatan paling efektif dalam memberantas korupsi adalah dengan memberikan hukuman yang sangat berat kepada pelaku korupsi. Oleh karena itu, fokus utama diarahkan pada bidang hukum, khususnya hukum pidana, sebagai solusi paling tepat untuk mengatasi masalah ini. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum dan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun kenyataannya korupsi terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Bahkan, dalam beberapa kasus, lembaga dan aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi justru terlibat dalam memperkuat fenomena korupsi di Indonesia..

Untuk mengatasi permasalahan korupsi, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 yang menetapkan strategi nasional pemberantasan korupsi. Zuber (2018) menjelaskan bahwa peraturan tersebut mengidentifikasi tiga pendekatan utama, yaitu penindakan (*kuratif*), pencegahan (*preventif*), dan pendidikan. Pendekatan kuratif fokus pada upaya penegakan hukum untuk menindak pelaku korupsi secara tegas. Sementara itu, pendekatan preventif menitikberatkan pada langkah-langkah proaktif guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Terakhir, pendekatan pendidikan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang konsekuensi dan dampak negatif korupsi, dengan harapan dapat mengubah sikap dan perilaku masyarakat terkait dengan korupsi.

a. Strategi Penindakan/ kuratif

Upaya kuratif atau penindakan merupakan langkah pemberantasan korupsi melalui penerapan hukum setelah terjadinya tindak korupsi. Dalam beberapa teori,

upaya kuratif ini sering disebut sebagai pendekatan represif, dengan makna yang serupa. Oleh karena itu, strategi penindakan atau kuratif dapat diartikan sebagai pendekatan represif untuk menghadirkan pelaku korupsi di hadapan pengadilan, termasuk membacakan tuntutan, mempresentasikan saksi-saksi, dan memaparkan alat bukti yang kuat. Strategi ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi (Zuber, 2018).

Meskipun banyak pelaku korupsi yang telah dijerat dan diproses hukum, upaya pemberantasan korupsi melalui jalur penegakan hukum belum menunjukkan efektivitas yang memadai. Terdapat wacana untuk memberlakukan hukuman mati bagi pelaku korupsi, namun kenyataannya, data ICW tahun 2021 mengindikasikan bahwa kerugian negara akibat korupsi pada Semester I mencapai Rp.26,83 Trilyun, meningkat dari Rp.18,173 Trilyun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Fakta ini menegaskan bahwa pendekatan kuratif melalui penindakan hukum saja belum mampu secara memadai menangani permasalahan korupsi (Abdul, 2022).

b. Strategi Pencegahan/ *preventif*

Selain melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diperkuat melalui pendekatan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya korupsi sejak dini. Langkah-langkah pencegahan ini dilakukan sebelum adanya perbuatan koruptif dengan maksud agar potensi pelaku korupsi merasa terhalang dan masyarakat pada umumnya tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam tindakan korupsi. Upaya pencegahan melibatkan perbaikan pada sistem secara menyeluruh, dengan tujuan meminimalkan risiko terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam strategi ini, dilakukan serangkaian kajian yang mendalam untuk memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait guna mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang efektif (Abdul, 2022).

Abdul (2022) menguraikan beberapa strategi preventif untuk meminimalkan risiko korupsi. Salah satunya adalah pengembangan Undang-

undang dan regulasi yang dirancang untuk mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi. Selain itu, terdapat upaya melalui gerakan sosial budaya, seperti Kampanye Antikorupsi, yang bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam masyarakat. Pemanfaatan teknologi juga menjadi pendekatan efektif dengan mempromosikan transparansi, seperti penggunaan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa, *e-recruitment* dalam perekrutan sumber daya manusia, serta e-spt dan e-lhkp sebagai sarana pelaporan online. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peran aktif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan penindakan serta sebagai multiplier dalam mengintensifkan upaya pencegahan korupsi.

c. Strategi Pendidikan

Salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi adalah melalui sektor pendidikan. Langkah ini melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi negatif korupsi, mengajak partisipasi aktif dalam gerakan anti-korupsi, dan membentuk perilaku serta budaya yang menolak praktik korupsi. Pendidikan Antikorupsi menjadi sebuah pendekatan yang komprehensif dalam pencegahan dan eradikasi korupsi, yang dapat diintegrasikan baik dalam konteks pendidikan formal maupun nonformal. Suatu tujuan utama dari pendekatan ini adalah memperkenalkan konsep bahaya korupsi secara dini kepada siswa sekolah (Zuber, 2018).

Pendidikan Antikorupsi menjadi suatu kebutuhan yang esensial dalam menguatkan upaya pemberantasan korupsi yang sedang berlangsung, dengan pendekatan melalui reformasi sistem dan kelembagaan serta penegakan hukum, sebagaimana disarankan oleh Handoyo (2013). Menurut Azra (2006), Pendidikan Antikorupsi merupakan suatu upaya untuk mereformasi kultur politik melalui sistem pendidikan, yang bertujuan menciptakan perubahan kultural yang berkelanjutan, termasuk dalam mendorong terbentuknya budaya good governance di lingkungan sekolah. Peran strategis sekolah dalam melaksanakan Pendidikan Antikorupsi termanifestasi dalam usahanya membudayakan perilaku antikorupsi

di kalangan siswa dan mahasiswa. Dengan pengembangan kultur sekolah, diharapkan siswa-siswa dapat memiliki modal sosial yang cukup untuk menginternalisasi dan mengamalkan perilaku antikorupsi, sejalan dengan konsep yang diungkapkan oleh Handoyo (2013).

Pemberantasan korupsi melalui pendidikan di Indonesia dianggap membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mengamati hasilnya dibandingkan dengan strategi pemberantasan korupsi lainnya. Meskipun demikian, upaya ini dianggap penting karena pembelajaran antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai karakter di berbagai tingkat pendidikan diharapkan dapat secara efektif melindungi generasi muda dari potensi pewarisan perilaku korup. Tujuan utamanya adalah mencegah mereka menjadi penerus dari praktik korupsi yang dilakukan oleh generasi sebelumnya.

2. Pendidikan

2.1 Pengertian Pendidikan

Pemberantasan korupsi melalui pendidikan di Indonesia dianggap sebagai pendekatan yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengamati hasilnya jika dibandingkan dengan strategi pemberantasan korupsi yang lain. Walaupun demikian, upaya ini dianggap sebagai suatu langkah penting karena melibatkan pembelajaran antikorupsi melalui penanaman nilai-nilai karakter di berbagai tingkat pendidikan, dengan harapan bahwa hal ini dapat secara efektif melindungi generasi muda dari potensi pewarisan perilaku korup. Tujuan utamanya adalah mencegah generasi muda agar tidak menjadi penerus dari praktik korupsi yang dilakukan oleh generasi sebelumnya.

Sparta dan Athena merupakan dua negara kuno di Yunani dengan sistem pendidikan yang berbeda. Sparta, sebagai negara Aristokrasi-militeristis, mengikuti Undang-undang Lycurgus sekitar tahun 900 SM. Pendidikan di Sparta diselenggarakan oleh negara dan hanya untuk warga negara merdeka. Sementara itu, Athena menganut sistem demokrasi dan mengacu pada Undang-Undang Solon sekitar tahun 594 SM. Pendidikan di Athena bertujuan untuk membentuk warganegara dengan harmoni jasmani dan rohani. Sejarah pendidikan di kedua

negara ini dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh seperti Pythagoras (580-500 SM), Socrates (469-399 SM), Plato (427-347 SM), dan Aristoteles (384-322 SM).

Asal-usul kata "pendidikan" dapat ditelusuri dari bahasa Yunani, khususnya dari istilah "*paedagogos*," yang merupakan gabungan dari "paed" yang berarti "anak" dan "*agogos*" yang berarti "aku membimbing." Dalam konteks ini, *paedagogos* dapat diartikan sebagai upaya membimbing anak. Perspektif Romawi mengenai pendidikan mencerminkan konsep *educare*, yang mencakup pengeluaran dan bimbingan untuk merealisasikan potensi yang dimiliki anak sejak lahir. Sementara itu, pandangan bangsa Jerman mengenai pendidikan sebagai *erziehung* sejalan dengan *educare*, fokus pada pengembangan kekuatan terpendam dan aktivasi potensi anak. Di dalam konteks bahasa Jawa, pendidikan diartikan sebagai *panggulawentah*, yang merujuk pada proses pengolahan dan perubahan aspek kejiwaan, pematangan perasaan, pikiran, kemauan, serta watak, guna mengubah kepribadian anak secara holistik. Dengan demikian, pemahaman tentang pendidikan dari berbagai perspektif ini memberikan gambaran komprehensif mengenai peran pembimbingan, pengaktifan potensi, dan transformasi kepribadian dalam proses pendidikan.

Beberapa ahli pendidikan telah memberikan definisi terhadap makna pendidikan. Salah satunya adalah Humrey (1975) yang menggambarkan pendidikan sebagai suatu proses penambahan ketrampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman melalui latihan, studi, atau pengalaman. Pendapat lain datang dari John Dewey (1964) yang melihat pendidikan sebagai upaya membantu manusia agar mampu merenung atas permasalahan yang muncul dalam masyarakat, serta sebagai usaha untuk melengkapi mereka sehingga mampu menghasilkan perubahan yang konkret dalam kehidupan mereka. John Dewey (1964) menegaskan bahwa jika dalam proses pendidikan tidak terjadi pengaruh positif terhadap alam dan masyarakat, maka tidak dapat disebut sebagai pendidikan. Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam bentuk perubahan dan pertumbuhan.

Ki Hajar Dewantara menafsirkan pendidikan sebagai usaha untuk mengembangkan nilai moral, pemikiran, dan fisik anak, dengan tujuan

meningkatkan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan membawa anak-anak agar selaras dengan alam dan masyarakat mereka (Nurkholis, 2013). Di sisi lain, Tilaar (2000) menjelaskan bahwa hakikat pendidikan adalah untuk menghumanisasi manusia, suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu kesatuan dalam eksistensinya. Saroni (2011) kemudian menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses yang terjadi dalam kehidupan, bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar diri. Penyeimbangan ini dianggap sebagai bentuk kelangsungan hidup yang dilakukan agar individu dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan kehidupan (Nurkholis, 2013; Tilaar, 2000; Saroni, 2011)..

Beberapa konsep pendidikan yang telah dijelaskan, meskipun tampak berbeda, sebenarnya memiliki kesamaan esensial. Pendidikan dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan hubungan antara pendidik dan peserta didik, serta memiliki tujuan tertentu. Secara substansial, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi pengalaman individu dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dalam interaksi mereka dengan lingkungan. Konsep ini mencerminkan ide bahwa pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan sebuah upaya menyusun kembali pengalaman untuk mencapai peningkatan kemampuan individu dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya.

3. Pendidikan Karakter

3.1 Pengertian Karakter

Secara etimologis, asal-usul kata "karakter" berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata "*eharassein*" yang memiliki arti "*to engrave*" atau mengukir. Dalam konteks ini, "*to engrave*" dapat diartikan sebagai tindakan mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan. Arti tersebut sesuai dengan konsep "karakter" dalam bahasa Inggris (*character*), yang juga mencerminkan ide mengenai mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan. Di dalam bahasa Indonesia, konsep "karakter" dijelaskan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain (Suyadi, 2013). Dengan demikian, pengertian tentang "karakter" tidak hanya mencakup

aspek linguistik dan etimologis, tetapi juga melibatkan dimensi nilai dan kepribadian seseorang yang membedakannya dalam masyarakat.

Aristoteles, seorang filsuf Yunani, mengartikan karakter yang baik sebagai kehidupan yang melibatkan tindakan-tindakan yang benar terkait dengan diri sendiri dan orang lain. Pandangan ini sejalan dengan pemahaman Michael Novak, seorang filsuf kontemporer, yang menyatakan bahwa karakter merupakan perpaduan yang selaras dari segala kebaikan yang diakui oleh tradisi keagamaan, narasi sastra, kebijaksanaan, dan pemikiran rasional dalam sejarah. Thomas Lickona juga memberikan kontribusi dengan menggambarkan karakter sebagai kemampuan untuk mengetahui yang baik, menginginkan yang baik, dan bertindak sesuai dengan yang baik. Dengan demikian, pemahaman karakter sebagai panduan untuk berbuat baik dan bermoral melibatkan pengetahuan, keinginan, dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai baik yang diakui oleh berbagai sumber dalam sejarah pemikiran manusia (Lickona, 2009).

Individu yang memiliki karakter dapat didefinisikan sebagai individu yang secara alamiah merespons situasi dengan tindakan moral yang tercermin dalam perilaku yang baik, jujur, bertanggung jawab, serta penuh penghormatan terhadap sesama dan nilai-nilai mulia lainnya. Konsep ini sejalan dengan pandangan Aristoteles, yang mengaitkan karakter dengan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Lickona lebih lanjut menggarisbawahi tiga aspek kunci dalam pendidikan karakter, yakni mengenal, mencintai, dan mengamalkan kebaikan. Baginya, keberhasilan pendidikan karakter dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap karakter yang baik, menumbuhkan rasa cinta terhadapnya, dan memberikan teladan dalam mengaktualisasikan karakter yang baik (Lickona, 2009).

Dari beragam konsep yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa karakter mencakup nilai-nilai perilaku manusia yang bersifat universal, mencakup seluruh aspek kehidupan seperti hubungan dengan Tuhan, individu, sesama manusia, dan lingkungan. Konsep ini tercermin dalam berbagai dimensi, termasuk dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan tindakan, yang selaras dengan norma-norma agama, hukum, etika, budaya, dan tradisi. Penekanan pada

kerangka normatif ini memberikan fondasi bagi karakter manusia yang terintegrasi dan menggambarkan landasan moral serta etika yang menjadi panduan dalam interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari.

3.2 Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan moral atau pendidikan karakter bukanlah isu baru dalam ranah pendidikan, melainkan telah menjadi bagian integral sepanjang sejarah pendidikan itu sendiri. Penelitian sejarah global mengindikasikan bahwa pendidikan memiliki dua tujuan pokok, yakni membimbing generasi muda agar cerdas secara intelektual dan memiliki perilaku berbudi. Penting untuk diakui bahwa kecerdasan dan perilaku baik tidak selalu identik, dan pemangku kebijakan sejak zaman Plato telah merancang kebijakan pendidikan karakter sebagai komponen sentral dari sistem pendidikan formal (Lickona, 2009).

Pendidikan karakter merupakan upaya untuk menginternalisasi kebiasaan positif, sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk berperilaku dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang telah menjadi bagian integral dari kepribadiannya (Kemdiknas, 2011). Landasan pendidikan karakter terletak pada nilai-nilai etika inti yang berakar dalam konteks masyarakat demokratis, terutama penghargaan, tanggung jawab, kepercayaan, keadilan dan kejujuran, kepedulian, serta kewarganegaraan dan kemasyarakatan kebajikan (Murphy, 2002). Dalam perspektif lain, pendidikan karakter dapat diartikan sebagai pendidikan nilai, budi pekerti, moral, dan watak, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membuat keputusan yang baik, menjaga hal-hal yang positif, serta mengimplementasikan kebaikan tersebut secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh dedikasi (Muchlas & Haryanto, 2012).

Pendidikan karakter merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur kepada peserta didik. Hal ini dilakukan agar mereka dapat mempraktikkan karakter tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup keluarga, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai warga negara. Definisi pendidikan karakter, seperti yang diungkapkan oleh Agus (2013), menekankan pada pembentukan

karakter yang luhur melalui proses pendidikan. Lebih lanjut, pendidikan karakter ini berfokus pada penanaman nilai-nilai yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi peserta didik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam konteks lingkungan sekolah. Pendekatan ini sejalan dengan pemahaman Hurlock (1980), yang menyoroti nilai-nilai yang esensial untuk perkembangan pribadi dan sosial peserta didik.

Pendidikan karakter merupakan suatu proses penanaman nilai yang melibatkan pemahaman, tata cara merawat, dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari siswa (Hurlock, 1980). Konsep ini sejalan dengan pandangan Lickona (2009), yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah upaya sadar untuk membantu seseorang memahami, memperhatikan, dan menerapkan nilai-nilai etika. Lickona lebih lanjut menguraikan bahwa karakter terdiri dari tiga aspek yang saling terkait, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik mencakup pengetahuan yang benar, keinginan untuk hal-hal yang baik, serta tindakan yang baik dalam kebiasaan berpikir, kebiasaan batin, dan kebiasaan bertindak (Lickona, 2009).

Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai suatu sistem pendidikan moral dan budi pekerti yang bertujuan untuk memperkaya nilai-nilai karakter melalui suatu proses yang melibatkan pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan saling memengaruhi satu sama lain. Artinya, pendidikan yang efektif tidak hanya fokus pada peningkatan pengetahuan moral, tetapi juga melibatkan pengembangan perasaan moral dan perilaku moral agar individu dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai karakter yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menciptakan landasan holistik untuk pembentukan karakter yang kuat dan perilaku positif.

3.3 Nilai Pendidikan Karakter

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdiknas) telah mengembangkan nilai-nilai karakter luhur yang bersumber dari empat aspek utama. Pertama, agama, sebagai fondasi utama dalam mengingatkan bahwa

masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Kedua, Pancasila, sebagai dasar negara yang memandu nilai-nilai kebangsaan. Ketiga, budaya, yang menjadi kaya akan norma dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, tujuan Pendidikan Nasional, sebagai panduan dalam membangun karakter bangsa. Dalam upaya memperkuat karakter warga Indonesia, Kemdiknas (2011) merumuskan 18 nilai-nilai yang esensial, yang diimplikasikan kedalam individu melalui pendidikan karakter. Nilai-nilai tersebut terdokumentasikan dalam Tabel 2.1 sebagai panduan untuk membentuk karakter yang kokoh dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Tabel 2. 1 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter

No	Nilai Karakter	Deskripsi
1.	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2.	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3.	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4.	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5.	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6.	Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7.	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8.	Demokratis	Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9.	Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10.	Semangat Kebangsaan	Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas

No	Nilai Karakter	Deskripsi
		kepentingan diri dan kelompoknya.
11.	Cinta Tanah Air	Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12.	Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan hal yang berguna bagi masyarakat, serta mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
13.	Bersahabat/ Komunikatif	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
14.	Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15.	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16.	Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17.	Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18.	Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan YME.

Selanjutnya 18 nilai-nilai esensial yang dirumuskan oleh Kemdiknas (2011), yang diimplikasikan kedalam individu melalui pendidikan karakter dapat dijelaskan secara lebih dalam sebagai berikut:

a. Relegius

Nilai karakter relegius adalah serangkaian prinsip atau ajaran moral yang berakar dari nilai-nilai agama atau kepercayaan tertentu. Nilai-nilai ini mencakup aspek-aspek seperti ketulusan, kejujuran, kasih sayang, kerendahan

hati, keadilan, dan ketaatan terhadap ajaran agama. Dengan menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, individu diharapkan dapat mengembangkan kepribadian yang kuat, bermartabat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks pendidikan, pengembangan nilai karakter religius bertujuan untuk membentuk generasi yang memiliki moralitas yang kokoh dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat berdasarkan ajaran agama atau kepercayaan yang dianutnya (Kemdiknas, 2011).

Religius dapat juga diartikan sebagai sikap dan perilaku yang sesuai dalam mengamalkan ajaran agama yang diyakini mencakup ketaatan pada norma-norma agama yang dianut. Selain itu, pentingnya toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain menunjukkan wawasan dan penghargaan terhadap keberagaman agama. Keterbukaan untuk hidup rukun dengan pemeluk agama lain juga menjadi indikator kematangan spiritual, memperkuat semangat harmoni antarumat beragama.

b. Jujur

Nilai karakter jujur adalah prinsip moral yang menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam segala aspek kehidupan. Ini melibatkan perilaku yang jujur, tulus, dan tidak menipu baik dalam kata maupun perbuatan. Individu yang memiliki nilai karakter jujur akan berkomitmen untuk selalu berbicara dan bertindak dengan kebenaran, serta tidak melakukan penipuan, curang, atau manipulasi dalam interaksi dengan orang lain. Kejujuran merupakan pondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat dan percaya baik di lingkungan sosial, profesional, maupun personal (Kemdiknas, 2011).

Jujur dapat juga diartikan sebagai perilaku yang berfokus pada tekad untuk membangun reputasi sebagai individu yang konsisten dapat diandalkan dalam segala aspek, baik itu dalam penyampaian perkataan, pelaksanaan tindakan, maupun penyelesaian pekerjaan. Pemeliharaan integritas dan kepercayaan menjadi landasan utama dalam setiap interaksi dan kewajiban. Kesungguhan tersebut tercermin dalam dedikasi untuk senantiasa memenuhi komitmen serta

menjaga kualitas kerja, membuktikan keterpercayaan dan profesionalisme. Dengan demikian, individu ini berusaha membangun fondasi kuat dalam relasinya dengan orang lain, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan kerja atau masyarakat yang lebih luas.

c. Toleransi

Nilai karakter toleransi adalah sikap mental dan perilaku yang menghargai dan menerima perbedaan antara individu, kelompok, atau komunitas. Ini mencakup kemampuan untuk menghormati, menerima, dan memahami pandangan, kepercayaan, dan budaya yang berbeda dari yang kita miliki sendiri. Toleransi melibatkan kesediaan untuk berkomunikasi secara terbuka, berempati terhadap orang lain, dan menanggapi perbedaan dengan damai dan hormat. Individu yang memiliki nilai karakter toleransi akan menghargai keragaman dalam masyarakat, menolak diskriminasi atau prasangka, dan berusaha untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan orang-orang yang memiliki latar belakang atau pandangan yang berbeda. Toleransi adalah salah satu pilar penting dalam membangun hubungan yang saling menghormati dan berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat yang multikultural dan multireligius (Kemdiknas, 2011).

Toleransi dapat juga diartikan sebagai Sikap dan perilaku yang mengakui serta menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang inklusif. Ketika seseorang dapat memahami dan menghormati keragaman ini, menciptakan lingkungan di mana toleransi dan saling pengertian dapat berkembang. Penerimaan terhadap perbedaan keyakinan agama, latar belakang suku, dan pandangan dunia memainkan peran krusial dalam memupuk kerjasama antarindividu serta kelompok. Tindakan ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang melampaui batas-batas perbedaan, memperkuat fondasi persatuan, dan menggalang sinergi dalam mencapai kemajuan bersama. Oleh karena itu, upaya untuk memelihara sikap inklusif dan mengedepankan tindakan yang membangun jembatan antarperbedaan menjadi landasan yang

kritis dalam mengembangkan masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan rasa hormat terhadap hak asasi manusia.

d. Disiplin

Nilai karakter disiplin adalah kesadaran dan kemauan seseorang untuk mengatur diri sendiri, mematuhi aturan, dan menjaga keteraturan dalam melakukan tugas atau aktivitas. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diemban, dan berkomitmen untuk konsisten dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Nilai karakter disiplin meliputi aspek-aspek seperti ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, konsistensi dalam perilaku, serta tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diemban. Individu yang memiliki nilai karakter disiplin cenderung mampu mengatur diri mereka sendiri, menghadapi tantangan dengan ketekunan, dan bertanggung jawab terhadap hasil dari upaya mereka. Dalam konteks pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari, nilai karakter disiplin sangat penting karena berkontribusi pada pencapaian tujuan, produktivitas yang tinggi, dan kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan (Kemdiknas, 2011).

Disiplin dapat juga diartikan sebagai pengamalan perilaku tertib dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan peraturan mencerminkan sikap tanggung jawab serta ketaatan yang tinggi terhadap norma-norma yang berlaku. Tindakan tersebut menunjukkan kesadaran individu atau kelompok terhadap pentingnya menjaga keteraturan dalam berbagai konteks, baik di lingkungan kerja, pendidikan, maupun sosial. Keberhasilan dalam mematuhi peraturan menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis, mengedepankan nilai-nilai integritas, serta memperkuat fondasi tata kelola yang baik. Kesiapan untuk mematuhi norma-norma ini juga menjadi cerminan dari komitmen terhadap pembangunan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Dengan demikian, sikap tertib dan patuh terhadap ketentuan dan peraturan menjadi pijakan esensial dalam membangun budaya yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.

e. Kerja Keras

Nilai karakter kerja keras adalah sikap mental dan perilaku yang menekankan pentingnya usaha yang tekun, ketekunan, dan dedikasi dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Ini melibatkan kemauan untuk bekerja dengan gigih, mengatasi rintangan atau tantangan, dan tidak mudah menyerah di hadapan kesulitan. Individu yang memiliki nilai karakter kerja keras cenderung memiliki motivasi internal yang tinggi untuk mencapai kesuksesan. Mereka biasanya memiliki dorongan untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan keterampilan mereka. Mereka siap untuk mengorbankan waktu dan tenaga demi mencapai hasil yang diinginkan, dan memiliki kebiasaan untuk bekerja dengan fokus dan konsistensi. Kerja keras adalah kunci penting untuk mencapai prestasi dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, karier, dan kehidupan pribadi. Dengan nilai karakter kerja keras yang kuat, seseorang dapat mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dan mencapai potensi penuh mereka (Kemdiknas, 2011).

Kerja keras dapat juga diartikan sebagai perilaku yang mencerminkan dedikasi tinggi dalam mengatasi berbagai tantangan dan menyelesaikan tugas dengan optimal dapat diidentifikasi melalui upaya sungguh-sungguh yang diperlihatkan. Kesungguhan ini tercermin dalam kemampuan individu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul, sekaligus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pencapaian hasil terbaik. Dalam konteks ini, upaya sungguh-sungguh mencakup pendekatan proaktif dan ketekunan dalam menghadapi setiap rintangan, serta keinginan yang tinggi untuk mencapai tujuan secara efektif. Perilaku semacam ini tidak hanya memperlihatkan tanggung jawab individu terhadap tugas yang diemban, tetapi juga mencerminkan orientasi pada kualitas dan keunggulan dalam setiap aspek pelaksanaan.

f. Kreatif

Nilai karakter kreatif adalah sikap mental dan perilaku yang menekankan pentingnya berpikir kreatif, inovatif, dan original dalam memecahkan masalah, menghasilkan ide baru, dan menciptakan sesuatu yang berbeda atau bernilai. Ini melibatkan kemampuan untuk berimajinasi, berpikir di luar kotak, dan menemukan solusi yang unik untuk berbagai tantangan atau situasi. Individu yang memiliki nilai karakter kreatif cenderung terbuka terhadap ide-ide baru, tidak takut untuk mengambil risiko, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka dapat melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, membuat asosiasi yang tidak biasa, dan mengintegrasikan berbagai gagasan atau konsep untuk menciptakan sesuatu yang baru dan orisinal. Kreativitas adalah kualitas yang sangat berharga dalam berbagai bidang, termasuk seni, ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, dan pendidikan. Dengan nilai karakter kreatif yang kuat, seseorang dapat menemukan solusi-solusi inovatif, menginspirasi orang lain, dan menciptakan perubahan yang positif dalam lingkungan mereka (Kemdiknas, 2011).

Kreatif dapat juga diartikan sebagai proses berfikir dan bertindak untuk menciptakan metode atau *output* baru dari sumber daya yang sudah ada merupakan suatu tindakan kreatif yang mendasar dalam pengembangan inovasi. Proses ini mencakup pemikiran analitis dan strategis untuk mengidentifikasi potensi peningkatan atau modifikasi terhadap hal yang sudah ada, dengan tujuan menghasilkan solusi atau hasil yang lebih efektif dan efisien. Tindakan ini penting dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memainkan peran utama dalam menciptakan kemajuan dan perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan mempertahankan keterhubungan dengan literatur yang relevan, pendekatan ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pengetahuan dan inovasi dalam masyarakat.

g. Mandiri

Nilai karakter mandiri adalah sikap mental dan perilaku yang menekankan kemampuan seseorang untuk bertindak secara independen, mengambil inisiatif, dan mengelola diri mereka sendiri tanpa bergantung pada orang lain secara berlebihan. Ini melibatkan kemauan dan kemampuan untuk membuat keputusan sendiri, mengatasi tantangan, dan bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan hidup mereka. Individu yang memiliki nilai karakter mandiri cenderung memiliki rasa percaya diri yang kuat, kemauan untuk belajar dan tumbuh secara mandiri, serta kemandirian dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas. Mereka biasanya tidak terlalu terpengaruh oleh opini atau pandangan orang lain, namun tetap terbuka terhadap masukan dan saran yang konstruktif. Kemandirian adalah kualitas yang sangat penting dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, pendidikan, atau karier. Dengan nilai karakter mandiri yang kuat, seseorang dapat mengembangkan kemampuan untuk mengatasi rintangan, mengambil tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri, dan menjadi individu yang mandiri dan berkembang secara pribadi (Kemdiknas, 2011).

Mandiri dapat juga diartikan sebagai sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas adalah suatu karakteristik yang menunjukkan tingkat kemandirian individu. Kemandirian ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan menyelesaikan pekerjaan tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan atau dukungan eksternal. Hal ini dapat diartikan sebagai sikap proaktif dan tanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Dengan demikian, perilaku ini mencerminkan kedewasaan profesional dan kemampuan untuk bekerja secara mandiri, sesuai dengan tuntutan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan kerja atau aktivitas sehari-hari.

h. Demokratis

Nilai karakter demokratis adalah sikap mental dan perilaku yang mendorong penghargaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, seperti

penghormatan terhadap kebebasan individu, persamaan hak, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, serta penghargaan terhadap pluralisme dan keragaman pendapat. Individu yang memiliki nilai karakter demokratis cenderung menghargai hak asasi manusia, menghormati pendapat orang lain, dan berpartisipasi dalam proses demokratis. Mereka juga mempromosikan keadilan, kebebasan berpendapat, serta menghargai keputusan yang diambil melalui proses demokratis, meskipun mungkin tidak selalu setuju dengan hasilnya. Nilai karakter demokratis sangat penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis. Dengan nilai karakter demokratis yang kuat, individu dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua orang (Kemdiknas, 2011).

Demokratis dapat juga diartikan sebagai cara berpikir, bersikap, dan bertindak dengan menilai sama hak dan kewajiban diri sendiri serta orang lain mencerminkan suatu pendekatan yang inklusif dan etis dalam interaksi sosial. Kesadaran akan persamaan hak dan tanggung jawab individu membentuk landasan bagi pengembangan sikap saling menghargai dan keadilan dalam berbagai konteks kehidupan. Dalam perspektif ini, kesetaraan hak asasi manusia menjadi dasar untuk menilai tindakan dan sikap, menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kesejahteraan bersama. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip moral dan sosial ini menjadi landasan untuk mengembangkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, di mana individu dapat berkontribusi secara positif sambil tetap mempertimbangkan kepentingan bersama.

i. Rasa Ingin Tahu

Nilai karakter rasa ingin tahu adalah sikap mental dan perilaku yang menekankan pentingnya memiliki keinginan untuk belajar, mengeksplorasi, dan memahami dunia di sekitar kita. Ini melibatkan dorongan intrinsik untuk mencari pengetahuan baru, memahami bagaimana sesuatu bekerja, dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikiran.

Individu yang memiliki nilai karakter rasa ingin tahu cenderung memiliki sikap terbuka terhadap pengetahuan baru, bertanya banyak pertanyaan, dan senang mengeksplorasi berbagai topik. Mereka biasanya memiliki kemauan untuk belajar dari pengalaman, menguji batasan, dan mengejar pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar mereka. Rasa ingin tahu adalah kunci penting untuk pertumbuhan pribadi dan perkembangan intelektual. Dengan nilai karakter rasa ingin tahu yang kuat, seseorang dapat meningkatkan keterampilan kognitif, memperluas wawasan, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitarnya (Kemdiknas, 2011).

Rasa ingin tahu dapat juga diartikan sebagai sikap dan tindakan yang konsisten berusaha untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif dari materi yang sedang dipelajari, diamati, dan didengar adalah suatu hal yang sangat diperlukan. Keinginan untuk meraih pemahaman yang lebih mendalam tersebut mencerminkan semangat penelitian yang kuat dan dedikasi terhadap pengembangan pengetahuan. Tindakan ini juga mencerminkan upaya untuk menggali lebih jauh ke dalam konsep atau fenomena yang sedang diteliti, sehingga menciptakan dasar pengetahuan yang lebih kokoh dan mendalam. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mencirikan keinginan untuk mengetahui, tetapi juga mencerminkan tekad untuk menguasai subjek secara menyeluruh, menggambarkan komitmen terhadap eksplorasi intelektual yang menyeluruh.

j. Semangat Kebangsaan

Nilai karakter semangat kebangsaan adalah sikap mental dan perilaku yang menekankan rasa cinta, kesetiaan, dan pengabdian terhadap negara atau bangsa tempat individu tersebut tinggal. Ini melibatkan rasa identitas yang kuat dengan budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang dipegang oleh negara atau bangsa tersebut, serta keterlibatan aktif dalam memajukan kepentingan umum dan kesejahteraan bersama. Individu yang memiliki nilai karakter semangat kebangsaan cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap

negara atau bangsa mereka, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mereka biasanya memperjuangkan persatuan, kesatuan, dan kemajuan bersama, serta siap untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan dan perbaikan masyarakat. Semangat kebangsaan merupakan faktor penting dalam membangun identitas nasional yang kuat dan memelihara keutuhan bangsa. Dengan nilai karakter semangat kebangsaan yang kuat, individu dapat menjadi agen perubahan yang positif, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun komunitas yang kokoh dan sejahtera (Kemdiknas, 2011).

Semangat kebangsaan dapat juga diartikan sebagai cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok merupakan suatu sikap yang mendasar dalam menjaga kedaulatan dan kemajuan sebuah bangsa. Pendekatan ini memerlukan kematangan pemikiran yang melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Seseorang yang memiliki perspektif demikian tidak hanya memandang dari sudut pandang individu atau kelompok tertentu, namun juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keseluruhan masyarakat dan negara. Dalam konteks ini, kesadaran akan tanggung jawab terhadap keberlangsungan negara menjadi landasan utama, sehingga setiap tindakan dan keputusan yang diambil dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan bersama. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas, stabilitas, dan daya saing bangsa dalam kancah global, di mana kepentingan kolektif mengungguli kepentingan sektoral.

k. Cinta Tanah Air

Nilai karakter cinta tanah air adalah sikap mental dan perilaku yang menekankan rasa cinta, kesetiaan, dan kepedulian terhadap tanah air atau negara tempat individu tersebut tinggal. Ini mencakup penghargaan terhadap sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh tanah air tersebut, serta keterlibatan aktif dalam memajukan kepentingan umum dan kesejahteraan

masyarakat. Individu yang memiliki nilai karakter cinta tanah air cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kepentingan negara dan masyarakatnya. Mereka merasa bangga dengan identitas nasional mereka, dan siap untuk berkontribusi dalam pembangunan dan perlindungan keberlangsungan tanah air mereka. Cinta tanah air adalah fondasi dari persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan nilai karakter cinta tanah air yang kuat, individu dapat menjadi agen perubahan yang positif, memupuk semangat kebersamaan, dan membantu membangun masyarakat yang kokoh dan berkelanjutan (Kemdiknas, 2011).

Cinta tanah air dapat juga diartikan sebagai cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang mencerminkan tingginya kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat, mencakup bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik, merupakan indikator penting dari kedewasaan kultural seseorang terhadap bangsa. Sikap tersebut menandakan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas bahasa dalam berkomunikasi, merawat lingkungan fisik untuk keberlanjutan, memahami dan menghormati keberagaman sosial dan budaya, serta berpartisipasi secara positif dalam dinamika ekonomi dan politik. Kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan ini menciptakan pondasi yang kokoh bagi individu untuk berkontribusi secara positif dalam pembangunan dan pemeliharaan kesejahteraan bangsa.

1. Menghargai Prestasi

Nilai karakter menghargai prestasi adalah sikap mental dan perilaku yang menekankan penghargaan terhadap usaha, kerja keras, dan pencapaian seseorang dalam mencapai tujuan atau meraih keberhasilan. Ini melibatkan penghargaan terhadap prestasi baik dalam bidang akademis, profesional, maupun pribadi, serta memberikan penghormatan dan apresiasi kepada individu yang telah mencapai prestasi tersebut. Individu yang memiliki nilai karakter menghargai prestasi cenderung memiliki sikap terbuka terhadap pengakuan atas pencapaian orang lain, serta berbagi kegembiraan dan inspirasi

dari keberhasilan mereka. Mereka juga mungkin merasa terdorong untuk mengejar prestasi yang lebih tinggi dalam hidup mereka sendiri. Menghargai prestasi adalah cara yang baik untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain, serta untuk membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Dengan nilai karakter menghargai prestasi yang kuat, individu dapat meraih potensi penuh mereka, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat (Kemdiknas, 2011).

Menghargai prestasi dapat juga diartikan sebagai sikap dan langkah-langkah yang mendorong seseorang untuk menciptakan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus mengakui serta menghargai pencapaian individu lainnya, menandai sebuah sikap yang konstruktif dan inklusif dalam pembangunan sosial. Dalam upaya mencapai tujuan ini, individu tersebut secara aktif terlibat dalam inisiatif yang mendukung kesejahteraan bersama, sambil tetap memberikan apresiasi terhadap prestasi yang telah dicapai oleh rekan-rekan sejawatnya. Kesiediaan untuk mengakui keberhasilan orang lain sebagai inspirasi dan membangun kerjasama yang positif menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat yang saling mendukung dan menghargai.

m. Bersahabat/ Komunikatif

Nilai karakter bersahabat/komunikatif adalah sikap mental dan perilaku yang menekankan pentingnya memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif, terbuka, dan empatik. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, berbicara dengan jelas, dan memahami perasaan serta perspektif orang lain. Individu yang memiliki nilai karakter bersahabat/komunikatif cenderung memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung dengan orang lain. Mereka juga biasanya terbuka untuk berbagi ide, pengalaman, dan perasaan mereka sendiri, serta mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Keterampilan komunikasi dan kemampuan untuk bersahabat dengan orang lain adalah kunci untuk menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan harmonis. Dengan nilai

karakter bersahabat/komunikatif yang kuat, seseorang dapat membangun hubungan yang erat, memecahkan konflik secara efektif, dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama (Kemdiknas, 2011).

Bersahabat/ Komunikatif dapat juga diartikan sebagai sikap serta tindakan yang mendorong seseorang untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menghormati pencapaian individu lainnya, merupakan elemen kunci dalam membentuk karakter berkualitas. Dorongan internal yang memacu individu untuk menghasilkan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya, disertai dengan penghargaan terhadap keberhasilan sesama, menciptakan landasan moral yang kuat. Sikap proaktif dalam menciptakan dampak positif tidak hanya mencakup kemauan untuk mengembangkan potensi pribadi, tetapi juga kesiapan untuk mengakui dan menghormati prestasi orang lain. Dalam konteks ini, sikap saling menghormati menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kolektif, di mana setiap individu diinspirasi oleh semangat kolaboratif untuk mencapai keberhasilan bersama.

n. Cinta Damai

Nilai karakter cinta damai adalah sikap mental dan perilaku yang menekankan pentingnya menciptakan dan memelihara kedamaian dalam hubungan antarindividu, kelompok, dan masyarakat secara luas. Ini melibatkan penghargaan terhadap perdamaian sebagai cara yang paling baik untuk menyelesaikan konflik, mempromosikan kerjasama, dan membangun hubungan yang harmonis. Individu yang memiliki nilai karakter cinta damai cenderung memiliki sikap toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Mereka menghindari kekerasan dan konfrontasi, serta berusaha untuk menyelesaikan konflik melalui dialog, negosiasi, dan kompromi yang saling menguntungkan. Cinta damai adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan. Dengan nilai karakter cinta damai yang kuat, individu dapat berperan dalam membangun budaya perdamaian, menginspirasi orang lain untuk bertindak dengan baik, dan

menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi semua orang (Kemdiknas, 2011).

Cinta damai dapat juga diartikan sebagai sikap, ungkapan verbal, dan perilaku yang menginduksi perasaan sukacita dan ketenangan pada individu lain merupakan elemen-elemen yang esensial dalam menciptakan lingkungan sosial yang positif. Kehadiran seseorang dapat memberikan dampak signifikan terhadap suasana sekitarnya, dan oleh karena itu, mengadaptasi sikap yang ramah, perkataan yang mendukung, dan tindakan yang mempromosikan keamanan menjadi kunci untuk membentuk interaksi interpersonal yang membangun. Penerapan aspek-aspek ini mendorong terciptanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan di sekitar individu tersebut, menciptakan hubungan yang saling mendukung dan memperkuat ikatan sosial.

o. Gemar Membaca

Nilai karakter gemar membaca adalah sikap mental dan perilaku yang menekankan pentingnya menumbuhkan kebiasaan membaca sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan kemauan dan kebiasaan untuk mengeksplorasi berbagai jenis bahan bacaan, mulai dari buku, artikel, hingga berita, untuk memperluas pengetahuan, memperkaya pikiran, dan meningkatkan pemahaman tentang dunia di sekitar. Individu yang memiliki nilai karakter gemar membaca cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ketertarikan yang kuat terhadap belajar, dan kemampuan untuk mengapresiasi dan menikmati kegiatan membaca. Mereka juga mungkin memiliki kemampuan untuk memilih bahan bacaan yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka sendiri. Kebiasaan membaca adalah kunci untuk pengembangan intelektual dan pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Dengan nilai karakter gemar membaca yang kuat, seseorang dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, memperluas wawasan, dan membuka pintu menuju kesempatan-kesempatan baru dalam kehidupan mereka (Kemdiknas, 2011).

Gemar membaca dapat juga diartikan sebagai kebiasaan mengalokasikan waktu untuk membaca berbagai jenis literatur yang memberikan manfaat bagi perkembangan pribadi merupakan tindakan yang sangat berharga. Aktivitas membaca yang beragam dapat merangsang intelektualitas dan meningkatkan pemahaman terhadap berbagai konsep, ide, serta nilai-nilai yang mendasar. Pentingnya memprioritaskan waktu untuk mengeksplorasi berbagai sumber bacaan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pribadi, dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam serta memperkaya pengetahuan. Dalam konteks ini, membaca tidak hanya menjadi kegiatan hobi, tetapi juga menjadi suatu bentuk investasi diri yang mendukung perkembangan pribadi dan intelektualitas seseorang.

p. Peduli Lingkungan

Nilai karakter peduli lingkungan adalah sikap mental dan perilaku yang menekankan kesadaran, tanggung jawab, dan tindakan untuk melindungi, merawat, dan melestarikan lingkungan alam serta ekosistem yang ada di dalamnya. Ini melibatkan penghargaan terhadap nilai-nilai keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, pengurangan polusi, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Individu yang memiliki nilai karakter peduli lingkungan cenderung memiliki kesadaran akan dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan, serta merasa bertanggung jawab untuk bertindak secara proaktif dalam memperbaiki dan melindungi lingkungan. Mereka juga mungkin memiliki kebiasaan untuk menggunakan sumber daya secara bijaksana, mengurangi limbah, dan memilih produk yang ramah lingkungan. Peduli lingkungan adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem di Bumi. Dengan nilai karakter peduli lingkungan yang kuat, individu dapat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, memperbaiki kerusakan lingkungan, dan mendorong perubahan menuju pola hidup yang lebih berkelanjutan bagi generasi masa depan (Kemdiknas, 2011).

Peduli lingkungan dapat juga diartikan sebagai sikap dan langkah-langkah yang konsisten diambil untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan alam di sekitar dan menginisiasi upaya-upaya perbaikan terhadap kerusakan yang telah terjadi merupakan suatu aspek penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Komitmen terus-menerus dalam menerapkan tindakan pencegahan dan pengembangan solusi untuk merespons kerusakan alam mencerminkan kesadaran akan perlunya menjaga keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan sikap ini memainkan peran krusial dalam mendukung keberlanjutan dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati serta sumber daya alam. Dengan demikian, menggali inisiatif-inisiatif yang mendukung keberlanjutan lingkungan adalah langkah-langkah strategis yang tidak hanya mendukung pelestarian alam, tetapi juga memperlihatkan tanggung jawab kolektif terhadap warisan lingkungan bagi generasi mendatang.

q. Peduli Sosial

Nilai karakter peduli sosial adalah sikap mental dan perilaku yang menekankan kepedulian, empati, dan tindakan untuk membantu dan mendukung individu-individu atau kelompok-kelompok yang membutuhkan bantuan dalam masyarakat. Ini melibatkan penghargaan terhadap kesulitan orang lain, keinginan untuk membantu mereka yang kurang beruntung, dan partisipasi aktif dalam kegiatan atau program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Individu yang memiliki nilai karakter peduli sosial cenderung memiliki kemauan untuk berbagi, memberikan dukungan moral atau material kepada mereka yang membutuhkan, serta berpartisipasi dalam kegiatan sukarela atau inisiatif untuk membantu masyarakat. Mereka juga mungkin memiliki kesadaran akan masalah-masalah sosial yang ada di sekitar mereka dan merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Peduli sosial adalah kunci untuk membangun masyarakat yang inklusif, saling mendukung, dan berdaya. Dengan nilai karakter peduli sosial yang kuat, individu dapat memainkan peran penting dalam mengatasi ketimpangan sosial, meningkatkan

kualitas hidup orang lain, dan memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat (Kemdiknas, 2011).

Peduli sosial dapat juga diartikan sebagai sikap dan perilaku yang konsisten dalam memberikan bantuan kepada individu maupun masyarakat yang memerlukan adalah suatu bentuk dedikasi yang luhur. Kepedulian yang terus-menerus ditunjukkan terhadap sesama mencerminkan karakter yang altruistis dan tanggap terhadap kebutuhan sosial. Keinginan untuk memberikan kontribusi positif bagi orang lain mencerminkan sikap proaktif dalam mengatasi tantangan dan mempromosikan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, upaya untuk senantiasa membantu sesama bukan hanya mencerminkan moralitas individu, tetapi juga dapat memperkuat ikatan sosial, menciptakan masyarakat yang lebih peduli, dan memperluas dampak positif di berbagai lapisan masyarakat.

r. Tanggung Jawab

Nilai karakter tanggung jawab adalah sikap mental dan perilaku yang menekankan kesadaran akan tugas, kewajiban, dan konsekuensi dari tindakan seseorang. Ini melibatkan kemampuan untuk mengenali dan menerima tanggung jawab atas keputusan dan perbuatan yang dilakukan, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma-norma yang berlaku. Individu yang memiliki nilai karakter tanggung jawab cenderung memiliki kesadaran akan akibat dari tindakan mereka, serta siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban mereka, baik kepada diri sendiri, orang lain, maupun masyarakat. Mereka juga mungkin memiliki kemauan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat dan belajar dari pengalaman. Tanggung jawab adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang dipenuhi dengan rasa percaya, keamanan, dan kesejahteraan. Dengan nilai karakter tanggung jawab yang kuat, individu dapat memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang sehat, menjaga keberlangsungan organisasi atau masyarakat, dan menciptakan dampak positif dalam lingkungan di sekitar mereka (Kemdiknas, 2011).

Tanggung Jawab dapat juga diartikan sebagai sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menunjukkan dedikasi terhadap diri sendiri, masyarakat, serta lingkungan yang mencakup aspek alam, sosial, dan budaya. Keterlibatan individu dalam melaksanakan tanggung jawabnya juga mencerminkan komitmen terhadap Negara dan penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan peran ini menggambarkan integritas personal yang tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai kultural.

Pendidikan memegang peranan sentral dalam masyarakat demokrasi yang madani, dan sebagai salah satu pilar utama kehidupan masyarakat, pendidikan memiliki kontribusi signifikan dalam penanggulangan berbagai masalah bangsa. Salah satu isu yang memerlukan perhatian serius adalah korupsi, dan pendidikan di Indonesia dapat berperan penting dalam upaya pemberantasannya. Penerapan Pendidikan Antikorupsi (PAk) menjadi suatu gagasan yang relevan, di mana nilai-nilai karakter dapat ditanamkan secara sistematis dalam sistem pendidikan. Dengan demikian, upaya ini dapat menjadi langkah konkrit dalam membangun fondasi moral dan etika yang kuat, yang pada gilirannya diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih integritas dan berkontribusi positif dalam membentuk masa depan bangsa.

4. Pendidikan Antikorupsi (PAk)

4.1 Pengertian Pendidikan Antikorupsi (PAk)

Upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan bukan merupakan konsep baru dalam konteks global. Sejumlah negara telah mengimplementasikan program Pendidikan Antikorupsi di institusi pendidikan dan mencapai hasil yang signifikan (Montessori, 2012). Hongkong, sebagai contoh, telah menjalankan inisiatif ini sejak tahun 1974 dan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Pada awalnya, Hongkong diwarnai oleh tingkat korupsi yang tinggi, dengan deskripsi bahwa korupsi telah meresap dari "dari lahir hingga kubur." Namun, saat ini, Hongkong telah menjadi salah satu negara di Asia dengan Indeks Persepsi

Korupsi (IPK) yang sangat rendah, menempati peringkat ke-11 dari 180 negara di dunia menurut laporan *Transparency International* pada tahun 2021. Keberhasilan ini merupakan hasil dari upaya serentak dalam memerangi korupsi dari berbagai aspek, termasuk implementasi Pendidikan Antikorupsi secara resmi di lingkungan pendidikan (Man-wai, 2006).

Pendidikan Antikorupsi (PAk) dapat diartikan sebagai suatu inisiatif yang disengaja untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terhadap tindakan korupsi melalui berbagai jalur, seperti pendidikan formal di lingkungan sekolah, pendidikan informal di dalam keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat (Supandi & Vernia, 2015). Perspektif lain oleh Wibowo (2013) menyatakan bahwa PAk merupakan suatu upaya sadar dan terencana untuk menciptakan proses pembelajaran yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam konteks ini, Pendidikan Antikorupsi tidak hanya mengandalkan transfer pengetahuan secara kognitif, melainkan juga menekankan pembentukan karakter secara afektif dan kesadaran moral perlawanan dalam dimensi psikomotorik terhadap perilaku korupsi. Dengan demikian, Pendidikan Antikorupsi menjadi suatu pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga melibatkan aspek karakter dan kesadaran moral untuk menghambat terjadinya perilaku korupsi.

Pendidikan Antikorupsi tidak hanya terbatas pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi, tetapi melibatkan tahapan lebih lanjut yang mencakup pemahaman mendalam, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai antikorupsi sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Proses pendidikan ini menekankan pentingnya tidak hanya mengenali, tetapi juga memahami secara menyeluruh serta menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi sehingga menjadi kebiasaan hidup yang terwujud dalam tindakan sehari-hari.

4.2 Negara di Dunia yang Menerapkan Pendidikan Antikorupsi (PAk)

Korupsi telah diakui secara global sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan ancaman serius terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara (Ariyanti & Ariyani, 2020).

Dalam respons terhadap dampak merusak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, negara-negara di seluruh dunia bersatu dan sepakat membentuk *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. UNCAC merupakan inisiatif bersama untuk mengekang dan mencegah praktik korupsi, mencerminkan keprihatinan bersama terhadap ancaman yang dihadapi oleh masyarakat internasional.

Contoh model Pendidikan Antikorupsi di sekolah mencakup berbagai variasi pada tingkat pendidikan, jenis aktivitas di dalam dan luar sekolah, serta inisiator program pendidikan. Program ini dapat melibatkan keterlibatan pemerintah atau tidak, dan mencerminkan desain Pendidikan Antikorupsi yang beragam di sejumlah negara. Beberapa negara telah mengembangkan Pendidikan Antikorupsi dengan berbagai metode, sementara negara-negara lain yang sudah lebih maju telah merancang strategi pendidikan anti-korupsi yang efektif.

a. Nigeria

Tidak adanya kemajuan dalam memberantas endemi korupsi di Nigeria, yang seharusnya menjadi fokus *Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission* (ICPC) dan lembaga antikorupsi lainnya, mendorong pemerintah untuk mengambil langkah drastis. Dalam upaya terakhirnya, pemerintah Nigeria memutuskan untuk mengintegrasikan Pendidikan Antikorupsi sebagai solusi strategis. Sebagai negara Afrika kedua paling korup menurut *Transparency International* (TI), langkah ini melibatkan pembentukan tim ahli khusus yang bertugas merancang kurikulum pendidikan antikorupsi. Rencananya, kurikulum ini akan diperkenalkan di semua tingkatan pendidikan, termasuk sekolah dan universitas negeri di Nigeria (Yamin, 2016).

b. Vietnam

Pada tahun 2007, *Government Inspection Agency* menyusun suatu proyek dengan tujuan mengintegrasikan materi mengenai pencegahan korupsi ke dalam kurikulum pendidikan di Vietnam. Seperti halnya pada kebanyakan inisiatif serupa di negara-negara lain, perjalanan pelaksanaan proyek ini

dipenuhi dengan dinamika debat terkait sejumlah isu krusial. Salah satu perdebatan yang muncul adalah apakah Pendidikan Antikorupsi sebaiknya diajarkan sebagai mata pelajaran independen atau diintegrasikan sebagai bagian dari kurikulum *Marxism-Leninism Philosophy* dan *Communist Party History* (Yamin, 2016).

c. Kazakhstan

Sejak tahun 2002, mata kuliah "Preventing Corruption" telah berhasil dikoordinasikan oleh Transparency International (TI) Kazakhstan, menciptakan dampak positif dengan munculnya permintaan dari 20 universitas untuk menyelenggarakan kuliah serupa di berbagai lokasi. Buku teks yang ditulis dalam bahasa Rusia dan Kazakhstan menjadi landasan utama untuk mata kuliah ini, menarik perhatian mahasiswa dari jurusan Ekonomi dan Hukum. *Civic Foundation Transparency Kazakhstan*, dengan dukungan dari *United States Agency for International Development* (USAID) pada tahun 2003, berhasil mengembangkan program pendidikan anti-korupsi yang terfokus pada mahasiswa tahun ke-3 dan tahun ke-4 melalui mata kuliah "*Basic of Resistance to Corruption*," sebagaimana disampaikan oleh Yamin pada tahun 2016. Keberhasilan inisiatif ini mencerminkan komitmen dalam upaya pencegahan korupsi dan pengembangan pemahaman yang mendalam terkait resistensi terhadap praktik korupsi.

d. Australia

Sejak tahun 1998, *New South Wales Independent Commission Against Corruption* (ICAC) telah menginisiasi pendirian mata kuliah mengenai korupsi dan anti-korupsi di *Asia Pacific School of Economics and Government*. Mata kuliah ini merupakan hasil kerjasama antara kedua lembaga tersebut, yang dilaksanakan dengan konsultasi dari *Transparency International* setempat, seperti yang dijelaskan oleh Yamin (2016).

e. Hungaria

Central European University (CEU) dan TIRI Network, London, berkolaborasi dengan *The Center for Policies Studies*, CEU, Budapest, untuk menyelenggarakan mata kuliah "*Strategic Corruption Control and Organizational Integrity*." Mata kuliah ini dihadiri oleh para praktisi dan akademisi yang berperan dalam pengembangan kurikulum serupa di institusi mereka. Keberhasilan inisiatif ini termanifestasi dalam pembentukan *Public Integrity Education Network* oleh CEU dan TIRI, yang berhasil mendorong lebih dari 20 universitas terkemuka untuk bersama-sama mengembangkan kurikulum bersama, silabus, materi pengajaran, dan studi kasus (Yamin, 2016).

f. Amerika Serikat

Salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat yang memfokuskan perhatiannya pada permasalahan korupsi di negara-negara berkembang adalah *Georgetown University*. Melalui mata kuliah "*Corruption in Developing Countries*," universitas ini mengulas secara mendalam fenomena korupsi, faktor-faktor pemicunya, dan konsekuensinya terhadap pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teks tersebut menekankan peran khusus manajer publik dalam upaya mengurangi ruang lingkup maupun tingkat keparahan korupsi, sebagaimana diutarakan oleh Yamin pada tahun 2016.

4.3 Penerapan Pendidikan Antikorupsi (PAk) di Sekolah

Keberadaan dan peran sekolah dalam konteks ontologis dapat disimpulkan sebagai pembangun keunggulan sumber daya manusia, sesuai dengan pandangan Chatib (2009). Sekolah berfungsi sebagai wadah untuk membentuk dan menggali potensi serta bakat peserta didik, dengan tujuan agar mereka mampu mengimplementasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai miniatur kehidupan, sekolah memberikan perspektif baru terkait upaya untuk memberikan makna pada setiap aspek hidup dan kehidupan yang dijalani, sesuai dengan pemikiran Yamin (2016). Lebih jauh, sekolah tidak hanya bertugas

memantapkan pengetahuan peserta didik secara teoritis, melainkan juga membangun kecerdasan sosial, membekali mereka dengan kedewasaan untuk menghadapi realitas hidup yang kompleks, tanpa terpaku pada pemikiran hitam dan putih. Dalam konteks pengembangan diri, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat pembelajaran formal, tetapi juga berperan aktif dalam mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berprestasi dalam berbagai aspek kehidupan, sejalan dengan pandangan Yamin (2012).

Sekolah memiliki peran penting tidak hanya dalam pembangunan pendidikan yang bernilai dan berguna, tetapi juga dalam membentuk jati diri peserta didik dengan kesadaran terhadap lingkungan, seperti yang dikemukakan oleh Harefa (2002). Dalam konteks ini, pembentukan peserta didik harus dilakukan secara cermat guna mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Terutama, ketika konsep sekolah tersebut dihubungkan dengan praktik internalisasi pendidikan antikorupsi, hubungannya menjadi sangat erat. Internalisasi Pendidikan Antikorupsi dapat ditanamkan secara lebih kuat dan cepat di dalam lingkungan sekolah. Praktik ini dapat diwujudkan melalui penggabungan materi Pendidikan Antikorupsi ke dalam berbagai mata pelajaran, yang dirancang secara khusus untuk memastikan pemahaman dan penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan peserta didik.

Menurut teori perkembangan peserta didik, fase kehidupan mereka di bangku sekolah dianggap sebagai momen krusial untuk menyuntikkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa mereka. Yamin (2016) berpendapat bahwa pada tahap ini, kehidupan peserta didik belum terlalu terkontaminasi oleh berbagai pengaruh lingkungan yang negatif. Oleh karena itu, Zuchdi menekankan pentingnya metode keteladanan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Dalam konteks ini, guru diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan substansial, tetapi juga keterampilan asertif dan keterampilan menyimak. Keterampilan asertif diperlukan agar peserta didik dapat menyatakan pendapat mereka secara terbuka tanpa melukai perasaan orang lain. Di sisi lain, keterampilan menyimak diperlukan

untuk melatih kemampuan peserta didik dalam mendengarkan dengan pemahaman dan sikap kritis (Zuchdi, 2010).

Menurut Zuchdi (2010), pentingnya menanamkan nilai Pendidikan Antikorupsi dapat diwujudkan melalui pengembangan kemampuan asertif dan kemampuan menyimak pada peserta didik. Dalam konteks ini, peserta didik diajarkan untuk menjadi peka terhadap realitas di sekitarnya dan kemudian mengkomunikasikan pemahamannya terhadap realitas tersebut. Dengan kata lain, keterlibatan aktif peserta didik dalam berbagai aktivitas kasus korupsi dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap tindakan-tindakan korupsi yang terjadi. Partisipasi yang rutin dan penuh keterlibatan terhadap kasus korupsi memberikan peluang bagi peserta didik untuk memperoleh berbagai pelajaran berharga dan pengetahuan yang bermanfaat. Yamin (2016) menambahkan bahwa kemampuan peserta didik dalam mengamati dan memahami fenomena korupsi semakin mengukuhkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi berkontribusi positif pada perkembangan kehidupan peserta didik.

Menurut Yulita (2010), peran guru dalam konteks Pendidikan Antikorupsi dapat diperkuat melalui beberapa langkah strategis. Pertama, guru diharapkan untuk mengenalkan fenomena korupsi, menggambarkan esensi, menganalisis alasan munculnya, dan menyampaikan konsekuensinya. Kedua, guru juga diamanatkan untuk mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi, menciptakan kesadaran mengenai dampak negatifnya dalam masyarakat. Ketiga, dalam upaya mendemonstrasikan cara memerangi korupsi, guru diharapkan dapat menjadi contoh dan memberikan panduan konkret kepada siswa. Selain itu, guru juga diminta untuk memberikan kontribusi pada kurikulum standar dengan cara menanamkan nilai-nilai antikorupsi, memperkuat kapasitas siswa dalam berpikir kritis, mengembangkan tanggung jawab dalam menyelesaikan konflik, serta mengelola diri secara efektif dalam kehidupan sosial, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Langkah-langkah ini dianggap sebagai upaya holistik untuk menciptakan generasi yang tidak hanya memahami tetapi juga berkomitmen untuk melawan korupsi (Yulita, 2010).

Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian integral dari pendidikan moral bertujuan untuk mengembangkan pemahaman moral terhadap fenomena korupsi. Kesadaran moral terkait korupsi menjadi landasan utama, disertai dengan pemahaman nilai-nilai moral yang mendasari larangan terhadap praktik korupsi. Alasan moral yang kuat mengenai penolakan terhadap korupsi diperoleh melalui proses pemikiran moral yang mendalam. Proses pengambilan keputusan moral menjadi kunci dalam upaya melawan dan memberantas korupsi. Selain itu, pengetahuan diri juga memiliki peran penting dalam menghindari perilaku koruptif, menjadikan individu memiliki pemahaman yang mendalam mengapa korupsi tidak hanya harus ditolak, tetapi juga harus diperangi secara aktif (Zuchdi, 2010).

Pendidikan Antikorupsi sebagai pembentukan moral tidak hanya mengandalkan pemahaman konsep semata, melainkan juga harus merangkul nilai-nilai moral yang mendasarinya. Ini mencakup kesadaran (*conscience*) terhadap fakta bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dan bangsa. Kepercayaan diri (*self-esteem*) menjadi landasan penting untuk menjalani kehidupan tanpa terjerat korupsi, karena tindakan tersebut tidak hanya mencemari hati dan jiwa, tetapi juga merugikan masyarakat secara luas. Kemampuan merasakan penderitaan orang lain (*empathy*) menjadi aspek penting, karena hal ini memungkinkan individu untuk memahami dampak negatif yang timbul akibat perilaku korupsi. Cinta terhadap kebaikan (*loving the good*) diartikan sebagai penolakan terhadap tindakan korupsi yang merugikan kemanusiaan, sementara kebaikan diartikan sebagai pemikiran positif yang membawa kebajikan bagi semua dan sesama. Kemampuan mengendalikan diri (*self-control*) menjadi kunci dalam mencegah terjerumus dalam perilaku koruptif yang dipicu oleh konsumerisme dan keserakahan. Selanjutnya, kerendahan hati (*humility*) menjadi pondasi untuk menerima kehidupan dengan segala kondisinya, dan melalui kerendahan hati ini, manusia dapat memahami posisinya dalam konteks yang lebih luas, menghindarkan diri dari godaan untuk terlibat dalam tindakan korupsi yang dapat merusak masa depan bersama dan negara (Yamin, 2016).

Tentu, ketika prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar pandangan, sikap, dan perilaku bagi setiap peserta didik, akan terbentuk individu-individu yang tangguh dan berkomitmen kuat dalam memberantas korupsi sebagai bentuk kejahatan yang sangat merugikan. Dengan menginternalisasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi, generasi muda sebagai pilar bangsa akan tergerak untuk melawan praktek korupsi, tanpa memandang seberapa kecil atau seberapa besar nilai materi yang terlibat dalam tindakan tersebut.

4.4 Model Pendidikan Antikorupsi

Beberapa model untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi telah diajukan, diantaranya yang disajikan oleh Elwina (2008), Kemendikbud (2013), dan Zuber (2018). Setiap model ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penekanan pada nilai-nilai antikorupsi menjadi kunci dalam strategi pencegahan korupsi. Elwina (2008) menyajikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemendikbud (2013) menyoroti peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi, menekankan perlunya pengembangan kurikulum yang mencakup pembelajaran tentang integritas dan kejujuran. Sementara itu, Zuber (2018) menawarkan pendekatan yang berfokus pada pembentukan karakter dan kepemimpinan yang bersih sebagai strategi utama dalam menciptakan lingkungan bebas korupsi. Meskipun demikian, perlu kajian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas dan implementasi praktis dari masing-masing model ini dalam konteks nyata.

a. Model sebagai Mata Pelajaran Tersendiri

Pendidikan anti-korupsi diintegrasikan sebagai mata pelajaran mandiri, sejajar dengan disiplin ilmu lainnya. Dalam konteks ini, pendidik di bidang pembelajaran anti-korupsi diharapkan menyusun Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP), Satuan Pelajaran (SP), Rencana Pengajaran (RP), metodologi pengajaran, dan evaluasi pengajaran. Implementasi pembelajaran anti-korupsi sebagai mata pelajaran mengharuskan penjadwalan yang terstruktur, sebagaimana

disarankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 (Kemendikbud, 2013).

b. Model Terintegrasi dalam Semua Mata Pelajaran

Pentingnya penanaman nilai antikorupsi dalam pendidikan dapat diwujudkan melalui pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Guru memiliki fleksibilitas untuk memilih nilai-nilai yang akan disampaikan melalui materi pembelajaran dalam mata pelajarannya masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan mengaitkan nilai-nilai antikorupsi pada berbagai pokok bahasan atau subpokok bahasan yang relevan dengan aspek-aspek nilai hidup. Dengan menerapkan model ini, setiap guru menjadi agen pembelajaran antikorupsi tanpa pengecualian (Kemendikbud, 2013).

c. Model di Luar Pembelajaran

Penanaman nilai antikorupsi dapat efektif dilakukan melalui kegiatan di luar lingkup pembelajaran, seperti ekstrakurikuler atau kegiatan insidental. Pendekatan ini menekankan pengolahan dan penanaman nilai melalui partisipasi dalam suatu kegiatan yang kemudian dapat diulas dan didiskusikan untuk menggali nilai-nilai hidup yang terkandung di dalamnya. Implementasi model ini dapat dilakukan oleh guru yang bertanggung jawab di sekolah atau dapat diserahkan kepada lembaga di luar sekolah, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai dengan panduan Kemendikbud tahun 2013.

d. Model pembudayaan pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah

Pentingnya penanaman nilai-nilai antikorupsi tidak hanya terbatas pada ruang lingkup kurikulum formal, namun juga dapat diintegrasikan melalui pembudayaan di seluruh aktivitas dan atmosfer sekolah. Pembudayaan ini bertujuan menciptakan kebiasaan positif yang akan membentuk karakter siswa. Pembiasaan dianggap sebagai alat pendidikan yang efektif, khususnya bagi anak-anak, karena melalui proses pembiasaan, suatu aktivitas dapat menjadi bagian dari

kepribadian mereka di masa depan. Pembiasaan yang baik di lingkungan sekolah akan membentuk individu yang memiliki kepribadian positif, sementara pembiasaan yang buruk dapat berdampak negatif pada karakter seseorang. Dengan demikian, melalui pembiasaan yang ditanamkan di sekolah, anak-anak dapat terbiasa patuh dan taat pada peraturan, tidak hanya di lingkungan pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan pada tahap dewasa kelak (Kemendikbud, 2013).

e. Model Gabungan

Model gabungan mengacu pada pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen dari model terintegrasi dan pembelajaran di luar kelas secara bersama-sama. Pendekatan ini melibatkan penanaman nilai-nilai melalui pengajaran formal yang terintegrasi, seiring dengan pelibatan dalam kegiatan di luar pembelajaran. Pelaksanaan model ini dapat terwujud melalui kolaborasi tim guru atau kerja sama dengan pihak eksternal sekolah. Keunggulan utama dari model ini adalah keterlibatan seluruh guru dalam proses pembelajaran, bahkan melibatkan pembelajaran dari pihak eksternal guna pengembangan diri dan peningkatan pemahaman siswa. Anak-anak diperkenalkan dengan nilai-nilai hidup yang membentuk mereka secara holistik, melibatkan aspek informatif dan diperkuat melalui pengalaman yang terencana dengan baik (Kemendikbud, 2013).

4.5 Metode Pendidikan Antikorupsi

Menurut Elwina (2008), pendekatan yang dapat digunakan dalam penyampaian nilai-nilai antikorupsi sebaiknya bersifat demokratis dan melibatkan partisipasi bersama. Metode yang dianjurkan mencakup pencarian bersama, aktivitas kolaboratif, penerapan keteladanan, pengalaman langsung atau simulasi, serta kegiatan *live in*. Dalam konteks ini, penyampai nilai-nilai antikorupsi diharapkan dapat menjalankan proses klarifikasi nilai untuk memperkuat pemahaman dan penerimaan konsep-konsep tersebut. Para praktisi pendidikan dan pembelajaran dianjurkan untuk menggabungkan pendekatan ini agar dapat efektif dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik.

1). Metode demokratis

Metode demokratis menekankan pentingnya pencarian nilai-nilai hidup secara bebas dengan melibatkan langsung partisipasi anak didik, yang dapat diekspresikan melalui tanggapan, pendapat, dan penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukan. Guru, dalam peranannya, tidak hanya sebagai penyampai informasi tunggal, melainkan sebagai penjaga koridor dalam proses penemuan nilai-nilai tersebut. Metode ini tidak hanya mencakup nilai-nilai antikorupsi seperti keterbukaan, kejujuran, penghargaan pada pendapat orang lain, sportivitas, kerendahan hati, dan toleransi, tetapi juga mendorong anak didik untuk lebih berani mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan mereka. Pendekatan ini, sebagaimana diungkapkan oleh Elwina (2008), memberikan ruang bagi anak didik untuk menghayati dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan arahan guru.

2). Metode Pencarian bersama

Metode ini menekankan kolaborasi antara siswa dan guru dalam pencarian pengetahuan. Pendekatan ini fokus pada diskusi mengenai isu-isu aktual dalam masyarakat, dengan tujuan mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, dan argumentatif pada peserta didik. Proses pencarian bersama ini diharapkan dapat merangsang siswa untuk aktif mencari dan menemukan topik yang sedang berkembang dan menjadi perhatian bersama. Melalui kritik dan pengolahan terhadap permasalahan yang diidentifikasi, diharapkan siswa dapat mengekstrak nilai-nilai hidup yang relevan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Elwina, 2008).

3). Metode siswa aktif atau aktivitas bersama

Pendekatan ini menekankan pada partisipasi aktif anak sejak tahap awal pembelajaran. Instruktur menyampaikan pokok bahasan, sedangkan anak-anak, terorganisir dalam kelompok, diberdayakan untuk mencari dan mengembangkan langkah-langkah selanjutnya. Mereka melakukan pengamatan, membahas, menganalisis, dan menyimpulkan hasil dari kegiatan mereka. Metode ini

bertujuan untuk merangsang kreativitas, ketelitian, minat terhadap ilmu pengetahuan, kerja sama, integritas, dan semangat belajar anak (Elwina, 2008).

4). Metode keteladanan

Dalam ranah pendidikan, pengaruh yang dapat diterima dan diserap oleh anak tanpa penyaringan dapat segera tercermin dalam perilaku mereka. Pembentukan kepribadian pada anak dimulai dengan mengamati tokoh yang dijadikan teladan, di mana guru memegang peran sentral sebagai figur idola dan panutan. Melalui keteladanan, guru memiliki potensi untuk membimbing anak-anak dalam membentuk sikap yang kuat. Konsistensi antara perkataan dan tindakan guru memiliki dampak yang signifikan pada pembentukan karakter anak. Keselarasan ini memainkan peran penting, sementara ketidaksesuaian antara kata-kata dan tindakan guru dapat mengarah pada perilaku anak yang tidak sesuai. Oleh karena itu, guru perlu memperlihatkan ketulusan, keteguhan, dan konsistensi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Proses penanaman nilai-nilai antikorupsi pada anak melalui keteladanan dimulai dengan contoh nyata, namun juga memerlukan penjelasan yang menyeluruh mengenai alasan di balik tindakan tersebut. Misalnya, guru harus menjelaskan mengapa korupsi tidak diterima, menguraikan bahaya dari perilaku korupsi, atau mengapa kejujuran dan ketidakmencontekan saat ujian sangat penting. Pendekatan ini diperlukan agar sikap anak tidak hanya mencerminkan tindakan mekanis, tetapi juga didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebenaran sebagai suatu sistem nilai (Sanjaya, 2006; Elwina, 2008).

5). Metode *Live In*

Metode "Live in" dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada anak dalam berinteraksi dengan orang lain dalam situasi yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Melalui pengalaman langsung ini, anak dapat memahami dan mengenal lingkungan hidup yang berbeda, termasuk tantangan, permasalahan, dan nilai-nilai hidup yang mungkin berbeda pula. Kegiatan ini diselenggarakan secara periodik dengan tujuan agar anak dapat bersyukur atas kehidupannya yang mungkin lebih baik daripada orang lain, serta

mengembangkan sikap toleransi dan kepedulian sosial yang lebih tinggi dalam kehidupan bersama. Pentingnya bimbingan tidak dapat diabaikan, di mana anak perlu dibimbing untuk merefleksikan pengalamannya baik secara rasional intelektual maupun dari aspek batin rohaninya. Perlu diperhatikan agar tanggapan anak terhadap pengalaman ini tetap dalam batas yang wajar dan seimbang, sehingga tidak mengarah pada reaksi yang berlebihan. (Elwina, 2008).

6). Metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai.

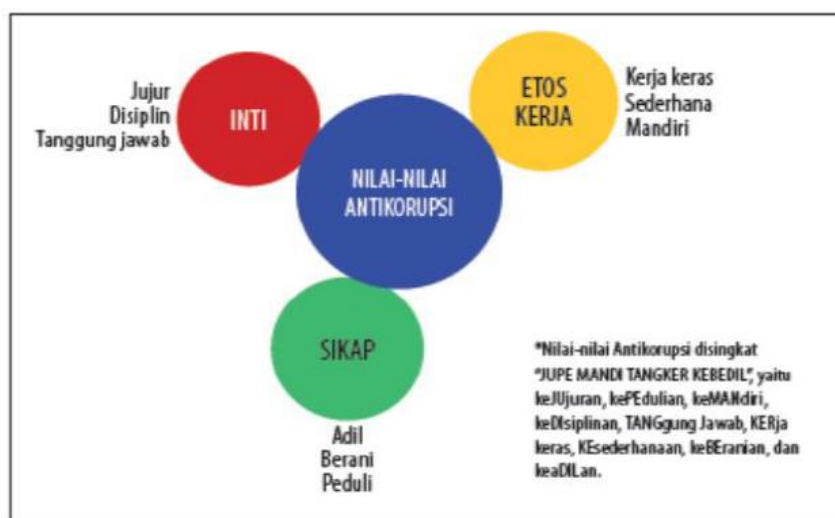
Latar belakang sosial, pendidikan, dan pengalaman hidup seseorang dapat membawa perbedaan dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai hidup. Keanekaragaman pandangan hidup dalam masyarakat dapat menciptakan kebingungan, terutama bagi seorang anak. Jika kebingungan tersebut tidak diatasi dan tanpa pendampingan yang memadai, kemungkinan besar individu tersebut akan mengalami pergeseran nilai-nilai hidup. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses penjernihan atau klarifikasi nilai melalui dialog afektif, seperti sharing atau diskusi mendalam. Teknik ini dapat diartikan sebagai metode pengajaran yang membantu siswa dalam mencari dan menentukan nilai-nilai yang dianggap baik ketika menghadapi berbagai persoalan, dengan cara menganalisis nilai-nilai yang sudah ada dan melekat dalam diri siswa (Sanjaya, 2006). Kelemahan yang umumnya muncul dalam pembelajaran nilai atau sikap, termasuk pembelajaran antikorupsi, adalah ketika guru secara langsung menanamkan nilai-nilai yang dianggapnya baik tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang sudah ada dalam diri siswa. Hal ini dapat menyebabkan konflik internal karena ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang telah ada dan nilai-nilai yang baru diperoleh dari guru. Sebagai akibatnya, siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mencocokkan dan menyelaraskan nilai-nilai yang sudah dimiliki dengan nilai-nilai baru yang diperkenalkan (Elwina, 2008).

4.6 Nilai - Nilai Karakter Antikorupsi

Pendidikan Antikorupsi merupakan suatu inisiatif pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap risiko dan konsekuensi dari perilaku korupsi. Fokus utama dari program ini adalah untuk

memperkenalkan aspek-aspek korupsi, termasuk kriteria, penyebab, dan dampaknya, dengan tujuan meningkatkan ketidaksetujuan terhadap tindakan korupsi. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menunjukkan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melawan korupsi dan berkontribusi pada pembentukan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti pengembangan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi di kalangan generasi muda. Melalui pendidikan antikorupsi, peserta didik diajak untuk menganalisis nilai-nilai yang berperan dalam terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau menentang tindakan korupsi. Oleh karena itu, esensi Pendidikan Antikorupsi terletak pada penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan dapat membentuk sikap antikorupsi pada individu peserta didik (Yamin, 2016).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan sembilan nilai karakter yang dianggap dapat menjadi benteng efektif dalam mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai tersebut, yakni kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, dapat dibagi ke dalam tiga aspek utama. Pertama, aspek inti terdiri dari kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Kedua, aspek etos kerja mencakup kerja keras, sederhana, dan mandiri. Ketiga, aspek sikap melibatkan nilai-nilai adil, berani, dan peduli. Struktur ini memberikan gambaran holistik mengenai nilai-nilai antikorupsi dan memandangnya sebagai elemen-elemen esensial dalam membangun karakter yang dapat membendung dan melawan tindakan korupsi.



Gambar 2. 1 Tiga Aspek Nilai Karakter Antikorupsi

Sembilan nilai karakter yang diajarkan dan dibiasakan kepada siswa di sekolah dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yakni Aspek Inti, Aspek Etos Kerja, dan Aspek Sikap. Dalam rangka menciptakan budaya antikorupsi, kesembilan nilai karakter tersebut diuraikan sebagai berikut: Pertama, pada Aspek Inti, siswa diajarkan untuk menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai landasan moral. Kedua, dalam Aspek Etos Kerja, siswa diberdayakan dengan nilai-nilai seperti kerja keras, kedisiplinan, dan dedikasi untuk membentuk karakter yang produktif dan berkualitas. Ketiga, Aspek Sikap mencakup nilai-nilai integritas, kerjasama, dan menghormati perbedaan, membangun landasan sikap yang positif dan inklusif. Sistem pendidikan yang mengedepankan kesembilan nilai karakter ini diharapkan mampu membentuk generasi yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas tinggi dan mampu mengatasi tantangan korupsi dalam masyarakat.

a. Aspek Inti

1) Kejujuran

Kejujuran, sebagai sikap yang tercermin dalam perkataan dan perbuatan yang sesungguhnya, menandakan ketidakberanian untuk berbohong atau melakukan tindakan curang. Kehadiran kejujuran tidak hanya berperan sebagai pilar fundamental dalam interaksi sosial sehari-hari, tetapi juga memiliki implikasi besar dalam pencegahan korupsi. Individu yang telah menanamkan nilai kejujuran dalam karakternya cenderung terhindar dari godaan melakukan tindakan korupsi karena mereka merasa takut akan konsekuensi mencurangi orang lain. Selain itu, dampak dari perilaku tidak jujur tidak hanya terbatas pada konsekuensi eksternal, namun juga mencakup keresahan psikis yang dapat dirasakan secara berkepanjangan. Kesadaran akan perbuatan tidak jujur dapat menimbulkan perasaan berdosa dan meresahkan, memberikan efek negatif yang berkelanjutan pada kesejahteraan psikologis individu tersebut (Syauket, 2021).

Beberapa tindakan anti-korupsi yang mencerminkan nilai kejujuran melibatkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar yang seharusnya, menolak praktik menyontek atau menyalin karya orang lain, menghindari

manipulasi data dan fakta dalam tugas tertentu, serta menunjukkan sikap yang bijaksana dan arif dalam proses pengambilan keputusan. Hal-hal ini mencerminkan komitmen untuk membangun integritas dan transparansi dalam lingkungan kerja, membentuk dasar yang kuat untuk mengurangi risiko korupsi.

2) Disiplin

Asal usul kata "disiplin" dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *discipline*, yang mencakup arti latihan, pendidikan kesopanan, dan pengembangan kerohanian serta tabiat. Kedisiplinan pada dasarnya merujuk pada ketaatan terhadap peraturan atau tata tertib. Tingkat kedisiplinan seseorang dapat diukur melalui perilaku patuh terhadap peraturan yang telah disepakati dengan pihak lain atau bahkan peraturan yang diinternalisasi sebagai pedoman pribadi. Menerapkan perilaku disiplin, bahkan pada hal-hal kecil, menjadi suatu aspek penting untuk menciptakan kedisiplinan dalam konteks yang lebih luas. Hal ini melibatkan ketidaklanggaran terhadap peraturan, termasuk dalam ranah hukum, seperti upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi, sesuai dengan pandangan yang diutarakan oleh Syauket (2021).

3) Tanggungjawab

Tanggung jawab merupakan kewajiban yang memaksa seseorang untuk bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang menjadi tanggungannya, dengan potensi konsekuensi seperti tuntutan, persalahkankan, dan perkaratan. Dalam konteks kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu kewajiban bagi individu untuk memenuhi apa yang diwajibkan kepadanya. Dalam arti yang lebih luas, tanggung jawab mencakup kesadaran terhadap tindakan yang dilakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja (Syauket, 2021). Beberapa contoh perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai tanggung jawab melibatkan pelaksanaan amanah kerja yang baik, pengembangan potensi diri untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, menunjukkan solidaritas dan empati terhadap peristiwa masyarakat, menjaga nama baik bangsa di tingkat internasional, serta menjalin silaturahmi dan persaudaraan antar manusia dan pemeluk agama untuk menciptakan masyarakat yang damai (Syauket, 2021).

b. Aspek Etos Kerja

1) Kerja keras

Nilai kerja keras merupakan konsep yang mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menyelesaikan tugas hingga mencapai kesuksesan. Kerja keras tidak hanya berarti menyelesaikan tugas dengan tekun, tetapi lebih mengacu pada pengabdian terhadap visi besar yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan lingkungannya (Syauket, 2021). Dalam konteks mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi, beberapa perilaku kerja keras dapat diimplementasikan. Pertama, individu perlu mengenali potensi diri dan mengembangkannya untuk meraih tujuan tanpa tergantung pada praktik suap. Kedua, bekerja dengan tekun tanpa mengenal putus asa menjadi prinsip penting. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dapat meningkatkan hasil kerja secara maksimal. Kepercayaan diri yang kuat bahwa tugas dapat diselesaikan dengan baik juga menjadi faktor penting. Terakhir, menjalani usaha dengan sebaik-baiknya tanpa mengorbankan kepentingan orang lain, kesehatan, dan waktu bersama keluarga merupakan aspek krusial dalam mengimplementasikan nilai kerja keras (Syauket, 2021).

2) Sederhana

Kehidupan yang bersahaja diartikan sebagai seni mengelola kepemilikan barang dan jasa dengan berlandaskan pada nilai guna yang dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan (Syauket, 2021). Dalam konteks ini, hidup sederhana tidak mencerminkan kemewahan atau kepemilikan aset mewah dan mahal. Langkah-langkah untuk membentuk kehidupan yang sederhana termasuklah: pertama, menemukan esensi dari hal-hal yang benar-benar penting; kedua, melepaskan segala hal yang tidak esensial; ketiga, menghindari keterikatan pada persepsi dan keinginan orang lain; keempat, memprioritaskan kualitas daripada kuantitas; kelima, fokus pada kehidupan dengan cara yang sederhana; keenam, mengadopsi pola konsumsi yang moderat (Syauket, 2021). Dengan demikian, pengaturan ini memandu individu untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan sederhana dengan mengedepankan nilai-nilai esensial.

3) Mandiri

Dalam perspektif konformistik, kemandirian diartikan sebagai kesesuaian terhadap prinsip moral yang berlaku dalam kelompok rujukan. Oleh karena itu, individu yang dianggap mandiri adalah mereka yang memiliki keberanian untuk mengambil keputusan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap konsekuensi tindakan yang diambil. Kemandirian, menurut pandangan ini, bukanlah sifat bawaan yang melekat sejak lahir, melainkan hasil dari pengaruh berbagai stimulus dari lingkungan sekitar, selain dari faktor keturunan (Syauket, 2021). Beberapa perilaku anti-korupsi yang mencerminkan nilai kemandirian termasuk kemampuan menyelesaikan tanggung jawab tanpa bergantung pada bantuan orang lain, kemampuan untuk mengendalikan diri guna menyelesaikan tugas tepat waktu, kemampuan mengatur diri sendiri sebelum mengatur orang lain, dan ketahanan dalam menghadapi kendala dan hambatan yang mungkin timbul (Syauket, 2021).

c. Aspek Sikap

1) Adil

Istilah "keadilan" dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "justice," yang berasal dari bahasa Latin *iustitia*. Konsep ini memiliki tiga makna utama, yaitu sebagai kualitas yang adil, tindakan pelaksanaan hukum atau penetapan hak dan sanksi, serta merujuk pada pejabat publik yang berwenang menentukan persyaratan sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan. Kata "adil," yang berasal dari bahasa Arab "adala" yang artinya lurus, menggambarkan pemberian sesuatu sesuai dengan haknya. Dalam konteks keadilan, hal ini berarti tidak berat sebelah, menempatkan hal-hal di tengah-tengah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan menghindari sewenang-wenang. Beberapa contoh perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai keadilan mencakup memberikan hak orang lain sesuai dengan yang seharusnya mereka terima, menghindari tindakan curang seperti mengambil bagian dari hak orang lain, dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab sebelum mendapatkan hak. (Syauket, 2021).

2) Berani

Keberanian dapat didefinisikan sebagai memiliki keteguhan hati dan keyakinan diri yang tinggi dalam menghadapi berbagai risiko dan kesulitan. Manifestasi keberanian dapat bervariasi sesuai dengan konteksnya. Sebagai contoh, dalam kasus seseorang yang terlibat dalam tindakan korupsi, dapat dilihat bahwa keberanian seseorang dapat terkompromi oleh pengaruh eksternal, seperti tekanan dari pihak lain dan kondisi ekonomi yang sulit. Dalam hal ini, individu tersebut mungkin tidak mampu mengembangkan keteguhan moral yang cukup untuk menolak godaan korupsi. Seperti yang dijelaskan oleh Syauket (2021), kegagalan individu tersebut dalam melawan hasutan eksternal dapat dianggap sebagai kegagalan dalam membangun keberanian untuk menentang korupsi. Perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai keberanian meliputi kemampuan untuk mengikuti hati nurani, berbicara sesuai dengan fakta yang diketahui, membenarkan informasi yang diketahui tentang orang lain, dan menolak suap dari atasan untuk terlibat dalam tindakan yang melanggar norma. Dengan demikian, keberanian dalam konteks ini melibatkan kemampuan untuk mempertahankan integritas pribadi dan menentang tekanan eksternal yang bersifat merugikan.

3) Peduli

Peduli merupakan tindakan yang berakar pada keprihatinan terhadap permasalahan orang lain, dan penerapan nilai kepedulian dalam penanaman sikap antikorupsi dapat dilakukan melalui kesadaran terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa (Syauket, 2021). Beberapa perilaku antikorupsi yang mencerminkan nilai kepedulian meliputi kemampuan mengendalikan emosi agar tidak mudah terperosok dalam lingkaran pergaulan yang tidak benar, menjauhi tindakan-tindakan yang dapat mendorong anggota keluarga untuk terlibat dalam korupsi, seperti berbohong, memberikan suap, dan memberikan imbalan atau hadiah berlebihan, serta menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan membangun komunikasi yang baik (Syauket, 2021).

Implementasi sembilan nilai karakter anti-korupsi perlu diselenggarakan melalui kerangka pendidikan yang sesuai, tidak hanya sebatas penyampaian

pengetahuan semata, tetapi juga memfokuskan pada pembentukan keyakinan terhadap kepentingan nilai-nilai tersebut dalam diri siswa. Hal ini bertujuan agar siswa terdorong untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan perilaku sehari-hari, menciptakan budaya yang mendorong penerapan nilai anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun mata pelajaran Pendidikan Anti-Korupsi (PAk) telah diterapkan selama dua tahun di Provinsi Lampung, perlu diakui bahwa PAk belum memiliki dasar teori yang kuat. Oleh karena itu, salah satu teori yang dapat diadopsi untuk pengembangan pendidikan anti-korupsi adalah teori pendidikan karakter Thomas Lickona.

5. Pendidikan Antikorupsi dan Teori Pendidikan Karakter Lickona

Pendidikan Antikorupsi (PAk) telah diintegrasikan ke dalam kurikulum Provinsi Lampung, melibatkan siswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib, PAk berdiri sendiri sebagai entitas pengajaran yang memiliki durasi waktu satu jam pelajaran (1 JP) setiap pekannya. Meskipun pelaksanaan mata pelajaran ini telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun di Provinsi Lampung, disayangkan bahwa PAk masih belum memiliki landasan teoritis yang kuat. Upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk memperkuat basis teori dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran PAk, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam membentuk pemahaman dan sikap anti-korupsi pada generasi muda.

Teori pendidikan karakter Thomas Lickona, yang relevan untuk memfasilitasi pembelajaran pendidikan antikorupsi, mengidentifikasi tiga ranah karakter yang saling terkait dan berinteraksi: pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Lickona (2009) merinci bahwa pengetahuan moral melibatkan pemahaman nilai-nilai etika, sedangkan perasaan moral mencakup respons emosional terhadap nilai-nilai tersebut. Sementara itu, tindakan moral melibatkan implementasi nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari. Pengintegrasian ketiga ranah ini di dalam proses pendidikan dapat menjadi landasan yang kokoh untuk mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku anti-

korupsi dalam individu. Dengan memahami pengetahuan moral, meresponsnya secara emosional melalui perasaan moral, dan menerapkannya dalam tindakan moral, Pendidikan Antikorupsi dapat menjadi lebih holistik dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip teori karakter Lickona.

a. Pengetahuan Moral (*Moral Knowing*)

Pengetahuan Moral dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui, memahami, mempertimbangkan, membedakan, dan menginterpretasikan berbagai jenis norma moral yang harus diikuti dan perilaku yang sebaiknya dihindari. Konsep ini terdiri dari enam komponen utama, yang mencakup pemahaman yang holistik terhadap moralitas dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan etis. Sebagai suatu kapasitas kognitif, Pengetahuan Moral melibatkan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai moral, pertimbangan moral, dan kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku serta perilaku yang sebaiknya dihindari. Dengan demikian, pengembangan Pengetahuan Moral menjadi hal yang esensial dalam membentuk individu yang mampu mengambil keputusan yang etis dan bertanggung jawab dalam konteks masyarakat.

- 1) Kesadaran Moral (*Moral Awareness*) melibatkan kesadaran terhadap nilai-nilai moral di sekitar dan pelaksanaannya.
- 2) Pengetahuan Nilai Moral (*Knowing Moral Values*) mencakup kemampuan untuk memahami nilai-nilai moral dalam berbagai situasi.
- 3) Penalaran Moral (*Moral Reasoning*) adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami signifikansi dari perilaku yang bermoral.
- 4) Keberanian Mengambil Keputusan (*Decision Making*) adalah bentuk tindakan berani dalam mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi dilema moral.
- 5) Pengenalan Diri (*Self Knowledge*) melibatkan kemampuan untuk mengenali perilaku diri dan mengevaluasinya dengan jujur.

b. Perasaan Moral (*Moral Feeling*)

Perasaan moral merupakan kapasitas subjektif yang mendorong individu untuk merasa berkewajiban melakukan tindakan moral serta mengalami rasa bersalah apabila terlibat dalam perbuatan yang dapat dianggap jahat. Fenomena ini mencakup enam komponen yang saling terkait dan memengaruhi perilaku moral seseorang. Seseorang yang memiliki perasaan moral yang kuat cenderung merespons secara positif terhadap norma-norma etika, dengan merasa terdorong untuk mengambil tindakan yang dianggap benar dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Selain itu, perasaan bersalah yang timbul setelah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma moral dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol diri, mendorong individu untuk memperbaiki perilaku mereka guna mencapai keselarasan dengan norma-norma etika yang berlaku. Fenomena ini memiliki dampak signifikan dalam konteks pembentukan karakter moral dan orientasi nilai individu dalam masyarakat.

- 1) Mematuhi panggilan hati nurani merupakan pengalaman moral yang mendorong individu untuk melakukan tindakan sesuai dengan pandangan hati nurani, baik itu dalam aspek kognitif maupun emosional.
- 2) Self esteem adalah kapasitas untuk merasa memiliki nilai diri yang tinggi karena individu tersebut memiliki kebajikan atau nilai-nilai mulia.
- 3) Empati mengacu pada kemampuan untuk merasakan dan memahami kondisi atau penderitaan orang lain.
- 4) Kasih pada kebaikan adalah kemampuan untuk merasakan kebahagiaan saat melakukan perbuatan baik.
- 5) Kemampuan untuk mengendalikan diri, atau self control, adalah keterampilan dalam mengatur emosi agar tidak meluap dengan berlebihan, seperti saat mengalami kemarahan.
- 6) Sikap rendah hati melibatkan ketulusan dalam menerima kebenaran dan kesiapan untuk memperbaiki kesalahan serta membantu mengatasi sikap sombong.

c. Tindakan Moral (*Moral Acting*)

Kemampuan untuk bertindak secara moral, atau yang dikenal sebagai Tindakan Moral, melibatkan kemampuan untuk mendorong individu agar melakukan tindakan moral atau menghalangi mereka dari tindakan yang tidak moral. Terdapat tiga aspek utama dalam konsep tindakan moral ini, yakni:

- 1) Kompetensi (*competence*) mencakup keterampilan individu dalam mengubah perasaan moral menjadi tindakan moral yang efektif.
- 2) Keinginan (*will*) merujuk pada kekuatan tekad untuk melakukan apa yang dianggap sebagai kewajiban moral.
- 3) Kebiasaan (*habit*) melibatkan pelaksanaan suatu perbuatan secara berulang-ulang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter melibatkan tiga elemen kunci, yakni pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan tindakan moral (*moral acting*). Ketiga aspek ini saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Dengan kata lain, pendidikan yang efektif tidak hanya menekankan aspek pengetahuan moral semata, melainkan juga mencakup pengembangan perasaan moral dan penerapan nilai-nilai moral dalam tindakan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar individu memiliki pemahaman moral yang kuat, mengembangkan rasa empati dan moralitas, serta mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari, termasuk dalam konteks tindakan anti-korupsi.

Keterkaitan antara korupsi dan kepemimpinan merupakan aspek yang sangat dekat, mengindikasikan keterhubungan dalam suatu permasalahan yang dapat disamakan. Apabila kita memahami bahwa kepemimpinan memiliki potensi untuk mencegah atau bahkan memicu terjadinya tindakan korupsi, maka relevan untuk menggambarkan kepemimpinan dan korupsi sebagai dua isu yang saling berhubungan dan dapat saling memengaruhi. Oleh karena itu, penelitian-penelitian telah dimulai untuk menyelidiki efektivitas praktik kepemimpinan sebagai langkah dalam upaya pemberantasan korupsi di organisasi publik (Bashir & Hassan, 2020; Brauckmann & Pashiardis, 2011; Orazi et al., 2013).

6. Kepemimpinan

6.1 Pengertian Kepemimpinan

Sejak zaman prasejarah, manusia telah mengembangkan kerjasama dan saling melindungi sebagai suatu kebutuhan yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban. Kerjasama ini menjadi pondasi dalam tata kehidupan sosial masyarakat atau kelompok-kelompok manusia, di mana tujuan utamanya adalah mempertahankan hidup melawan ancaman binatang dan tantangan alam sekitar. Dalam konteks ini, terbentuklah kerjasama antarindividu yang kemudian memunculkan unsur-unsur kepemimpinan. Pemimpin kelompok biasanya dipilih berdasarkan kriteria kekuatan dan keberanian, menciptakan aturan-aturan yang disepakati bersama. Sebagai contoh, pemimpin diharapkan lahir dari keturunan bangsawan, memiliki kesehatan, kekuatan, keberanian, ketekunan, kecerdasan, serta pengaruh yang signifikan. Hingga kini, syarat-syarat yang kompleks tetap menjadi kriteria dalam memilih pemimpin, mengingat peran kunci yang dimainkan oleh pemimpin sebagai ujung tombak kelompok (Saliman, 2005).

Hingga dekade 1940-an, kajian mengenai kepemimpinan bersumber pada teori sifat, yang berfokus pada identifikasi sifat-sifat kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang menjadi pembeda antara individu yang menjadi pemimpin dan yang bukan. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa kepemimpinan bersifat bawaan dan merupakan bakat yang melekat sejak lahir. Pada periode selanjutnya, yakni antara tahun 1940-an hingga 1960-an, paradigma kajian berubah menuju teori kepemimpinan tingkah laku. Teori ini mengajukan gagasan bahwa perbedaan perilaku tertentu dapat membedakan pemimpin dan non-pemimpin. Dengan dasar ini, terbuka kemungkinan bahwa kepemimpinan dapat diajarkan, memberikan landasan untuk perancangan program khusus dengan tujuan melatih individu agar mampu memegang peran kepemimpinan secara efektif.

Dalam rentang waktu antara tahun 1960-an hingga 1970-an, terjadi perkembangan signifikan dalam kajian kepemimpinan yang mengadopsi pendekatan teori kemungkinan atau situasional. Kontras dengan penekanan pada sifat atau tingkah laku seorang pemimpin, teori ini menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan dipengaruhi oleh konteks atau situasi tertentu. Perkembangan ini

menjadi tonggak penting dalam pemahaman dinamika kepemimpinan. Seiring berjalannya waktu, antara tahun 1970-an hingga 2000-an, teori kepemimpinan terus berkembang. Pergeseran fokus terlihat, tidak lagi hanya pada sifat, tingkah laku, atau situasi spesifik, tetapi lebih menekankan pada kemampuan intrinsik seorang pemimpin yang membedakannya dari yang lain. Transformasi ini mencerminkan evolusi berkelanjutan dalam wawasan terhadap esensi dan peran pemimpin dalam berbagai konteks organisasional.

Kepemimpinan adalah translasi dari istilah bahasa Inggris "*leadership*," yang merujuk pada kata "*leader*." Istilah "*leader*" pertama kali muncul pada abad ke-14, sementara kata "*leadership*" muncul lebih belakangan, sekitar abad ke-18. Konsep kepemimpinan berasal dari peran seorang pemimpin yang merupakan bagian integral dari identitas suatu organisasi. Keberadaan pemimpin dianggap krusial, karena tanpanya, suatu organisasi tidak dapat dinyatakan eksis. Pentingnya seorang pemimpin sangat ditekankan dalam pemahaman terbaik suatu organisasi, yang diukur melalui nilai-nilai moral, budaya, serta keteladanan sesuai dengan norma, peraturan, dan perilaku kepemimpinan. Beberapa faktor yang memengaruhi kepemimpinan meliputi aturan, kesepakatan, kemampuan, gaya kepemimpinan, pendekatan, dan perilaku kepemimpinan (Cornelissen et al., 2021; Crevani et al., 2010; Kanter, 2003).

Seorang pemimpin memiliki peran sentral dalam dinamika perkembangan organisasi karena mampu menciptakan pengaruh yang luar biasa terhadap anggota tim. Pemimpin diidentifikasi sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan guna memengaruhi perilaku rekan kerjanya. Kepemimpinan, dalam konteks ini, merupakan suatu usaha untuk mengaktualisasikan kemampuan memengaruhi dengan tujuan menggerakkan, membimbing, dan memberikan motivasi kerja kepada orang lain. Hal ini tercermin dalam kemampuan pemimpin untuk membangkitkan semangat, memberikan bimbingan, menunjukkan teladan yang positif, serta memberikan fasilitas yang diperlukan. Konsep ini diperkuat oleh Li et al. (2019), yang mengungkapkan bahwa seorang pemimpin berperan sebagai individu yang mampu mempengaruhi, menggerakkan, menumbuhkan rasa partisipasi dan

tanggung jawab, memberikan fasilitas, menunjukkan teladan yang baik, dan membimbing dengan penuh semangat terhadap rekan-rekannya.

6.2 Gaya Kepemimpinan

Di masa lalu, telah diajukan beberapa gaya kepemimpinan yang berbeda. Berikut adalah uraiannya:

- a. Pendekatan kepemimpinan transformasional, yaitu suatu pendekatan visioner yang mendorong perubahan dan kemajuan melalui tantangan, motivasi, dan inspirasi pola berpikir pengikut (Schuh et al., 2013; Stone et al., 2004).
- b. Gaya kepemimpinan pelayan, yang melibatkan pemimpin yang melayani dan lebih memperhatikan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri, membantu pengikut untuk berkembang, mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan maju sebanyak mungkin (Manala, 2014; Stone et al., 2004).
- c. Kepemimpinan karismatik, yang memberikan pengaruh besar pada pengikut melalui kualitas kepemimpinan luar biasa yang memaksa pengikut untuk tunduk pada otoritas tersebut (Nikoloski, 2015; Walker, 2009).
- d. Pendekatan kepemimpinan paternalistik, yang menyerupai peran seorang ayah dalam merawat pengikut dengan perhatian terhadap kesejahteraan mereka (Chen et al., 2014).
- e. Gaya kepemimpinan demokratis, di mana para pengikut diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui konsensus dan partisipasi (Chen et al., 2014; Solaja & Ogunola, 2016).
- f. Pendekatan kepemimpinan transaksional, yang berfokus pada penggunaan insentif dan hukuman untuk memastikan kepatuhan (Batista-Taran et al., 2013).
- g. Gaya kepemimpinan otoriter, yang mempertahankan pengawasan ketat dan tegas terhadap bawahan dengan menegakkan aturan dan kebijakan yang ketat (Schuh et al., 2013).
- h. Kepemimpinan Laissez-Faire, yang ditandai oleh delegasi tugas, hak, dan kekuasaan sepenuhnya kepada pengikut tanpa memberikan arahan atau panduan (Mohammed et al., 2014; Solaja & Ogunola, 2016).

Kepala sekolah, sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur organisasi sekolah, memikul tanggung jawab atas keseluruhan kinerja institusi pendidikan. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, kepala sekolah harus menjalankan peran ganda sebagai manajer dan pemimpin. Sebagai manajer, kemampuan manajerial menjadi kunci, sementara sebagai pemimpin, kepala sekolah perlu mengadopsi gaya kepemimpinan yang efektif. Salah satu gaya kepemimpinan yang diperlukan adalah kepemimpinan keteladanan, di mana kepala sekolah menjadi contoh yang diikuti oleh anggota staf dan siswa. Kombinasi keterampilan manajerial dan kepemimpinan keteladanan akan membantu kepala sekolah mengelola dan memimpin sekolah secara holistik, memastikan pencapaian tujuan pendidikan yang optimal.

7. Kepemimpinan Keteladanan

7.1 Pengertian Kepemimpinan Keteladanan

Kerangka kerja kepemimpinan keteladanan berakar dari sebuah proyek penelitian mendalam yang dimulai pada tahun 1983 oleh James M. Kouzes dan Barry Z. Posner, Ph.D. Tujuan proyek ini adalah untuk mengidentifikasi kompetensi kepemimpinan yang krusial dalam mencapai pencapaian luar biasa dalam konteks organisasi. Para peneliti mengarahkan fokusnya pada upaya untuk memahami tindakan dan perilaku yang diadopsi oleh individu ketika mereka mencapai tingkat "pribadi terbaik" mereka dalam memimpin orang lain. Penting untuk dicatat bahwa Kouzes dan Posner memulai penelitian mereka dengan keyakinan bahwa wawancara dan survei terhadap pemimpin tingkat atas di perusahaan yang sangat sukses mungkin tidak diperlukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Sebaliknya, mereka mengasumsikan bahwa melibatkan pengalaman orang biasa dalam mendeskripsikan pengalaman luar biasa akan mengungkapkan pola kesuksesan yang dapat diterapkan secara luas (Kouzes & Posner, 2017).

Ternyata, spekulasi mereka terbukti benar. Aspek konseptual dalam kerangka kerja kepemimpinan berlandaskan keteladanan muncul dari penelitian dan analisis ribuan studi kasus mengenai pengalaman kepemimpinan terbaik

secara pribadi. Studi ini merangkum pengalaman yang diingat individu ketika diminta merenungkan momen-momen puncak kepemimpinan. Setelah melalui serangkaian penelitian pendahuluan, Kouzes dan Posner mengembangkan survei mengenai pengalaman kepemimpinan terbaik pribadi. Kuesioner Personal-Best Leadership Experience terdiri dari dua belas halaman dan mencakup tiga puluh delapan pernyataan terbuka. Setiap partisipan yang diwawancarai memiliki setidaknya satu cerita kepemimpinan yang dapat diceritakan (Kouzes & Posner, 2017).

Dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun, dengan mengumpulkan data dari lebih dari 5.000 kasus individu dan menyurvei lebih dari 3 juta responden dari 70 negara, peneliti telah menyimpulkan bahwa pemimpin di berbagai tingkatan mengikuti pola perilaku yang serupa selama kepemimpinan mereka. Temuan-temuan ini diuraikan dalam buku mereka yang berjudul "*The Leadership Challenge*". Penelitian menunjukkan bahwa, tanpa memandang faktor seperti usia, jenis kelamin, atau budaya, pemimpin mencapai kondisi terbaiknya ketika mereka menunjukkan perilaku tertentu. Tantangan kepemimpinan yang dijelaskan oleh Kouzes dan Posner membahas perilaku ini secara rinci melalui model yang dikenal sebagai Lima Praktik Kepemimpinan Teladan. Model kepemimpinan ini telah diakui secara luas oleh para peneliti dan diterapkan dalam konteks bisnis (Kouzes & Posner, 2017).

Pemimpin teladan dapat didefinisikan sebagai sosok yang membedakan dirinya dari rekan-rekannya melalui penunjukan minimal lima karakteristik kunci. Pertama, kemampuan membangun hubungan yang sukses dengan para pengikutnya, kedua, jejak rekam yang menunjukkan kepemimpinan yang berhasil dalam mengelola organisasi. Ketiga, pengalaman profesional selama minimal lima tahun menjadi parameter penting. Keempat, kemampuan untuk menghasilkan tulisan ilmiah seperti artikel, makalah, atau materi presentasi yang telah diterbitkan atau dipresentasikan dalam konferensi atau pertemuan asosiasi. Kelima, mendapatkan pengakuan dari rekan-rekan sejawat, dan keenam, keanggotaan dalam asosiasi profesi di bidangnya (Herrera, 2017) menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi seorang pemimpin teladan.

Kouzes dan Posner (2017) menggambarkan kepemimpinan keteladanan sebagai suatu bentuk kepemimpinan yang mencakup kemampuan untuk memberikan contoh (*model the way*) dan menginspirasi anggota tim terkait visi bersama (*inspire a shared vision*). Pemimpin yang efektif dalam konteks ini juga ditandai oleh kemampuannya untuk berani mencari peluang yang menantang dan inovatif (*challenge the process*), serta mampu membangun kepercayaan anggota tim sehingga mereka dapat bertindak secara efektif (*enable others to act*). Selain itu, kepemimpinan ini juga mencakup sikap yang tulus dalam mengakui dan menghargai prestasi serta kontribusi anggota tim terhadap keberhasilan organisasi (*encourage the heart*). Pendekatan ini mencerminkan kepentingan pengembangan kepemimpinan yang holistik dan berorientasi pada hubungan interpersonal, dengan tujuan memperkuat hubungan antara pemimpin dan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama.

7.2 Dimensi Kepemimpinan Keteladanan

Menurut Kouzes dan Posner (2017), kepemimpinan keteladanan dibentuk oleh lima dimensi kunci. Pertama, melalui dimensi "*model the way*" yang mengimplikasikan kemampuan pemimpin untuk menjadi contoh dalam menunjukkan cara, arah, dan jalan yang benar. Kedua, dalam dimensi "*inspire a shared vision*," pemimpin diharapkan mampu menginspirasi visi bersama untuk menciptakan arah yang jelas dan bersama-sama dikejar. Ketiga, konsep "*challenge the process*" menggambarkan kemampuan pemimpin untuk berani menantang status quo dan mencari solusi kreatif untuk meningkatkan efektivitas. Keempat, dalam dimensi "*enable others to act*," pemimpin diharapkan mampu memberdayakan orang lain, memungkinkan mereka untuk bertindak dan berkontribusi secara maksimal. Terakhir, melalui dimensi "*encourage the heart*," pemimpin diharapkan dapat mendorong hati anggota tim melalui pemberian apresiasi dan dukungan, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi. Pendekatan ini menciptakan fondasi kuat untuk kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan.

a. *Model the Way* (Mencontohkan cara/ arah/ jalan)

Dalam mencapai hak dan rasa hormat untuk memimpin melalui keterlibatan dan tindakan individu secara langsung, seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi pengikutnya agar dapat memperoleh komitmen dan mencapai standar tertinggi. Untuk efektif menjadi contoh, pemimpin perlu meyakini nilai-nilai tertentu dan membela keyakinannya dengan tegas. Pemimpin yang memiliki keyakinan yang kuat akan dapat mempertahankan nilai-nilainya melalui tindakan nyata, sehingga perbuatan tersebut memiliki dampak yang lebih besar daripada kata-kata semata. Sebagai bukti, Kouzes & Posner (2017) menyatakan bahwa pidato yang fasih tentang nilai-nilai pribadi pemimpin hampir tidak cukup, dan tindakan konkret yang mencerminkan ke-serius-an pemimpin terhadap keyakinannya jauh lebih signifikan.

Pemimpin yang menjadi teladan adalah sosok yang memberikan contoh konkret melalui tindakan sehari-hari, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai bersama. Selain itu, pemimpin teladan juga perlu berusaha membangun konsensus seputar nilai-nilai tersebut, tanpa mencoba memaksa keyakinannya kepada orang lain. Upaya membangun kesepahaman bersama mengenai nilai-nilai bersama menjadi kunci, karena tanpa adanya kesepahaman ini, komitmen yang kuat sulit terwujud. Sejalan dengan pandangan Kouzes & Posner (2017), mereka menyatakan bahwa seorang pemimpin hanya dapat mencapai kepatuhan, bukan komitmen, kecuali nilai-nilai tersebut dibagi bersama oleh semua individu yang bekerja bersamanya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kouzes dan Posner menunjukkan bahwa tindakan yang diambil oleh pemimpin teladan untuk memberi contoh seringkali bersifat sederhana. Meskipun para pemimpin memiliki rencana operasional dan strategis, mereka secara konsisten menonjolkan tindakan sehari-hari yang mencerminkan prinsip-prinsip yang mereka ajarkan. Pemimpin teladan memberi contoh dengan melibatkan diri secara langsung dengan para pengikut, bekerja bersama-sama, merinci kisah-kisah yang memberikan kehidupan pada nilai-nilai, dan menyampaikan pernyataan yang membantu pengikut untuk merenungkan nilai dan prioritas mereka (Kouzes & Posner, 2017).

b. *Inspire a Shared Vision* (Menginspirasi visi bersama)

Menginspirasi Visi Bersama, seperti yang dijelaskan oleh Kouzes & Posner (2017), merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk memotivasi anggotanya dengan mengkomunikasikan impian, nilai, dan harapan organisasi, serta meyakinkan mereka untuk berpartisipasi dalam mewujudkannya. Untuk mencapai keterlibatan yang efektif, seorang pemimpin perlu memahami dan menjalin hubungan yang memberi energi kepada para pengikutnya. Kepercayaan yang dibangun didasarkan pada keyakinan bahwa pemimpin memahami kebutuhan dan peduli terhadap kepentingan anggota tim. Pengetahuan mendalam tentang impian, harapan, aspirasi, visi, dan nilai anggota tim menjadi kunci untuk memperoleh dukungan yang solid (Kouzes & Posner, 2017).

Pemimpin yang menunjukkan perilaku dalam praktik kepemimpinan ini menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan sesuatu yang baru. Mereka memiliki visi yang jelas dan berkomitmen untuk mengubah visi tersebut menjadi kenyataan. Selain itu, para pemimpin ini memahami dengan baik impian, nilai, harapan, dan aspirasi dari para pengikut mereka. Mereka mampu berkomunikasi secara efektif dengan pengikut mereka, menggunakan bahasa yang dapat dipahami dan relevan, sehingga memungkinkan mereka untuk memotivasi dan mengajak pengikut mereka untuk bekerja bersama-sama mencapai visi yang sama. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap dinamika kepemimpinan dan kebutuhan untuk membangun koneksi yang kuat antara pemimpin dan pengikut (Kouzes & Posner, 2003).

c. *Challenge the Process* (Menantang proses)

Menantang Proses (*Challenge the Process*) merupakan ciri kepemimpinan yang mencerminkan keberanian seorang pemimpin dalam mengejar peluang-peluang yang inovatif demi kesuksesan organisasi (Kouzes & Posner, 2017). Dalam praktiknya, para pemimpin yang menonjol dalam aspek ini bersedia mengeksplorasi wilayah-wilayah yang belum terjamah, secara aktif mencari peluang untuk berinovasi, dan meningkatkan kinerja organisasi. Dalam pandangan Kouzes & Posner (2003), inovasi tidak hanya bersumber dari memberikan arahan,

tetapi juga melibatkan aspek mendengarkan. Para pemimpin yang efektif mampu mengidentifikasi serta mendukung gagasan-gagasan baru, selain mengadopsi produk dan sistem baru. Selain itu, peran utama seorang pemimpin dalam konteks ini adalah mengenali kapasitas pengikutnya dalam menghadapi situasi-situasi yang menantang, sambil tetap berkomitmen penuh terhadap perubahan (Kouzes & Posner, 2003).

Pemimpin yang menjadi teladan dapat diidentifikasi sebagai pionir yang bersedia mengeksplorasi wilayah yang belum dikenal. Mereka mengambil inisiatif untuk menemukan peluang dengan pendekatan inovatif, menyadari bahwa penciptaan produk, layanan, atau proses baru tidak mungkin hanya berasal dari diri mereka sendiri. Inovasi dalam produk dan layanan sering kali diprakarsai oleh kontribusi dari pelanggan, klien, vendor, serta individu di laboratorium dan di garis depan. Di sisi lain, inovasi dalam proses cenderung timbul dari orang-orang yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Pemimpin teladan memberikan kontribusi utama dengan mengakui ide-ide yang memiliki potensi, memberikan dukungan terhadap ide-ide tersebut, dan memiliki keberanian untuk menantang status quo guna mencapai penerimaan produk, proses, layanan, dan sistem baru. Mereka menyadari bahwa inovasi dan perubahan memerlukan eksperimen dan keterlibatan dalam mengambil risiko, dengan fokus pada pencapaian kemenangan kecil dan pembelajaran dari pengalaman yang telah dilalui (Kouzes & Posner, 2017).

d. *Enable Others to Act* (Memungkinkan orang lain untuk bertindak)

Prinsip "*Enable Others to Act*" menggambarkan pemimpin yang mendorong kerja sama dan membangun kepercayaan di antara anggota tim, menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa memiliki kekuatan, keterampilan, dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama (Kouzes & Posner, 2017). Para pemimpin yang menerapkan praktik ini tidak menahan kekuasaan untuk diri mereka sendiri; sebaliknya, mereka berusaha untuk memberdayakan orang lain. Melalui kolaborasi dan pemberian kepercayaan kepada para pengikutnya, pemimpin ini berhasil menciptakan kondisi di mana anggota tim

merasa dihargai dan memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hasilnya, semangat kerja meningkat, dan anggota tim terdorong untuk melebihi harapan mereka sendiri dalam mencapai hasil yang baik (Kouzes & Posner, 2003).

Pemimpin yang dianggap sebagai teladan mampu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil tindakan. Mereka mendorong kerjasama dengan membangun kepercayaan dan memfasilitasi hubungan. Dengan mempercayai bawahan dan memberikan kewenangan, otoritas, dan informasi yang lebih besar, pemimpin dapat meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan mengalokasikan energi mereka untuk mencapai hasil yang luar biasa. Dalam analisis yang dilakukan oleh Kouzes dan Posner, para pemimpin dengan bangga menyoroti pentingnya kerja tim, kepercayaan, dan pemberdayaan sebagai elemen utama dalam upaya mereka. Kemampuan seorang pemimpin untuk memberdayakan orang lain menjadi suatu aspek yang sangat krusial, karena pengikut cenderung mencapai kinerja terbaik dan bertahan dalam jangka panjang ketika pemimpin mereka membangun, bukan melemahkan, ketergantungan, kelemahan, atau perasaan terasing (Kouzes & Posner, 2017).

e. *Encourage the Heart* (Mendorong hati)

Mendorong Hati (*Encourage the Heart*) merujuk pada perilaku kepemimpinan di mana seorang pemimpin, dengan tulus, mengakui serta menghargai prestasi dan kontribusi anggota tim untuk mencapai kesuksesan organisasi (Kouzes & Posner, 2017). Praktik ini tercermin dalam tindakan pemimpin yang senantiasa memberikan pengakuan terhadap kontribusi yang signifikan dari individu lain. Upacara perayaan dan ritual diadakan sebagai sarana untuk memberikan apresiasi serta membantu anggota tim memahami nilai-nilai yang dianut. Selain itu, pemimpin secara aktif berperan dalam menciptakan identitas kolektif yang kuat, menjadi perekat yang mengarahkan kelompok melalui tantangan-tantangan berat (Kouzes & Posner, 2003).

Tugas seorang pemimpin mencakup pengakuan terhadap kontribusi yang diberikan oleh pengikutnya melalui penunjukan apresiasi terhadap keunggulan

individu. Pemimpin yang menjadi teladan menyadari bahwa kesuksesan tidak hanya dicapai melalui usaha individu, melainkan melalui kolaborasi efektif dalam suatu tim. Mereka juga memahami bahwa merayakan pencapaian dan melibatkan diri dalam ritual-ritual tertentu, dengan ketulusan dan keikhlasan, dapat memperkuat identitas kolektif dan semangat komunitas. Menurut Kouzes dan Posner (2017), tindakan kepedulian yang tulus dapat meningkatkan semangat dan mendorong orang untuk terus berkembang.

Ketika membahas implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAk) di lingkungan sekolah, terlihat bahwa peran seorang kepala sekolah sebagai keteladanan saja belum cukup untuk memastikan keberhasilan penerapannya. Diperlukan pula kepala sekolah yang efektif, yang mampu tidak hanya sebagai pemimpin tetapi juga sebagai seorang manajer. Dalam konteks ini, Nwogu dan Ebunu (2019) menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran sebagai manajer di sekolah, dan keterampilan manajerial yang dimilikinya memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi operasional sekolah. Oleh karena itu, untuk mencapai kesuksesan optimal dalam Pendidikan Antikorupsi, kepala sekolah perlu menggabungkan peran kepemimpinan dan manajerial dengan baik dalam upaya menjaga efektivitas operasional di sekolah yang mereka pimpin.

Permendiknas No. 13 Tahun 2007 menguraikan bahwa kepala sekolah perlu menguasai lima kompetensi utama, yakni kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Dari kelima kompetensi tersebut, keterampilan manajerial dianggap sebagai elemen paling krusial dalam menentukan kesuksesan kepala sekolah dalam menjaga mutu pendidikan di lembaga mereka (Yulia Rachmawati & Santosa, 2020). Perspektif ini sejalan dengan pandangan Nwogu dan Ebunu (2019), yang menekankan peran penting keterampilan manajerial kepala sekolah dalam memastikan efisiensi operasional di sekolah yang mereka pimpin. Oleh karena itu, dalam konteks upaya pemberantasan korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi (PAk), diperlukan pula penguasaan keterampilan manajerial dari seorang kepala sekolah.

8. Keterampilan Manajerial

8.1 Pengertian Keterampilan Manajerial

Keterampilan manajerial telah menjadi fokus penelitian yang mendalam sepanjang sejarahnya (Dierdorff et al., 2009). Dua model tradisional yang sering diacu dalam penelitian mengenai peran atau keterampilan manajerial adalah model keterampilan manajerial Katz (1955) dan model peran manajerial Mintzberg (1971). Belakangan ini, perhatian dalam literatur manajemen strategis telah tertuju pada penelitian mengenai model yang lebih baru, yaitu 'kemampuan manajerial dinamis' oleh Adner dan Helfat (2003).

Keterampilan manajerial dapat diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan analisis, berpikir logis, serta memiliki kefasihan dalam membentuk konsep dan konseptualisasi hubungan yang kompleks. Selain itu, keterampilan tersebut mencakup kemahiran teknis dalam jenis pekerjaan atau aktivitas tertentu, didukung oleh kemampuan untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain (Katz, 2009). Definisi lain menyebutkan bahwa keterampilan manajerial mencakup pengetahuan teknis khusus dalam pekerjaan tertentu yang diperlukan oleh seorang manajer untuk melaksanakan tugas dan perannya dengan efektif (Javadin et al., 2010). Para ahli juga menambahkan bahwa keterampilan manajerial melibatkan seperangkat perilaku yang mengarah pada kinerja yang efektif (Javadin et al., 2010). Dengan demikian, keterampilan manajerial tidak hanya mencakup aspek analitis dan teknis, tetapi juga kemampuan interpersonal yang penting dalam lingkungan manajemen.

Keterampilan manajerial dalam konteks organisasi mencerminkan kecerdasan yang memungkinkan manajer untuk melaksanakan tugas administratif dengan cara yang sehat dan inovatif (Abdeldayem et al., 2019). Menurut Abdeldayem et al. (2019), manajer yang terampil memiliki kemampuan intelektual dan atribut perilaku yang memungkinkan mereka memengaruhi dan memimpin orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Keterampilan manajerial dihasilkan dan dibentuk melalui penerapan teori, teknologi, dan pedoman perilaku, yang, jika diterapkan dengan benar, dapat meningkatkan kemampuan manajerial manajer dan karyawan (Al Aamri, 2003).

Al Samel (2011) mendefinisikan keterampilan manajerial sebagai seperangkat kualitas dan karakteristik, termasuk pengambilan keputusan, analisis, dan perencanaan, yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan kualitas tinggi. Dalam ranah perusahaan dan bisnis, keterampilan manajerial menjadi kunci dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan bisnis dengan fokus meningkatkan efisiensi perusahaan (Demerjian et al., 2012).

Keterampilan manajerial dalam konteks organisasi sekolah merujuk pada kemampuan pemimpin sekolah untuk berhasil merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasikan, mengendalikan, membuat keputusan, dan menginisiasi tindakan guna mendukung manajemen sekolah yang efektif (Ndidi & Alike, 2018). Keterampilan ini mencakup kompetensi dan kemampuan kepala sekolah dalam mengambil keputusan, memulai tindakan pengendalian, serta memberikan stimulus kepada guru untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Chinenye & Ofojebe, 2020). Lebih lanjut, keterampilan manajerial yang dimiliki oleh kepala sekolah memungkinkan mereka untuk merencanakan, mendelegasikan tugas, merangsang, dan mengendalikan kegiatan guru (Chinenye & Ofojebe, 2020).

Berdasarkan penelitian para ahli manajemen, keterampilan manajerial dapat diuraikan menjadi beberapa komponen. Muraina (2014) menyoroti keterampilan komunikasi, keterampilan pengawasan, dan keterampilan organisasi sebagai aspek utama dari keterampilan manajerial. Sementara itu, Memisoglu (2009) mengidentifikasi keterampilan konseptual, keterampilan teknis, dan keterampilan interpersonal sebagai elemen kunci yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Salah satu model yang sering diacu oleh peneliti adalah model keterampilan manajerial Katz (2009), yang mengemukakan bahwa keterampilan tersebut terbagi menjadi keterampilan teknis, keterampilan manusiawi/interpersonal, dan keterampilan konseptual (Katz, 2009). Sebagai dasar bagi pengembangan keahlian manajerial, pemahaman mendalam terhadap komponen-komponen ini menjadi esensial dalam membentuk pemimpin yang efektif.

8.2 Dimensi Keterampilan Manajerial

Administrasi yang efektif menitikberatkan pada tiga keterampilan dasar yang perlu dikuasai oleh seorang manajer untuk menjadi pemimpin yang efektif, sebagaimana disarankan oleh Katz (2009). Katz (2009) juga menekankan bahwa ketiga keterampilan dasar ini, yaitu keterampilan teknis, keterampilan manusiawi atau interpersonal, dan keterampilan konseptual, harus dimiliki secara bersamaan. Meskipun saling terkait, keterampilan-keterampilan tersebut dapat dikembangkan secara mandiri, sesuai dengan penelitian El-Sabaa (2001). Dengan demikian, pengembangan *technical Skills*, *human Skills*, dan *conceptual Skills* merupakan elemen krusial dalam membentuk kompetensi seorang manajer untuk menjalankan tugas administratif dengan efektif (Katz, 2009).

a. *Technical Skills* (keterampilan teknis)

Keterampilan teknis dalam konteks kepemimpinan merujuk pada kemahiran seorang pemimpin dalam suatu jenis pekerjaan atau aktivitas tertentu. Hal ini mencakup kompetensi di bidang khusus, kemampuan analitis, dan keahlian dalam menggunakan alat dan teknik yang sesuai dengan lingkup pekerjaan tersebut (Katz, 2009). Katz menegaskan bahwa keterampilan teknis melibatkan kecerdasan dalam menerapkan metode, prosedur, proses, dan teknik yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan khusus. Ini juga mencakup keahlian dalam mengoperasikan peralatan dan perangkat yang relevan dengan kegiatan tersebut (Katz, 2009). Sejalan dengan itu, Abdeldayem et al. (2019) menambahkan bahwa keterampilan teknis berdasarkan pada pengetahuan khusus dan kemampuan untuk menganalisis aspek-aspek terkait dengan aktivitas kerja. Selain itu, keterampilan teknis mencakup kemampuan menggunakan sarana, alat, dan prosedur yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan (Abdeldayem et al., 2019).

Dalam konteks pendidikan, kemampuan teknis kepala sekolah menjadi krusial dalam mengelola berbagai aspek, seperti pemahaman, responsibilitas, dan keahlian dalam menggunakan metode di luar ranah pengajaran langsung. Hal ini mencakup pemahaman terhadap pengetahuan keuangan, pelaporan, penjadwalan,

dan pemeliharaan (Sutisna, 1983). Keterampilan teknis kepala sekolah memiliki dampak langsung terhadap pemantauan pengajaran oleh guru di sekolah. Dengan demikian, guru diinsentifkan untuk eksplorasi metode dan teknik pengajaran yang lebih efektif di dalam kelas. Penting bagi kepala sekolah untuk mengembangkan dan menerapkan teknik-teknik yang dapat diadopsi oleh guru dengan presisi, sehingga mencapai tujuan sekolah sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan (Mukarromah et al., 2019).

b. *Human Skills* (keterampilan manusiawi/ interpersonal)

Keterampilan manusiawi, atau yang juga dikenal sebagai keterampilan interpersonal, merupakan aspek kritis dalam kepemimpinan yang memungkinkan seorang pemimpin bekerja secara efektif dengan orang lain. Konsep ini, sebagaimana diuraikan oleh Katz (2009), menggambarkan kemampuan seorang manajer untuk mengoptimalkan potensi manusia dalam konteks organisasi dan memberikan motivasi kepada pegawai guna mencapai kinerja yang lebih baik. Katz juga mengartikulasikan bahwa keterampilan manusiawi mencakup keterampilan dalam menjalin hubungan antarmanusia, melibatkan kemampuan untuk membina hubungan positif dengan sesama. Dalam kerangka ini, keterampilan manusiawi menuntut pemahaman mendalam terhadap perilaku manusia dan dinamika hubungan interpersonal, termasuk kemampuan untuk memahami perasaan, sikap, motivasi, serta komunikasi yang jelas dan efektif. Oleh karena itu, keterampilan ini mencakup kemampuan berkomunikasi dengan baik serta membentuk hubungan yang kooperatif dan efektif, mencerminkan pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek psikologis dan sosial dalam interaksi manusia (Katz, 2009).

Keterampilan manusiawi memegang peran sentral dalam konteks organisasi sekolah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mukarromah et al. (2019). Keterampilan ini merujuk pada kemampuan bekerja secara efektif dengan orang lain, termasuk pemahaman terhadap orang lain serta kemampuan untuk memberikan motivasi, baik pada tingkat individu maupun kelompok (Stoner & AF, 1992). Pentingnya *human Skills* juga tercermin dalam kemampuan seorang

kepala sekolah untuk menempatkan diri dalam kelompok kerja dan menguasai keterampilan berkomunikasi guna menciptakan kepuasan bagi semua pihak terlibat, sejalan dengan pandangan Danim (2016). Sutisna (1983) juga mengakui bahwa kepala sekolah yang mumpuni dalam *human Skills* mampu menjalankan komunikasi dua arah efektif di lingkungan sekolah maupun masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan pada gilirannya, meningkatkan kualitas komponen sekolah secara keseluruhan.

c. *Conceptual Skills* (keterampilan konseptual)

Keterampilan konseptual, sebagaimana yang dikemukakan oleh Katz (2009), merujuk pada kemampuan seorang pemimpin dalam melakukan analisis umum, berpikir logis, serta kefasihan dalam membentuk konsep dan mengkonseptualisasikan hubungan yang kompleks. Selain itu, keterampilan ini mencakup aspek kreativitas dalam menghasilkan ide dan pemecahan masalah, kemampuan untuk menganalisis peristiwa dan merasakan tren, sehingga memungkinkan pemimpin untuk mengantisipasi perubahan dan mengidentifikasi peluang serta potensi masalah. Dengan demikian, keterampilan konseptual tidak hanya mencakup analisis umum, tetapi juga pemikiran logis, kreativitas, dan kemampuan membaca perubahan serta peluang di lingkungan sekitarnya.

Keterampilan konseptual merupakan kemampuan untuk mengatur pemikiran dan memahami berbagai teori di bidang tertentu, yang memungkinkan pengambilan tindakan serta pengamatan terhadap tren berdasarkan landasan teoritis yang relevan (Danim, 2016). Dalam perspektif lain, keterampilan konseptual diartikan sebagai kemampuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua aspek dan aktivitas dalam konteks organisasi (Stoner & AF, 1992). Hal ini mencakup kemampuan pemimpin untuk memandang organisasi secara menyeluruh, memahami hubungan antarelemen organisasi, serta dapat mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi di berbagai bagian yang berkontribusi pada kinerja keseluruhan organisasi (Mukarromah et al., 2019).

9. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara

9.1 Biografi Ki Hajar Dewantara

Ki Hajar Dewantara, yang memiliki nama asli Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia berasal dari keluarga bangsawan kraton Yogyakarta yang terpelajar, dan sejak kecil telah terpapar pada budaya Jawa yang kaya. Ia merupakan cucu dari Sri Paku Alam III dan ayahnya bernama GPH Soerjaningrat. Ayahnya, Raden Mas Soerjaningrat, adalah seorang pejabat kraton. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, namun masa kecil Ki Hajar Dewantara diwarnai dengan pendidikan awal dalam tradisi Jawa.

Sebagai bangsawan Jawa, Soewardi Soerjaningrat mengenyam Pendidikan *Europeesche Lagere School* (ELS), sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Kemudian Pada awal abad ke-20, Ki Hajar Dewantara berangkat ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Ia mendapatkan kesempatan untuk masuk *School tot Opleiding voor Inlandsche Artsen* (STOVIA) atau yang sering disebut Sekolah Dokter Jawa.

Sejak kecil, Ki Hajar Dewantara mendapatkan pendidikan dalam tradisi Jawa. Dia belajar budaya Jawa, bahasa Jawa, dan nilai-nilai kebangsawanan. Pendidikan tradisional ini memberinya dasar yang kuat dalam memahami budaya dan nilai-nilai lokal. Selama masa kecil dan pendidikan awalnya, Ki Hajar Dewantara menyaksikan kemiskinan dan ketidaksetaraan di masyarakat. Hal ini memunculkan kesadaran dan tekadnya untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif, terutama melalui bidang pendidikan (Sunardiyah et al., 2023).

Masa kecil Ki Hajar Dewantara mencerminkan perpaduan antara tradisi Jawa dan pengaruh modern. Pengalaman dan pendidikannya membentuk pemikirannya yang progresif dan memberinya dasar yang kuat untuk memimpin gerakan pendidikan di Indonesia. Sejarah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam memperjuangkan hak pendidikan dan keadilan sosial (Hermawati et al., 2020).

Ki Hajar Dewantara pergi ke Belanda pada awal abad ke-20 untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Di sana, ia terpapar pada pemikiran-pemikiran

progresif dan konsep pendidikan modern. Pengalaman ini memengaruhi pemikirannya tentang bagaimana pendidikan seharusnya diarahkan. Setelah kembali ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara semakin menyadari pentingnya pendidikan dalam mengangkat martabat bangsa Indonesia yang saat itu masih di bawah penjajahan Belanda. Ia menjadi aktif dalam gerakan sosial dan politik serta terlibat dalam upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada (Sunardiyah et al., 2023).

Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara merumuskan konsep trilogi pendidikan sebagai pedoman dasar untuk pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Konsep ini mencakup tiga prinsip: *Ing Ngarso Sung Tulodo* (dari depan memberi contoh), *Ing Madyo Mangun Karso* (di tengah membangun semangat), dan *Tut Wuri Handayani* (di belakang mengarahkan dan memberdayakan). Filosofi ini mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa dan visi modern Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara mencerminkan integrasi antara nilai-nilai budaya lokal dengan konsep pendidikan modern. Filosofi ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem pendidikan nasional di Indonesia dan tetap relevan dalam diskusi tentang pendidikan di Indonesia hingga saat ini (Hermawati et al., 2020).

9.2 Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara

Sebelum Kouzes and Posner menerbitkan buku *"The Five Practices of Exemplary Leadership"* pada tahun 2003, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, telah mengemukakan Trilogi Pendidikan pada dekade 1920-an. Filosofi kepemimpinan tersebut tercermin dalam semboyan *"Ing Ngarso Sung tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani"*. Konsep Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara melibatkan tiga prinsip, yakni memberikan teladan yang baik (*Ing Ngarso Sung tulodho*), membangun diri dan orang lain (*Ing Madyo Mangun Karso*), serta memberikan bimbingan dan dukungan (*Tut Wuri Handayani*). Trilogi ini mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan yang holistik dan berkelanjutan, menggambarkan pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap esensi

kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan dalam konteks pendidikan nasional Indonesia (Sunardiyah et al., 2023).

a. *Ing Ngarso Sung tulodho*

Prinsip filosofi pertama dari Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah "*Ing Ngarso Sung tulodho*". Konsep ini mengandung makna bahwa seorang pemimpin harus menempatkan dirinya di depan atau di muka sebagai contoh yang patut diikuti. Kata "*Ing Ngarso*" menunjukkan posisi di depan, "*Sun*" berasal dari kata "*Ingsun*" yang artinya saya, dan "*Tulodho*" memiliki makna tauladan. Oleh karena itu, esensi dari konsep ini adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memberikan contoh atau teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Prinsip ini menekankan pentingnya pemimpin sebagai figur yang dapat menginspirasi dan membimbing melalui perilaku dan moralitas yang positif, sehingga mampu membentuk lingkungan yang terarah dan bermartabat.

Filosofi kepemimpinan "*Ing Ngarso Sung tulodho*" menekankan pentingnya seorang pemimpin sebagai teladan bagi para pengikutnya. Konsep ini menuntut bahwa seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai yang diinginkan dalam organisasi atau masyarakat. Dalam implementasinya, keteladanan tidak hanya sebatas retorika, melainkan juga diwujudkan melalui tindakan nyata (Hermawati et al., 2020).

Pemimpin yang berbasis pada prinsip "*Ing Ngarso Sung tulodho*" menuntut tingkat integritas yang tinggi, di mana pemimpin harus mengamalkan nilai-nilai yang diajarkannya dan menjaga konsistensi antara perkataan dan tindakan. Sikap positif dan perilaku yang menjadi teladan bagi seorang pemimpin dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada para pengikutnya. Dedikasi, kerja keras, dan semangat yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin akan berdampak positif terhadap semangat dan kinerja timnya. Pemimpin yang mengadopsi filosofi ini perlu terus berupaya untuk mengembangkan diri, menjadi

contoh dalam hal pembelajaran dan pertumbuhan pribadi, serta mendorong pengikutnya untuk melakukan hal yang serupa (Sunardiyah et al., 2023).

Kepemimpinan yang menghargai dan menerima keunikan setiap individu sejalan dengan prinsip "*Ing Ngarso Sung Tulodho*". Seorang pemimpin perlu memahami dan mendukung potensi unik yang dimiliki oleh setiap anggota timnya. Kepemimpinan yang didasarkan pada teladan yang baik juga mampu menciptakan pengaruh positif dalam lingkungan kerja maupun masyarakat secara umum. Orang lain akan cenderung mengikuti jejak seorang pemimpin yang menempatkan kebaikan dan nilai-nilai etika sebagai prioritas utama. Seorang pemimpin yang menjadi teladan juga harus bersedia mendengarkan dan berkomunikasi dengan baik, menciptakan hubungan yang kuat dan saling menghormati antara pemimpin dan anggota tim (Hermawati et al., 2020).

Secara keseluruhan, filosofi "*Ing Ngarso Sung Tulodho*" menekankan esensi tanggung jawab dan peran seorang pemimpin sebagai contoh utama yang memandu dengan menerapkan nilai-nilai yang diyakini. Dengan menjalankan prinsip ini, seorang pemimpin dapat membangun budaya organisasi yang tangguh, berintegritas, dan penuh inspirasi. Konsep ini memberikan dasar kuat bagi kepemimpinan yang tidak hanya efektif, tetapi juga memacu perkembangan nilai-nilai positif dalam organisasi.

b. *Ing Madyo Mangun Karso*

Konsep filosofi Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua, yaitu *Ing Madyo Mangun Karso*, mengandung makna yang dalam. "*Ing Madyo*" yang berarti di tengah-tengah, "*Mangun*" sebagai simbol membangkitkan atau menggugah, dan "*Karso*" diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Dengan demikian, konsep ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin perlu memiliki keseimbangan dan kebijaksanaan untuk berada di tengah-tengah, memicu semangat, serta membentuk niat yang kuat pada para pengikutnya. Pemimpin yang menerapkan konsep *Ing Madyo Mangun Karso* diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi, memotivasi, dan merangsang inovasi bagi anggota timnya,

sehingga dapat terus berkembang dan maju. Penyampaian konsep ini mengacu pada karya Sunardiyah et al. (2023).

Filosofi kepemimpinan "*Ing Madyo Mangun Karso*" mencerminkan suatu prinsip yang menekankan peran sentral pemimpin dalam mengarahkan, mengelola, dan membimbing kelompok atau organisasi menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan berada di tengah-tengah kelompok, pemimpin dapat secara lebih sensitif merasakan dinamika, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh para pengikut. Keberadaan pemimpin di tengah kelompok juga memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam terhadap situasi, memungkinkan mereka untuk mengamati dan menganalisis dengan lebih cermat. Pendekatan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Hermawati et al. (2020), memberikan dasar bagi pemimpin untuk membuat keputusan yang lebih baik karena didasarkan pada pemahaman yang lebih akurat tentang kondisi yang tengah dihadapi.

Pemimpin yang memimpin dari tengah-tengah cenderung membangun hubungan yang lebih kuat dengan anggota tim, mendorong kolaborasi yang lebih baik, dan membentuk kerja tim yang kokoh. Pendekatan ini membutuhkan keterbukaan pemimpin terhadap ide dan masukan dari semua anggota tim, menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa didengar dan dihargai. Kehadiran fisik dan emosional pemimpin di tengah-tengah tim dapat memberikan dampak positif melalui inspirasi, motivasi, dan panduan langsung. Dalam konsep ini, pemimpin memberdayakan anggota tim dengan memberikan tanggung jawab dan otonomi yang sesuai, menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih besar di antara para pengikut. Kepemimpinan yang berpusat di tengah-tengah menekankan sikap bersahaja, dimana pemimpin berfungsi sebagai fasilitator dan pengarah bukan sebagai entitas yang mendominasi. Dengan berada di tengah kelompok, pemimpin dapat lebih peka terhadap kebutuhan individu dan kelompok, memungkinkan perancangan langkah yang sesuai (Sunardiyah et al., 2023).

Secara komprehensif, prinsip kepemimpinan "*Ing Madyo Mangun Karso*" menekankan signifikansi kehadiran secara fisik dan emosional, pengaruh yang

bersumber dari teladan, serta kemampuan untuk memahami dan merespons situasi secara mendalam. Hal ini membentuk figur pemimpin yang mampu merangkul, mengarahkan dengan kebijaksanaan, dan mengilhami para pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini menggambarkan pemimpin yang holistik, memadukan dimensi fisik dan emosional, serta mampu membaca dan merespons dinamika lingkungan dengan cermat.

c. *Tut Wuri Handayani*

Konsep filosofi Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang ketiga adalah "*Tut Wuri Handayani*." *Tut Wuri*, yang berarti mengikuti dari belakang, dan *Handayani*, yang artinya memberikan dorongan moral atau semangat, menggambarkan bahwa seorang pemimpin seharusnya mampu memberikan dukungan moral dan semangat kepada bawahannya secara bersifat mendalam. Dukungan moral ini menjadi kunci penting yang diperlukan oleh pengikutnya guna membangkitkan motivasi dan semangat kerja. Dalam konteks ini, pemimpin diharapkan untuk mendekati perannya dengan memberikan dorongan dari belakang, menciptakan lingkungan yang memungkinkan pengikutnya untuk berkembang, dan memberikan inspirasi yang diperlukan. Filosofi ini menekankan pada peran integral pemimpin dalam memberikan dukungan moral yang tidak hanya bersifat instruktif tetapi juga mendalam untuk menciptakan motivasi yang berkelanjutan (Hermawati et al., 2020).

Filosofi kepemimpinan "*Tut Wuri Handayani*" menyoroti peran integral pemimpin sebagai pendukung, penyokong, dan pemandu bagi anggota tim atau kelompok. Prinsip ini menekankan urgensi pemimpin dalam menyediakan dukungan menyeluruh kepada anggota tim. Lebih jauh, pemimpin diharapkan untuk berfungsi sebagai mentor dan penasihat yang siap membimbing serta memberikan bantuan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh anggota tim (Hermawati et al., 2020).

Pemimpinan yang berlandaskan prinsip "*Tut Wuri Handayani*" memiliki fokus utama pada pendorong kerja sama dan kolaborasi di antara anggota tim. Esensinya adalah menciptakan suatu lingkungan di mana setiap individu merasa

didukung dan dihargai, yang pada gilirannya mendorong perkembangan kerjasama yang produktif. Seorang pemimpin yang mengadopsi filosofi ini juga diharapkan untuk memiliki sikap pemberdayaan terhadap anggota tim, dengan dedikasi untuk membantu mereka menggali potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan mendengarkan dan menerima umpan balik dengan terbuka menjadi aspek krusial dalam prinsip ini. Pemimpin yang efektif harus bersedia untuk mendengar pandangan, masukan, dan aspirasi anggota tim, serta memiliki keterbukaan untuk beradaptasi dan terus memperbaiki diri sesuai dengan kebutuhan tim (Hermawati et al., 2020).

Filosofi "*Tut Wuri Handayani*" menginspirasi pemimpin untuk aktif memfasilitasi pertumbuhan pribadi dan profesional anggota tim. Pemimpin diharapkan tidak hanya memotivasi, tetapi juga mendorong anggota tim untuk terus belajar dan mengembangkan diri mereka. Selain itu, konsep ini menegaskan peran penting pemimpin sebagai pendamping, bukan hanya sebagai penyedia arahan. Pemimpin diharapkan untuk mendampingi anggota tim dalam mengatasi tantangan dan mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, Hermawati et al. (2020) menunjukkan bahwa pemimpin harus memberikan peluang untuk pengembangan karir anggota tim, menciptakan lingkungan di mana pembelajaran dan pertumbuhan menjadi fokus utama.

Secara keseluruhan, esensi filosofi "*Tut Wuri Handayani*" mencerminkan peran utama seorang pemimpin sebagai figur yang memberikan dukungan, bimbingan, dan pelayanan yang peduli terhadap kesejahteraan anggota timnya. Konsep ini menegaskan bahwa pemimpin yang menerapkan prinsip tersebut mampu menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya positif namun juga produktif, di mana hubungan interpersonal dipenuhi dengan saling menghormati dan mendukung. Filosofi ini memberikan fondasi bagi pemimpin untuk menjadi fasilitator pembangunan kolektif, meresapi nilai-nilai saling peduli, dan mengarahkan tim menuju pencapaian tujuan bersama dengan penuh dedikasi.

9.3 Konsep Pendidikan Karakter Ki Hajar Dewantara

Pendidikan karakter telah menjadi perbincangan yang berkelanjutan di kalangan berbagai pihak, terutama dalam konteks pembentukan generasi Indonesia yang diharapkan dapat menggantikan yang sebelumnya. Bahkan sebelum terbentuknya Republik Indonesia, wacana mengenai pendidikan karakter sudah eksis. Salah satu tokoh penting dalam perjuangan pendidikan nasional dan kemerdekaan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara, yang diakui sebagai bapak Pendidikan Nasional. Kontribusi dan dedikasinya terhadap dunia pendidikan sangatlah monumental dan tak terbantahkan. Sebagai pahlawan pendidikan, Ki Hajar Dewantara memberikan peran besar dalam sejarah pendidikan tanah air.

Ki Hajar Dewantara menempatkan pendidikan karakter sebagai dasar dalam konsep pendidikannya, yang termanifestasikan dalam pemahamannya tentang pendidikan. Baginya, pendidikan merupakan suatu daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak. Pendekatan ini menandakan bahwa Ki Hajar Dewantara melihat pendidikan moral, khususnya karakter, sebagai suatu proses dinamis dan berkesinambungan. Lebih lanjut, konsep pendidikan yang dikemukakan olehnya menekankan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan bukan hanya sekadar alih ilmu pengetahuan atau transfer pengetahuan semata, melainkan juga sebagai proses transformasi nilai. Dengan kata lain, pendidikan menjadi landasan pembentukan karakter manusia agar mencapai keberhasilan sebagai manusia seutuhnya (Surjomiharjo, 1986).

Pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan karakter, yang saat ini menjadi fokus Kemendikbud, adalah konsep "Tripusat Pendidikan". Konsep ini mengakui bahwa terdapat tiga pusat pendidikan utama yang berperan dalam membentuk karakter seseorang, yakni (1) keluarga, (2) sekolah, dan (3) masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa ketiga lingkungan tersebut memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter individu. Dengan merinci pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai pusat pengaruh utama, Dewantara menyoroti pentingnya keterlibatan aktif dari ketiga lingkungan tersebut dalam membentuk dan mengembangkan karakter

seseorang. Konsep Tripusat Pendidikan mencerminkan pemahaman holistik Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan karakter, di mana pendidikan tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah, tetapi juga melibatkan peran penting keluarga dan masyarakat dalam proses pembentukan karakter individu.

Ketika berada di lingkungan rumah, individu terlibat dalam interaksi dengan anggota keluarga, dan penanaman nilai-nilai yang baik dalam karakter anak menjadi krusial. Peran orangtua dan anggota keluarga lainnya memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan karakter ini. Selain itu, dari rumah, anak melangkah ke lingkungan sekolah yang merupakan realitas baru dengan dinamika yang berbeda. Di sekolah, anak dihadapkan pada situasi yang memungkinkannya untuk berinteraksi lebih luas, terutama dengan teman sebaya. Peran guru di sekolah menjadi kunci dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan. Setelah berinteraksi di rumah dan sekolah, anak menghadapi lingkungan masyarakat yang lebih terbuka dan luas. Disini, anak dapat mengalami dan menyaksikan realitas kehidupan secara langsung. Harapannya adalah bahwa nilai-nilai kebaikan yang diperolehnya di rumah dan sekolah dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep tiga lingkungan, yaitu formal, informal, dan non formal menurut Ki Hadjar Dewantara, menjadi landasan yang sangat memengaruhi pembentukan karakter anak (Suwahyu, 2018).

Ki Hadjar Dewantara mengemukakan konsep Tripusat Pendidikan yang mengandung beberapa aspek menarik. Pertama, ia menekankan bahwa tujuan pendidikan tidak dapat dicapai melalui satu jalur saja. Kedua, tiga pusat pendidikan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan alam pemuda harus memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Ketiga, Ki Hadjar Dewantara menegaskan bahwa keluarga tetap merupakan pusat pendidikan yang paling penting, memberikan pendidikan budi pekerti, agama, dan laku sosial. Keempat, sekolah dianggap sebagai balai wiyata yang memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kelima, alam pemuda, yang sekarang diperluas menjadi lingkungan atau alam kemasyarakatan, dianggap sebagai tempat di mana anak-anak dapat berlatih membentuk watak dan karakter mereka. Keenam, dasar pemikiran Ki Hadjar Dewantara terfokus pada upaya untuk menghidupkan, menambah, dan

memberikan perasaan kesosialan kepada anak-anak (Suwahyu, 2018). Konsep ini mencerminkan pandangan holistik tentang pendidikan yang melibatkan berbagai elemen untuk mencapai perkembangan dan pembentukan karakter yang seimbang pada peserta didik.

Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan karakter menekankan perlunya proses atau tahapan yang sistematis, disesuaikan dengan fase pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Tahap-tahap pendidikan karakter ini perlu dilaksanakan secara terencana dan mengikuti tingkatan usia peserta didik, mengingat pentingnya pemahaman terhadap kondisi psikis mereka. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah agar materi pendidikan karakter dapat disampaikan dengan pemahaman dan penyerapan yang optimal. Ki Hajar Dewantara mengklasifikasikan empat tingkatan dalam pengajaran pendidikan karakter sebagai landasan bagi pendidik untuk mengakomodasi perbedaan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik, mencakup:

a. Taman Indria dan Taman Anak (5-8 tahun)

Pada tahap ini, pendidikan karakter mengandung muatan pembiasaan dengan cakupan yang bersifat global dan spontan. Artinya, materi yang disampaikan tidak bersifat teoritis terkait dengan konsep kebaikan dan keburukan, melainkan difokuskan pada bagaimana peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut melalui perilaku mereka sendiri. Contoh pengajaran karakter melibatkan anjuran atau perintah konkret, seperti mengajak peserta didik untuk duduk dengan baik, menekankan ketertiban, mendengarkan dengan penuh perhatian, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghindari mengganggu teman. Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut secara langsung melalui tindakan sehari-hari mereka, bukan sekadar memahaminya secara konseptual.

b. Taman Muda (umur 9-12 tahun)

Pada rentang usia 9-12 tahun, Konsep Ki Hajar Dewantara menekankan pada fase hakikat perkembangan anak, di mana mereka mampu memahami perbedaan antara perilaku baik dan buruk. Oleh karena itu, pendidikan

karakter, khususnya dalam hal budi pekerti, dapat disampaikan melalui pendekatan pemahaman terhadap segala tindakan positif yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka.

c. Taman Dewasa (umur 14-16 tahun)

Pada tahap ini, siswa memasuki periode pembelajaran yang lebih mendalam, di mana mereka tidak hanya melanjutkan pencarian pemahaman, tetapi juga mulai melatih diri dalam menghadapi tindakan-tindakan yang sulit dan berat dengan niat yang disengaja. Esensi dari pendidikan pada periode ini terfokus pada semua tindakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh, memerlukan kekuatan kehendak, dan melibatkan upaya serta aplikasi tenaga.

d. Taman Madya dan Taman Guru (umur 17-20)

Taman Madya merupakan lingkungan pendidikan untuk generasi yang telah mencapai kedewasaan, di mana mereka adalah dalam fase ma'rifat yang menandakan tingkat pemahaman yang tinggi. Pada periode ini, anak-anak telah menunjukkan kemampuan untuk melakukan kebaikan serta memiliki kesadaran terhadap makna dan tujuan. Mereka secara aktif menginsyafi dan memahami dengan mendalam aspek-aspek yang relevan dengan perkembangan pribadi dan spiritualitas mereka.

10. Teori Belajar Sosial Albert Bandura

Teori belajar sosial Albert Bandura, yang juga dikenal sebagai teori belajar sosial-kognitif, menyajikan suatu kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pengamatan, pemodelan, dan interaksi dengan lingkungan sosial mereka (Nabavi, 2012). Pemahaman ini menyoroti peran sentral dari proses belajar melalui pengamatan dan interaksi sosial dalam perkembangan perilaku dan kognisi manusia (Schunk & DiBenedetto, 2020). Teori ini menekankan bahwa faktor-faktor kognitif dan sosial saling berinteraksi secara kompleks untuk membentuk perilaku individu, memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika bagaimana pengetahuan dan keterampilan diperoleh (Rumjaun & Narod, 2020). Dengan demikian, konsep-

konsep dalam teori belajar sosial Bandura memberikan landasan untuk memahami proses kompleks ini, memperkaya pandangan kita terhadap pembentukan perilaku dan kognisi manusia.

a. *Observational Learning* (Belajar dengan Pengamatan)

Observational learning, atau belajar dengan pengamatan, dapat dijelaskan sebagai suatu proses pembelajaran di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau perilaku baru melalui pengamatan terhadap tindakan individu lain yang disebut sebagai "model" (Morse et al., 2019). Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang mendukung pemahaman, internalisasi, dan adopsi perilaku yang diamati. Langkah awal dalam observational learning adalah fokus dan perhatian terhadap perilaku model (Rumjaun & Narod, 2020). Fokus yang tepat diperlukan agar informasi tentang perilaku dapat diterima dan diproses dengan efektif oleh individu. Setelah pengamatan perilaku model, individu juga perlu memahami konteks di mana perilaku tersebut terjadi. Ini mencakup pemahaman terhadap situasi, konsekuensi, dan reaksi terhadap perilaku yang diamati. Pemahaman konteks ini membantu individu dalam meresepsi makna dan implikasi dari perilaku yang sedang diamati (Rumjaun & Narod, 2020).

Pada dasarnya, pengamatan perilaku yang teliti dapat diuraikan melalui proses pengkodean menjadi representasi mental yang memungkinkan individu untuk mengingatnya di masa mendatang. Representasi ini melibatkan aspek cara melakukan suatu tindakan dan konteks di mana tindakan tersebut terjadi. Pengkodean tersebut menjadi krusial karena memfasilitasi kemampuan individu untuk menyimpan informasi mengenai perilaku yang diamati dalam ingatan mereka. Pentingnya ingatan yang baik terhadap model perilaku ini sangat signifikan, sebab hal tersebut memungkinkan individu untuk mengakses dan mengambil kembali informasi tersebut saat diperlukan (Rumjaun & Narod, 2020).

Setelah informasi mengenai perilaku direpresentasikan dalam ingatan, langkah selanjutnya adalah usaha individu untuk mereproduksi perilaku tersebut. Proses ini melibatkan kemampuan individu untuk meniru apa yang telah diamati. Pada tahap ini, pentingnya kemampuan individu dalam mereproduksi perilaku

menjadi faktor krusial. Motivasi memainkan peran signifikan dalam menentukan apakah individu akan mencoba atau tidak perilaku yang telah diamati tersebut. Motivasi dapat berasal dari harapan terhadap hasil yang mungkin diperoleh dari perilaku tersebut atau dapat muncul sebagai dorongan intrinsik. Keyakinan individu bahwa perilaku tersebut akan menghasilkan hasil positif atau memenuhi kebutuhan tertentu akan mempengaruhi kecenderungan mereka untuk mencoba perilaku tersebut. Hasil yang diperoleh dari perilaku yang diamati memiliki dampak signifikan terhadap keputusan individu untuk mengadopsi dan mengulangi perilaku tersebut. Jika hasil positif terkait dengan perilaku yang diamati, kemungkinan individu untuk mengadopsi dan mengulangi perilaku tersebut akan meningkat (Rumjaun & Narod, 2020).

Pentingnya *observational learning* sangat terlihat dalam perkembangan kognitif, sosial, dan perilaku individu. Dengan mengamati dan memodelkan perilaku orang lain, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru, serta menginternalisasi norma sosial, nilai-nilai, dan sikap. Proses ini menjadi kunci dalam membentuk perilaku dan pemahaman individu terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks pendidikan dan kepemimpinan, *observational learning* menjadi alat yang efektif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan yang positif.

b. *Modeling* (Pemodelan)

Modeling adalah suatu proses di mana seseorang belajar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain, yang dalam literatur disebut sebagai "model" (Morse et al., 2019). Pada dasarnya, proses pemodelan memungkinkan individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perilaku baru tanpa harus mengalami konsekuensi langsung dari tindakan tersebut. Langkah awal dalam pemodelan adalah memberikan perhatian yang cermat terhadap perilaku model. Individu harus memusatkan perhatian mereka dan secara seksama mengamati perilaku yang sedang dilakukan oleh model. Pentingnya perhatian ini terletak pada kemampuan individu untuk memproses dan menginternalisasi informasi yang terkandung dalam perilaku tersebut (Nickerson, 2022).

Individu perlu memahami konteks di mana perilaku model terjadi, termasuk situasi, konsekuensi, dan reaksi terhadap perilaku tersebut. Pemahaman konteks membantu individu meresapi makna dan implikasi dari perilaku yang diamati. Setelah pemahaman tercapai, individu mengkodekan informasi tersebut menjadi representasi mental yang dapat diingat dan diakses kembali, mencakup detail tentang cara melakukan tindakan dan konteks tempat tindakan tersebut terjadi. Pentingnya menyimpan representasi mental ini dalam ingatan menjadi krusial agar individu dapat mengambil kembali informasi saat dibutuhkan. Dengan representasi perilaku yang tercatat dalam ingatan, individu berusaha mereproduksi perilaku tersebut melalui upaya meniru apa yang telah diamati. Tahap ini menyoroti pentingnya kemampuan individu dalam mereproduksi perilaku yang telah dipahami (Nickerson, 2022).

Motivasi memegang peran sentral dalam menentukan apakah seseorang akan mencoba atau tidak perilaku yang diamati. Sumber motivasi dapat berasal dari harapan terhadap hasil yang akan diperoleh dari perilaku tersebut atau dari dorongan intrinsik. Keyakinan individu terhadap potensi hasil positif atau pemenuhan kebutuhan melalui perilaku tersebut dapat menjadi pendorong utama untuk mencobanya. Dampak hasil yang dihasilkan dari perilaku yang diamati juga dapat memengaruhi apakah perilaku tersebut akan diperkuat atau tidak. Jika hasil yang diperoleh bersifat positif, kemungkinan individu untuk mengadopsi dan mengulangi perilaku tersebut menjadi lebih tinggi (Nickerson, 2022).

Melalui proses pemodelan, seseorang dapat memperoleh berbagai pengetahuan, termasuk keterampilan praktis, norma sosial, nilai-nilai, dan strategi penyelesaian masalah. Pemodelan juga memiliki potensi untuk membentuk pandangan individu terhadap dunia dan memainkan peran signifikan dalam membentuk perilaku mereka dalam berbagai konteks. Dalam konteks kepemimpinan, praktik pemodelan dapat memberikan kontribusi besar terhadap kemampuan seorang pemimpin dalam memengaruhi perilaku dan membentuk budaya organisasi. Pemimpin yang berperan sebagai teladan dapat memainkan peran penting dalam membentuk norma, nilai, dan tindakan yang diikuti oleh

anggota organisasi, sehingga menciptakan pengaruh positif pada dinamika organisasional secara keseluruhan.

c. *Self-Efficacy* (Efikasi Diri)

Self-efficacy merupakan keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam menjalankan tugas-tugas khusus, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Schunk & DiBenedetto, 2021). Dalam kerangka teori ini, peran efikasi diri menjadi sangat penting dalam memengaruhi perilaku, motivasi, dan pencapaian individu. Konsep *self-efficacy* melibatkan keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, bukan hanya sekadar memiliki kemampuan sebenarnya, melainkan tentang keyakinan subjektif terkait kemampuan tersebut. Individu yang memiliki tingkat *self-efficacy* yang tinggi cenderung lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai tugas dan tantangan yang dihadapi (Schunk & DiBenedetto, 2021).

Keyakinan dalam *self-efficacy* menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku individu. Mereka yang memiliki tingkat *self-efficacy* yang tinggi cenderung bersedia menghadapi tugas-tugas yang menantang, bersikap gigih, dan tidak mudah menyerah di hadapan hambatan. Di sisi lain, individu dengan tingkat *self-efficacy* yang rendah mungkin mengalami rasa putus asa dan cenderung menghindari tantangan. Pentingnya *self-efficacy* juga tercermin dalam motivasi individu, dimana keyakinan diri yang kuat dapat memicu motivasi internal yang mendalam untuk mencoba dan berusaha keras. Keyakinan bahwa usaha yang dikeluarkan akan menghasilkan hasil positif dapat menjadi dorongan bagi individu untuk meningkatkan upaya mereka (Schunk & DiBenedetto, 2021).

Pengalaman sukses dalam menghadapi tantangan atau mencapai tujuan dapat meningkatkan *self-efficacy* seseorang, sementara pengalaman kegagalan atau ketidakberhasilan dapat mengurangnya. Dengan demikian, pengalaman berperan penting dalam membentuk dan menguatkan keyakinan individu terhadap kemampuannya. Selain itu, lingkungan juga memiliki peran signifikan dalam membentuk *self-efficacy*. Pengalaman dan umpan balik yang diterima dari orang lain, serta pengamatan terhadap model-model yang berhasil, dapat mempengaruhi

keyakinan individu terhadap kemampuan mereka (Schunk & DiBenedetto, 2021). Melihat orang lain berhasil dapat memberikan keyakinan tambahan bahwa mereka juga dapat mencapai kesuksesan.

Self-efficacy bukanlah atribut yang statis, melainkan dapat berkembang dan berubah seiring waktu. Peningkatan *self-efficacy* dapat dicapai melalui pengalaman positif, pembelajaran baru, dan usaha yang berkelanjutan. Implikasi konsep *self-efficacy* sangat signifikan dalam konteks pendidikan, pekerjaan, dan berbagai aspek kehidupan. Kepala sekolah, guru, dan pemimpin organisasi memegang peran krusial dalam meningkatkan *self-efficacy* individu melalui pemberian umpan balik positif, memberikan dukungan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan keyakinan diri. Dengan demikian, upaya kolektif dalam menciptakan konteks yang memfasilitasi pertumbuhan *self-efficacy* dapat memiliki dampak positif yang berkelanjutan.

d. *Reciprocal Determinism* (Determinisme Timbal Balik)

Reciprocal determinism atau determinisme timbal balik merupakan suatu konsep yang menggambarkan interaksi kompleks dan dinamis antara faktor-faktor lingkungan, perilaku individu, dan faktor kognitif seperti keyakinan, motivasi, dan pikiran dalam menentukan perilaku dan proses pembelajaran (Usher & Ford, 2022). Dalam kerangka teori ini, *reciprocal determinism* menggambarkan bagaimana ketiga faktor ini, yakni lingkungan, perilaku individu, dan faktor kognitif, saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain (Joseph & Padmanabhan, 2019). Konsep ini menekankan keterkaitan dan saling ketergantungan antara elemen-elemen tersebut, membentuk suatu sistem yang kompleks dalam membentuk dan memodifikasi perilaku serta proses belajar individu.

Faktor lingkungan melibatkan segenap elemen eksternal yang memengaruhi individu, seperti dimensi fisik, sosial, dan situasional. Dengan memengaruhi pola pikir, emosi, dan respon terhadap rangsangan sekitarnya, lingkungan memiliki peran krusial dalam membentuk perilaku individu. Tindakan konkret yang dilakukan oleh individu sebagai respons terhadap lingkungan

merupakan bagian dari faktor perilaku, yang pada gilirannya dapat berkontribusi dalam membentuk kembali lingkungan melalui respon terhadap stimulus dan situasi tertentu. Sementara itu, faktor kognitif mencakup dimensi kognitif individu, seperti pikiran, keyakinan, penilaian, motivasi, dan persepsi. Penekanan pada aspek-aspek ini, sebagaimana diuraikan oleh Joseph dan Padmanabhan (2019), memperkaya pemahaman kita terhadap kompleksitas interaksi antara individu dan lingkungannya.

Faktor lingkungan mencakup segala pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi individu, seperti aspek fisik, sosial, dan situasional. Lingkungan ini memiliki kemampuan membentuk perilaku individu melalui pengaruhnya terhadap pola pikir, respons emosional, serta tanggapan terhadap stimulus di sekitarnya. Perilaku individu, sebagai respons konkret terhadap lingkungan, memiliki peran penting dalam membentuk kembali lingkungan tersebut melalui interaksi dengan stimulus dan situasi tertentu. Sejalan dengan itu, faktor kognitif juga turut berperan, melibatkan aspek-aspek kognitif individu, seperti pikiran, keyakinan, penilaian, motivasi, dan persepsi. Pemahaman holistik terhadap hubungan kompleks antara faktor lingkungan, perilaku, dan faktor kognitif menjadi esensial dalam menganalisis dinamika interaksi individu dengan lingkungannya (Joseph & Padmanabhan, 2019).

B. Kerangka Berpikir

Pendidikan Antikorupsi (PAk) merupakan upaya yang disengaja untuk memberikan pemahaman dan mencegah terjadinya tindakan korupsi melalui berbagai jalur pendidikan. Pendekatan ini dilaksanakan melalui pendidikan formal di lingkungan sekolah, pendidikan informal di dalam keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat, sebagaimana diutarakan oleh Supandi dan Vernia (2015). Proses Pendidikan Antikorupsi tidak sekadar mentransfer pengetahuan (kognitif), melainkan memberikan penekanan pada pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral terhadap perlawanan terhadap perilaku korupsi (psikomotorik). Oleh karena itu, Pendidikan Antikorupsi tidak hanya berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi, melainkan juga melibatkan pemahaman,

penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai tersebut agar menjadi bagian integral dari kebiasaan hidup sehari-hari.

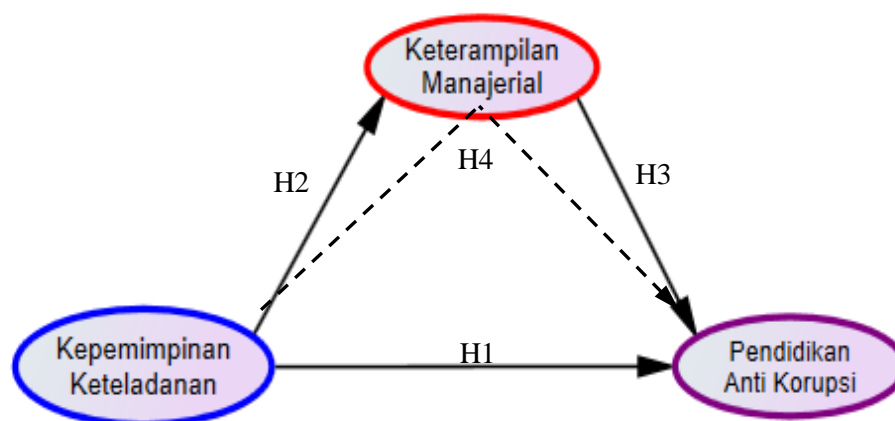
Keberhasilan program Pendidikan Antikorupsi (PAk) di tingkat satuan pendidikan sangat tergantung pada peran kunci seorang kepala sekolah. Sebagai pemimpin tertinggi di lingkungan pendidikan, kepala sekolah memegang tanggung jawab utama terhadap kesuksesan atau kegagalan implementasi PAk, khususnya dalam menunjukkan teladan perilaku anti korupsi di sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah yang menerapkan gaya kepemimpinan *exemplary leadership* atau kepemimpinan keteladanan diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui PAk di satuan pendidikan.

Ternyata, keberhasilan penerapan Pendidikan Antikorupsi (PAk) tidak semata-mata bergantung pada keteladanan seorang kepala sekolah. Menurut Nwogu dan Ebunu (2019), kepala sekolah perlu dilengkapi dengan keterampilan manajerial yang kuat guna memastikan efisiensi operasional di sekolah yang dipimpinnya. Keterampilan manajerial ini dianggap sebagai unsur kunci dalam melaksanakan tugas kepemimpinan, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi melalui PAk. Oleh karena itu, kepala sekolah tidak hanya diharapkan menjadi teladan, tetapi juga harus mampu mengelola dan memimpin sekolah dengan efektif, sehingga implementasi PAk dapat berjalan optimal.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi (PAk), peran seorang kepala sekolah menjadi krusial. Kepala sekolah yang efektif harus dapat berfungsi sebagai pemimpin dan pengelola. Sebagai pemimpin, mereka perlu mengadopsi gaya kepemimpinan yang efektif, salah satunya adalah melalui penerapan kepemimpinan keteladanan. Sementara itu, sebagai pengelola, kepala sekolah harus memiliki keterampilan manajerial yang kuat. Oleh karena itu, keberhasilan dalam pemberantasan korupsi melalui PAk sangat tergantung pada kepemimpinan yang mengedepankan keteladanan dari seorang kepala sekolah, yang didukung oleh keterampilan manajerial yang baik.

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi kepemimpinan keteladanan, keterampilan manajerial, dan pendidikan anti korupsi, yang saling

terkait satu sama lain. Dalam konteks ini, kerangka pikir penelitian dapat disajikan secara visual seperti yang tergambar pada Gambar 2.2. Pemimpin yang menunjukkan keteladanan dapat memengaruhi keterampilan manajerialnya, sementara pendidikan anti korupsi dapat menjadi faktor penentu yang memengaruhi kedua variabel sebelumnya. Dengan demikian, hubungan antarvariabel ini menjadi fokus penelitian untuk memahami dinamika dan pengaruhnya dalam konteks kepemimpinan dan manajemen yang berintegritas. Referensi gambar 2.2 merujuk pada representasi visual dari kerangka pikir penelitian yang telah diuraikan.



Gambar 2. 2 Diagram Kerangka Pikir

C. Hipotesis

Berdasarkan struktur pemikiran, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif kepemimpinan keteladanan terhadap pendidikan antikorupsi.
2. Terdapat pengaruh positif kepemimpinan keteladanan terhadap keterampilan manajerial.
3. Terdapat pengaruh positif keterampilan manajerial terhadap pendidikan antikorupsi.
4. Keterampilan manajerial memediasi pengaruh tidak langsung kepemimpinan keteladanan terhadap pendidikan antikorupsi.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dijalankan di wilayah Provinsi Lampung.

2. Jadwal Penelitian

Penelitian berlangsung sejak semester ganjil 2021/2022 sampai dengan semester ganjil 2023/2024.

3. Rincian Langkah Penelitian

Rencana tahapan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

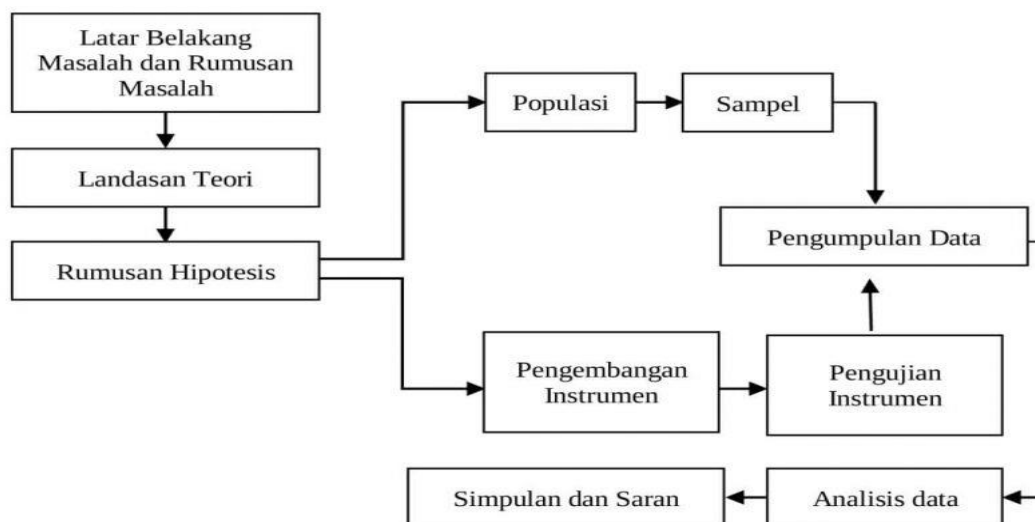
Tabel 3. 1 Gambaran Tahapan Kegiatan Penelitian

Fase	Kegiatan	Waktu
Fase I	<ul style="list-style-type: none">• Mereview literatur yang relevan• Menentukan pendekatan penelitian dan membuat draf proposal• Menentukan alat pengumpul data/ kuisisioner dan metodenya<ul style="list-style-type: none">- Kepemimpinan Keteladanan (Kouzes & Posner, 2017)- Keterampilan Manajerial (Katz, 2009)- Pendidikan Antikorupsi dikembangkan oleh penulis diadaptasi dari (Lickona, 2009)• Menghubungi pihak-pihak yang dapat membantu kelancaran pengumpulan data tentang penelitian dengan berkerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung• Penyebaran kuisisioner secara eletronik melalui <i>Google Forms</i>.	Juli 2021 s.d Desember 2022
Fase II	Pengumpulan data selama \pm 5 bulan	Februari 2023 s.d Mei 2023
Fase III	<ul style="list-style-type: none">• Analisis data dengan teknik SEM berbantuan aplikasi AMOS.• Laporan akhir.	Juni 2023 s.d Oktober 2023

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain non-eksperimental dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survei. Dalam pengumpulan dan analisis data, digunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan dukungan perangkat lunak AMOS. Pendekatan kuantitatif ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki hubungan antar variabel melalui pengumpulan data survei, sementara SEM dengan AMOS memberikan alat analisis yang kuat untuk menguji model konseptual yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada analisis data kuantitatif untuk memahami dan menginterpretasi hubungan antar variabel yang relevan dalam konteks penelitian.

Desain dalam penelitian ini digambarkan seperti pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3. 1 Kerangka Penelitian Kuantitatif Survey

C. Populasi, Sampel, dan Sampling

1. Populasi

Sasaran penelitian ini adalah kepala sekolah, namun peneliti melihat dari persepsi guru sebagai subjek yang terdampak langsung dari perilaku seorang kepala sekolah. Oleh sebab itu populasi pada penelitian ini adalah guru SMA dan SMK dari 15 kabupaten kota di propinsi Lampung. Secara detail jumlah populasi dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3. 2 Jumlah Guru Perkabupaten di Propinsi Lampung

No	Wilayah	Jumlah Guru		
		SMA	SMK	Jumlah
1	Kota Bandar Lampung	1658	1757	3415
2	Kota Metro	645	646	1291
3	Lampung Barat	752	65	817
4	Lampung Selatan	1203	1015	2218
5	Lampung Tengah	1489	1243	2732
6	Lampung Timur	1154	1200	2354
7	Lampung Utara	1197	463	1660
8	Mesuji	371	109	480
9	Pesawaran	639	188	827
10	Pesisir Barat	429	34	463
11	Pringsewu	654	823	1477
12	Tanggamus	756	390	1146
13	Tulang Bawang	661	263	924
14	Tulang Bawang Barat	513	175	688
15	Way Kanan	1020	258	1278
Total		13.141	8.629	21.770

Sumber: Dapodik (2022)

2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel penelitian ini diambil dari populasi guru di 15 kabupaten/kota di propinsi Lampung. Ukuran sampel minimum yang diperlukan untuk mengurangi bias pada semua jenis estimasi SEM adalah 200 (Hair et al., 2014). Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik *multistage random sampling*, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) Tahap pertama yaitu mendaftar 15 kabupaten/kota yang ada di propinsi Lampung, kemudian secara *purposive* memilih 5 kabupaten/kota; (b) Tahap kedua yaitu mendaftar seluruh sekolah yang ada di 5 kabupaten/kota terpilih, kemudian secara *random* memilih 4 sampai 6 sekolah di masing-masing kabupaten/kota; (c) Tahap ketiga yaitu mendaftar semua guru pada sekolah-sekolah yang terpilih, dan secara *random* memilih 50% guru di masing-masing sekolah; (d) Tahap keempat yaitu menyebarkan angket penelitian melalui aplikasi *google form* kepada

guru-guru yang terpilih sebagai sampel; (e) Tahap kelima yaitu memilah data yang masuk melalui aplikasi *google form*, dengan membuang data yang berpotensi menjadi *outlier*, sehingga terpilih 392 data yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mengaplikasikan kuesioner sebagai instrumen untuk seluruh variabel, yakni Kepemimpinan Keteladanan dengan 30 pernyataan, Keterampilan Manajerial dengan 43 pernyataan, dan Pendidikan Antikorupsi dengan 14 pernyataan. Kuesioner disusun dalam model skala Likert yang terdiri dari 87 butir pernyataan, masing-masing dilengkapi dengan 4 pilihan jawaban. Pengukuran dilakukan dengan menginstruksikan responden untuk memilih satu jawaban yang telah ditentukan melalui Google Formulir. Setiap alternatif jawaban diberikan bobot skor berkisar antara 1 hingga 4, dimana 1 mengindikasikan Sangat Tidak Setuju (STS), 2 untuk Tidak Setuju (TS), 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS). Dengan pendekatan ini, penelitian ini memperoleh data yang dapat diinterpretasikan secara kuantitatif guna menganalisis faktor-faktor seperti Kepemimpinan Keteladanan, Keterampilan Manajerial, dan Pendidikan Antikorupsi dalam konteks yang telah ditetapkan.

E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Variabel dalam penelitian ini memerlukan deskripsi untuk mempermudah pemahaman dan operasionalisasi konsep di lapangan. Definisi konseptualnya adalah sebagai berikut:

a. Kepemimpinan Keteladanan

Kepemimpinan keteladanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep kepemimpinan yang menekankan pentingnya pemimpin memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Pemimpin yang menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai yang dipegangnya akan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti jejaknya. Prinsip ini menekankan

bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang tidak hanya mengarahkan orang lain, tetapi juga hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka advokasi. Ini berarti bahwa pemimpin tersebut tidak hanya mengemukakan prinsip-prinsip atau instruksi, tetapi juga menjalani nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari mereka.

b. Keterampilan Manajerial

Keterampilan manajerial dalam penelitian ini dijelaskan sebagai kemampuan seorang pemimpin dalam menganalisis, berfikir logis, dan memiliki kefasihan dalam membentuk konsep serta konseptualisasi hubungan yang kompleks. Pemimpin dengan keterampilan manajerial juga dilengkapi dengan keterampilan teknis dalam pekerjaan atau aktivitas tertentu. Lebih lanjut, mereka memiliki kemampuan untuk merangkul dan bekerja sama dengan orang lain.

c. Pendidikan Antikorupsi (PAk)

Pendidikan Antikorupsi (PAk) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Proses ini tidak hanya melibatkan transfer pengetahuan (kognitif) atau *moral knowing*, tetapi juga menekankan pembentukan karakter (afektif) / *moral feeling* dan kesadaran moral perlawanan (psikomotorik) atau *moral acting* terhadap perilaku korupsi. Pendidikan Antikorupsi tidak hanya terbatas pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi, melainkan melibatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai antikorupsi sebagai bagian dari kebiasaan hidup sehari-hari.

2. Definisi Operasional

Dalam rangka memfasilitasi pemahaman yang jelas dan menghindari potensi kekeliruan atau kesalahpahaman terhadap makna penelitian ini, penulis menetapkan definisi variabel yang terlibat. Definisi ini disusun agar dapat memberikan panduan yang konsisten terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, parafrase ini bertujuan untuk mengklarifikasi

makna dan batasan masing-masing variabel yang menjadi fokus penelitian, menjaga keselarasan, serta menjamin akurasi interpretasi hasil penelitian.

Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Pengertian
Kepemimpinan keteladanan	<p><i>“Model The Way”</i> (Mencontohkan cara/ arah/ jalan)</p>	<p>Seorang pemimpin yang efektif memperlihatkan integritasnya dengan menghubungkan tindakannya secara konsisten dengan nilai-nilai bersama. Tindakan tersebut mencerminkan kesesuaian antara prinsip-prinsip yang dianut bersama dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin. Dengan menyelaraskan diri dengan nilai-nilai bersama, pemimpin menciptakan dasar yang kuat untuk memandu tim atau organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan dan kredibilitas pemimpin, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk budaya organisasi yang berlandaskan prinsip-prinsip etika dan moral.</p>
	<p><i>“Inspire a Shared Vision”</i> (Menginspirasi visi bersama)</p>	<p>Pemimpin memiliki kapasitas untuk memotivasi para anggota organisasinya dengan mengilhami mereka terhadap visi, nilai, dan tujuan yang diemban oleh entitas tersebut, sambil meyakinkan mereka untuk secara aktif berkontribusi</p>

		dalam merealisasikan aspek-aspek tersebut.
	<p><i>“Challenge the Process”</i> (Menantang proses)</p>	<p>Pemimpin yang berani secara proaktif mengejar peluang yang menantang dan inovatif guna mewujudkan kesuksesan organisasi. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang visioner.</p> <p>Dalam menjalankan tugas kepemimpinan, mereka terus mencari dan mengeksplorasi berbagai peluang yang dapat meningkatkan kinerja dan prestasi organisasi. Keberanian tersebut tercermin dalam kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan dengan sikap yang positif dan solutif, serta keberanian untuk mengambil risiko yang diukur. Dengan demikian, pemimpin yang berani tidak hanya memelihara eksistensi organisasi, tetapi juga membuka jalan menuju kemajuan dan keunggulan melalui pendekatan inovatif yang mereka terapkan.</p>
	<p><i>“Enable Others to Act”</i> (Memungkinkan orang lain untuk bertindak)</p>	<p>Pemimpin yang berani secara proaktif mengejar peluang yang menantang dan inovatif guna mewujudkan kesuksesan organisasi. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, melainkan juga sebagai agen perubahan yang visioner. Dalam menjalankan tugas</p>

		<p>kepemimpinan, mereka terus mencari serta mengeksplorasi berbagai peluang yang dapat meningkatkan kinerja dan prestasi organisasi. Keberanian tersebut tercermin dalam kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan dengan sikap yang positif dan solutif, serta keberanian untuk mengambil risiko yang diukur. Oleh karena itu, pemimpin yang berani tidak hanya memelihara eksistensi organisasi, melainkan juga membuka jalan menuju kemajuan dan keunggulan melalui pendekatan inovatif yang mereka terapkan.</p>
	<p><i>“Encourage the Heart”</i> (Mendorong hati)</p>	<p>Seorang pemimpin yang tulus hati senantiasa bersedia mengakui dan menghargai prestasi serta kontribusi yang diberikan oleh anggota timnya dalam mencapai keberhasilan organisasi. Sikap penuh penghargaan ini mencerminkan kesadaran pemimpin akan pentingnya peran setiap individu dalam mencapai tujuan bersama. Dengan mengakui prestasi anggota, pemimpin tidak hanya membangkitkan semangat kerja, tetapi juga memperkuat ikatan tim serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi. Kesadaran terhadap peran kontributif anggota tim tidak hanya menciptakan keberlanjutan kinerja tinggi, tetapi juga menciptakan</p>

		<p>fondasi untuk pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang organisasi.</p>
Keterampilan manajerial	<p><i>“Technical Skills”</i> (keterampilan teknis)</p>	<p>Keterampilan pemimpin dalam konteks kemahiran teknis terkait dengan kecakapan dan pengetahuan yang dimilikinya dalam menjalankan jenis pekerjaan atau aktivitas tertentu. Pemimpin yang efektif harus mampu menguasai aspek-aspek teknis yang relevan dengan lingkup tugasnya, sehingga dapat memberikan arahan dan pengawasan yang kompeten kepada timnya. Keterampilan ini mencakup pemahaman mendalam tentang prosedur, alat, dan metodologi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan menguasai kemahiran teknis, seorang pemimpin dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap efisiensi dan efektivitas operasional dalam organisasinya. Oleh karena itu, pengembangan dan penguasaan kemahiran teknis menjadi suatu keharusan bagi seorang pemimpin yang ingin berhasil dalam memimpin dan mengelola jenis pekerjaan atau aktivitas tertentu.</p>
	<p><i>“Human Skills”</i> (keterampilan manusiawi/ interpersonal)</p>	<p>Kemampuan seorang pemimpin untuk berkolaborasi dengan orang lain merupakan aspek kritis dalam</p>

		<p>keberhasilan kepemimpinan. Pemimpin yang efektif harus dapat mengembangkan keterampilan interpersonal yang kuat, termasuk kemampuan mendengarkan secara aktif dan berkomunikasi dengan jelas. Selain itu, keterampilan empati dan pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan anggota tim juga sangat penting. Pemimpin yang mampu memotivasi dan menginspirasi timnya, serta memfasilitasi kerja sama yang produktif, cenderung menciptakan lingkungan kerja yang positif dan berdaya saing. Pemahaman yang mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan individu dalam tim dapat membantu pemimpin mengoptimalkan kontribusi setiap anggota, sehingga mencapai tujuan bersama secara efisien. Dalam konteks ini, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya bergantung pada kecerdasan individu, tetapi juga pada kemampuan untuk membangun hubungan saling percaya dan memotivasi tim untuk mencapai hasil yang optimal.</p>
	<p><i>“Conceptual Skills”</i> (keterampilan konseptual)</p>	<p>Keterampilan seorang pemimpin terletak pada kemampuannya dalam menganalisis situasi, berfikir logis, serta kefasihan dalam membentuk konsep dan konseptualisasi hubungan yang kompleks. Dalam konteks ini, kecakapan</p>

		<p>analitis pemimpin menjadi elemen kunci dalam menghadapi berbagai tantangan, sementara kemampuan berfikir logisnya memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Pemimpin yang mahir dalam membentuk konsep mampu menggambarkan visi dan strategi secara jelas, sementara kemampuannya dalam konseptualisasi hubungan yang kompleks memungkinkannya untuk memahami dan mengelola dinamika yang rumit. Dengan demikian, kombinasi keterampilan ini menciptakan pemimpin yang mampu menghadapi kompleksitas dunia organisasi dengan cara yang terstruktur dan terarah.</p>
Pendidikan Antikorupsi	<p>“Pengetahuan moral (<i>moral knowing</i>)”</p>	<p>Kemampuan untuk menilai, memahami, mempertimbangkan, membedakan, dan menginterpretasikan berbagai jenis moral merupakan aspek kritis dalam kajian etika. Proses ini memungkinkan individu untuk secara cermat memahami dan mengevaluasi norma-norma moral yang mendasari perilaku manusia.</p> <p>Keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk membedakan antara berbagai kerangka moral, memahami kompleksitas nilai-nilai etis, serta menginterpretasikan dan merespons dengan bijak terhadap dilema moral yang muncul. Pemahaman</p>

		<p>yang mendalam terhadap jenis-jenis moral tersebut mendukung pengembangan landasan etis yang kokoh, yang pada gilirannya dapat membentuk perilaku yang berkelanjutan dan bermakna dalam konteks masyarakat yang beragam.</p>
	<p>“Rasa moral (<i>moral feeling</i>)”</p>	<p>Kemampuan emosional atau psikologis memainkan peran krusial dalam proses pertimbangan moral atau etika. Sebagai unsur integral dalam pengambilan keputusan moral, aspek-aspek emosional dan psikologis individu dapat memengaruhi penilaian terhadap situasi moral tertentu. Keterlibatan perasaan, pengalaman pribadi, dan persepsi moral dapat membentuk landasan bagi kerangka kerja etis seseorang. Kajian ini sejalan dengan pandangan para ahli dalam bidang psikologi moral yang menegaskan bahwa faktor-faktor psikologis seperti empati, rasa bersalah, dan nilai-nilai internal dapat memodifikasi respon individu terhadap tantangan etis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dimensi emosional dan psikologis menjadi esensial dalam merinci dan menganalisis aspek moralitas serta etika dalam konteks keputusan dan perilaku manusia.</p>

	<p>“Tindakan moral (<i>moral acting</i>)”</p>	<p>Perilaku atau tindakan manusia sering kali diarahkan oleh pertimbangan moral atau etika yang membimbing individu dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut. Pada banyak konteks, kebijakan atau tindakan yang diambil oleh seseorang dapat mencerminkan evaluasi moral yang matang dan kesadaran terhadap prinsip-prinsip etika yang berlaku. Oleh karena itu, perilaku yang didasarkan pada pertimbangan moral bukan hanya mencerminkan pemahaman individu terhadap konsep baik dan buruk, tetapi juga menciptakan landasan yang kuat untuk interaksi sosial yang bermartabat dan bertanggung jawab. Hal ini menegaskan pentingnya nilai-nilai moral dalam membentuk tindakan manusia yang diarahkan pada kebaikan bersama dan menjunjung tinggi norma-norma etika yang berlaku dalam masyarakat.</p>
--	---	--

F. Skala Pengukuran Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpul data dalam penelitian ini telah dipilih berdasarkan standar yang telah teruji dan sering digunakan dalam penelitian yang sebelumnya telah dilakukan pada bidang kajian variabel yang sejenis. Skala pengukuran untuk variabel Kepemimpinan Keteladanan mengacu pada instrumen yang dikembangkan oleh Kouzes dan Posner (2017), sementara untuk variabel Keterampilan Manajerial, digunakan skala pengukuran yang dikembangkan oleh

Katz (2009). Adapun skala pengukuran untuk variabel Pendidikan Antikorupsi dirancang khusus oleh penulis dalam konteks penelitian ini. Dengan menggunakan instrumen yang telah terstandar, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang relevan dan dapat diandalkan dalam menggali informasi terkait variabel yang diteliti.

Untuk memenuhi persyaratan keterbacaan butir, peneliti telah memanfaatkan layanan ahli alih bahasa yang kompeten, dan hasil terjemahan dibahas secara kolektif dalam Forum Group Discussion untuk mencapai kualitas keterbacaan yang optimal. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditemukan dalam Tabel 3.3, yang disajikan di bawah ini.

Tabel 3.3 Variabel, Indikator, dan Butir Angket

Varibel	Dimensi	No	Items
Kepemimpinan Keteladanan	<i>Challenge the Process</i>	1.	“Kepala sekolah saya mencari peluang yang menantang untuk menguji keterampilan anggota”
		2.	“Kepala sekolah saya menantang orang lain untuk mencoba pendekatan baru”
		3.	“Kepala sekolah saya aktif mencari cara inovatif untuk meningkatkan apa yang guru dan staf lakukan”
		4.	“Kepala sekolah saya menanyakan pernyataan "apa yang bisa kita pelajari"?"
		5.	“Kepala sekolah saya mengidentifikasi tonggak/jejak yang terukur yang membuat kegiatan terus maju”
		6.	“Kepala sekolah saya berinisiatif dalam mengantisipasi dan merespon perubahan”
	<i>Enable Others to Act</i>	7.	“Kepala sekolah saya mengembangkan hubungan kerjasama”
		8.	“Kepala sekolah saya aktif mendengarkan beragam sudut pandang”
		9.	“Kepala sekolah saya memperlakukan orang secara bermartabat dan hormat.”
		10.	“Kepala sekolah saya melibatkan orang-orang dalam keputusan yang secara langsung berdampak pada kinerja pekerjaan mereka.”
		11.	“Kepala sekolah saya memberi pilihan kepada orang lain tentang bagaimana melakukan pekerjaan”
		12.	“Kepala sekolah saya memastikan bahwa orang tumbuh dalam pekerjaannya.”

Varibel	Dimensi	No	Items
Keterampilan Manajerial	<i>Encourage the Heart</i>	13.	“Kepala sekolah saya memuji orang atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik.”
		14.	“Kepala sekolah saya mengungkapkan kepercayaannya pada kemampuan orang lain.”
		15.	“Kepala sekolah saya memastikan bahwa orang-orang diakui karena secara kreatif berkontribusi mereka atas keberhasilan suatu proyek/kegiatan.”
		16.	“Kepala sekolah saya mengakui orang lain atas komitmennya terhadap nilai-nilai yang disepakati bersama.”
		17.	“Kepala sekolah saya menceritakan kisah-kisah penyemangat tentang keberhasilan karya orang lain.”
		18.	“Kepala sekolah saya terlibat secara pribadi dalam mengenali orang dan merayakan pencapaiannya.”
	<i>Inspire a Shared Vision</i>	19.	“Kepala sekolah saya membicarakan tentang tren masa depan yang memengaruhi pekerjaan.”
		20.	“Kepala sekolah saya menggambarkan masa depan yang menarik.”
		21.	“Kepala sekolah saya menghimbau kepada orang lain untuk berbagi mimpi di masa depan.”
		22.	“Kepala sekolah saya menunjukkan kepada orang lain bagaimana minat dan niat dapat diwujudkan.”
		23.	“Kepala sekolah saya menjelaskan "gambaran besar" dari aspirasi kelompok.”
		24.	“Kepala sekolah saya berbicara dengan penuh keyakinan tentang makna pekerjaan.”
	<i>Model the Way</i>	25.	“Kepala sekolah saya memberikan contoh tentang apa yang diharapkan.”
		26.	“Kepala sekolah saya memastikan bahwa orang-orang mematuhi prinsip dan standar yang telah disepakati.”
		27.	“Kepala sekolah saya menepati janji dan komitmen.”
		28.	“Kepala sekolah saya meminta umpan balik tentang bagaimana tindakannya memengaruhi kinerja orang lain.”
		29.	“Kepala sekolah saya membangun konsensus nilai-nilai organisasi.”
		30.	“Kepala sekolah saya memiliki kejelasannya filosofi kepemimpinannya.”
	<i>Conceptual Skills</i>	31.	“Kepala sekolah saya disiplin.”
		32.	“Kepala sekolah saya kreatif.”
		33.	“Kepala sekolah saya adalah konseptor penyelenggara berbagai program.”
		34.	“Kepala sekolah saya berani mengakui kekuatan dan

Varibel	Dimensi	No	Items
			kelemahannya.”
		35.	“Kepala sekolah saya mensukseskan tujuan.”
		36.	“Kepala sekolah saya memprioritaskan organisasi (sekolah).”
		37.	“Kepala sekolah saya memiliki stabilitas mental.”
		38.	“Kepala sekolah saya adalah seorang perencana yang menyeluruh penguasaannya.”
		39.	“Kepala sekolah saya ahli dalam mengenali struktur organisasi dan mengisi dengan orang-orang yang tepat.”
		40.	“Kepala sekolah saya mengevaluasi efektivitas perencanaan.”
		41.	“Kepala sekolah saya menyampaikan dan menjelaskan strategi.”
		42.	“Kepala sekolah saya adalah seorang pengelola waktu.”
		43.	“Kepala sekolah saya berkemampuan memprediksi.”
		44.	“Kepala sekolah saya informal/tidak formal.”
		45.	“Kepala sekolah saya banyak bisa.”
	<i>Human Skills</i>	46.	“Kepala sekolah saya memiliki keterampilan berkomunikasi.”
		47.	“Kepala sekolah saya adalah orang dengan tipe bermusyawarah.”
		48.	“Kepala sekolah saya pandai membangun hubungan dengan guru, staf, dan murid.”
		49.	“Kepala sekolah saya menginspirasi tim.”
		50.	“Kepala sekolah saya senang berbagi informasi.”
		51.	“Kepala sekolah saya adalah seorang motivator.”
		52.	“Kepala sekolah saya adalah seorang negosiator.”
		53.	“Kepala sekolah saya menangani gangguan yang datang.”
		54.	“Kepala sekolah saya adalah seorang pengendali konflik.”
		55.	“Kepala sekolah saya adalah seorang yang menceramahi/meguliah.”
		56.	“Kepala sekolah saya adalah seorang pengawas.”
		57.	“Kepala sekolah saya adalah seorang korespondensi resmi/formal.”
		58.	“Kepala sekolah saya adalah seorang pembuat laporan.”
		59.	“Kepala sekolah saya ahli dalam pendelegasian wewenang.”
		60.	Kepala sekolah saya memperlakukan orang secara formal.
		61.	“Kepala sekolah saya mampu mengerjakan pekerjaan individu.”

Varibel	Dimensi	No	Items	
Pendidikan Karakter Antikorupsi	Technical Skills	62.	“Kepala sekolah saya mengetahui dan memahami manajerial.”	
		63.	“Kepala sekolah saya adalah seorang evaluator kerja.”	
		64.	“Kepala sekolah saya adalah seorang pembagi kerja.”	
		65.	“Kepala sekolah saya adalah seorang perencana organisasi.”	
		66.	“Kepala sekolah saya terampil menempatkan orang pada pekerjaan yang tepat.”	
		67.	“Kepala sekolah saya terampil menjelaskan dan menerangkan tentang fungsi dan pemaksimalan tenaga kerja.”	
		68.	“Kepala sekolah saya paham hukum.”	
		69.	“Kepala sekolah saya menganalisis untuk pengembangan sekolah.”	
		70.	“Kepala sekolah saya terampil mengoperasikan komputer dan alat sejenisnya.”	
		71.	“Kepala sekolah saya terampil mengelola keuangan.”	
		72.	“Kepala sekolah saya mengetahui dan berpengalaman dalam mengelola sekolah.”	
		73.	“Kepala sekolah saya terampil memasarkan program-program sekolah.”	
	Moral Knowing	74.	“Peserta didik saya memiliki kesadaran tentang nilai antikorupsi yang ada disekitarnya”	
		75.	“Peserta didik saya memiliki kemampuan memahami nilai antikorupsi dalam berbagai situasi”	
		76.	“Peserta didik saya memiliki kemampuan untuk mengetahui dan memahami makna dari nilai antikorupsi”	
		77.	“Peserta didik saya memiliki keberanian dalam mengambil keputusan yang tepat saat mengalami dilema tentang nilai antikorupsi”	
		78.	“Peserta didik saya memiliki kemampuan mengenali perilakunya dan mengevaluasinya secara jujur.”	
		Moral Feeling	79.	“Peserta didik saya bertindak sesuai hati nuraninya.”
			80.	“Peserta didik saya merasa bermartabat karena memiliki nilai antikorupsi.”
			81.	“Peserta didik saya memiliki kepekaan terhadap keadaan atau penderitaan orang lain.”
82.			“Peserta didik saya merasa senang ketika melakukan perbuatan antikorupsi.”	
83.			“Peserta didik saya mampu mengendalikan emosi ketika sedang marah.”	

Varibel	Dimensi	No	Items
	Moral Acting	84.	“Peserta didik saya bersikap rendah hati.”
		85.	“Peserta didik saya mampu mengubah nilai antikorupsi menjadi tindakan antikorupsi yang efektif.”
		86.	“Peserta didik saya mampu melakukan apa yang menurutnya harus dilakukan.”
		87.	“Peserta didik saya mampu melakukan perbuatan antikorupsi secara berulang-ulang.”

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik *Structural Equation Modeling* (SEM). Fornell (1985) menjelaskan bahwa SEM merupakan teknik multivariat generasi kedua yang sangat populer dalam ilmu manajemen. SEM menggabungkan berbagai metode analisis seperti regresi, analisis jalur, analisis faktor, dan model struktural, memungkinkan peneliti untuk menjawab berbagai pertanyaan riset secara sistematis dan komprehensif. Dengan memeriksa hubungan antara faktor independen dan dependen, SEM dapat digunakan untuk mengidentifikasi indikator pembentuk variabel, menguji validitas dan reliabilitas instrumen, mengkonfirmasi ketepatan model, serta menguji pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya (Al-Emran et al., 2018; Iacobucci, 2010). Kelebihan SEM dibandingkan dengan metode analisis data lainnya terletak pada kemampuannya untuk merinci indikator suatu variabel, menguji validitas dan reliabilitas instrumen, serta mengonfirmasi model dengan menguji pengaruh variabel terhadap variabel lainnya.

Kelebihan SEM dibandingkan dengan analisis statistik yang lain digambarkan oleh Narimawati and Sarwono (2007) dalam Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3. 4 Perbedaan antara SEM, analisis jalur, dan analisis regresi

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
1.	Analisis regresi memiliki keterbatasan dalam kemampuannya untuk	Analisis Jalur memiliki kelemahan dalam hal terbatasnya	Sementara SEM (Structural Equation Modeling) mampu secara

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
	<p>menguji hanya model struktural. Dalam konteks ini, regresi terfokus pada pengujian model struktural tanpa melibatkan aspek-aspek tambahan yang mungkin relevan. Kendati demikian, perlu diingat bahwa analisis regresi tetap menjadi alat yang efektif untuk memahami hubungan antar variabel dalam suatu sistem. Pemahaman terhadap batasan tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait kehandalan model yang dihasilkan melalui analisis regresi, sehingga peneliti dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menginterpretasi hasil dan menyusun kesimpulan yang akurat. Situasi ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan</p>	<p>kemampuannya untuk menguji model struktural. Meskipun metode ini memberikan wawasan yang berharga terkait hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti, keterbatasan utamanya terletak pada fokus eksklusifnya pada struktur model. Dengan kata lain, analisis jalur cenderung mengabaikan aspek-aspek lain dari kerangka analisis yang mungkin memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap fenomena yang diamati. Oleh karena itu, walaupun analisis jalur dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merinci keterkaitan variabel-variabel, peneliti harus mempertimbangkan dengan cermat</p>	<p>simultan menguji model struktural dan model pengukuran, keunggulan metodologi ini terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan analisis kedua aspek tersebut. Dengan menggunakan SEM, peneliti dapat secara holistik mengevaluasi hubungan antarvariabel laten dalam model struktural, sementara juga memperhitungkan aspek pengukuran yang mencerminkan variabilitas observasional. Dengan demikian, SEM tidak hanya menguji kecocokan model struktural dengan data empiris, tetapi juga memperhatikan validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran yang digunakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk</p>

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
	kerangka kerja analisis yang komprehensif dan memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang mungkin memengaruhi hubungan antar variabel dalam suatu studi.	kelemahan ini dan melengkapi pendekatan analisis dengan metode lain yang mungkin lebih holistik dan komprehensif.	mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konstruk yang diamati, menjadikan SEM sebagai alat analisis yang komprehensif dan efektif dalam konteks penelitian empiris.
2.	Analisis regresi memiliki keterbatasan yang perlu diakui, yaitu fokusnya yang terbatas pada pengujian kesalahan struktural semata. Meskipun mampu mengidentifikasi dan mengukur kesalahan yang terkait dengan struktur model, metode ini tidak selalu dapat menangkap atau menguji aspek-aspek lain yang mungkin memengaruhi hasil secara signifikan. Oleh karena itu, sementara analisis regresi memberikan wawasan yang berharga terkait	Analisis Jalur memperlihatkan keterbatasannya dengan hanya mampu menguji kesalahan struktural. Metode ini, yang sering digunakan dalam penelitian, menemukan batasan dalam kemampuannya untuk mengevaluasi kesalahan yang melibatkan struktur suatu model atau sistem. Pada tingkat konsep, Analisis Jalur terlihat tidak mampu mengidentifikasi atau mengukur kesalahan yang lebih kompleks atau yang melibatkan	Analisis struktural adalah suatu metode yang memiliki kemampuan untuk secara bersamaan mengidentifikasi dan menguji kesalahan pengukuran serta kesalahan struktural dalam suatu model. Dengan menggunakan SEM (<i>Structural Equation Modeling</i>), peneliti dapat mengevaluasi tidak hanya akurasi pengukuran variabel yang diamati, tetapi juga mengidentifikasi apakah model yang diusulkan konsisten dengan data

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
	<p>dengan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, peneliti perlu mempertimbangkan bahwa terdapat variabel-variabel eksternal atau faktor-faktor lain yang mungkin tidak tercakup dalam kerangka analisis regresi. Untuk menghasilkan temuan yang lebih holistik dan akurat, perlu dilakukan penelitian tambahan atau menggunakan pendekatan analisis lain yang dapat mengakomodasi berbagai aspek yang mempengaruhi fenomena yang diteliti.</p>	<p>variabel yang tidak tercakup dalam struktur yang dianalisis. Oleh karena itu, peneliti perlu berhati-hati dan menyadari keterbatasan ini saat menggunakan Analisis Jalur sebagai alat evaluasi, dan sebaiknya melengkapi pendekatannya dengan metode tambahan untuk memastikan ketelitian dan kehandalan temuan.</p>	<p>yang diamati. Oleh karena itu, SEM memberikan keunggulan dalam memberikan pemahaman yang holistik terhadap validitas konstruk dan integritas struktural dalam analisis statistik, memungkinkan peneliti untuk memeriksa sejauh mana model yang diajukan dapat mencerminkan hubungan sebenarnya di antara variabel-variabel yang diukur dengan akurat.</p>
3.	<p>Sebuah model penelitian hanya dapat menguji pengaruh antar variabel dalam suatu konteks tertentu. Dalam konteks ini, model tersebut dirancang untuk menganalisis hubungan</p>	<p>Hanya dapat melakukan pengujian terhadap pengaruh antar variabel dalam suatu model merupakan keterbatasan yang perlu diakui. Terdapat keterbatasan tersebut karena</p>	<p>Mampu melakukan evaluasi terhadap kesesuaian suatu model merupakan suatu aspek kritis dalam analisis statistik. Keberhasilan suatu model dapat diukur melalui berbagai metrik</p>

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
	<p>antara variabel-variabel yang relevan. Penelitian ini memiliki fokus pada pengujian dampak atau keterkaitan antara variabel-variabel yang diidentifikasi. Sebagai bagian integral dari metodologi penelitian, model tersebut memungkinkan peneliti untuk menyelidiki dan mengukur pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan antar variabel dalam kerangka kerja penelitian yang telah ditetapkan.</p>	<p>keterbatasan metodologi atau kendala teknis yang mungkin membatasi kemampuan analisis. Oleh karena itu, peneliti perlu mempertimbangkan dengan cermat hasil penelitian dan menjaga kewaspadaan terhadap batasan-batasan tersebut dalam menginterpretasikan temuan. Adanya keterbatasan ini menunjukkan bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut atau pengembangan metode analisis yang lebih canggih untuk merinci hubungan antar variabel secara lebih komprehensif. Dengan menyadari keterbatasan ini, penelitian dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih substansial terhadap pemahaman</p>	<p>yang relevan, yang mendasarkan evaluasinya pada kecocokan antara hasil prediksi model dan data observasional yang sebenarnya. Proses pengujian kecocokan ini memungkinkan para peneliti untuk menilai sejauh mana model mampu menggambarkan pola atau tren yang terdapat dalam data. Adanya kemampuan untuk memverifikasi validitas model menjadi landasan penting dalam menyusun temuan empiris yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sejalan dengan pendekatan akademis, pengujian kecocokan model ini dapat membantu memperkuat dasar metodologis penelitian, serta memberikan kontribusi pada</p>

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
		dalam domain penelitian yang bersangkutan.	perkembangan pengetahuan dalam bidang terkait.
4.	<p>Analisis regresi dapat dilakukan meskipun jumlah sampel yang tersedia kurang dari 200. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa keterbatasan jumlah sampel dapat mempengaruhi validitas dan generalisasi hasil. Meskipun ukuran sampel yang kecil dapat memberikan informasi tentang hubungan antara variabel-variabel yang diamati, interpretasi hasil harus dilakukan dengan hati-hati. Penggunaan sampel yang kecil dapat meningkatkan risiko kecenderungan hasil yang tidak representatif dan dapat mengurangi kekuatan statistik analisis. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan</p>	<p>Analisis jalur dalam konteks penelitian ini mengungkapkan bahwa jumlah sampel yang digunakan dapat dianggap kurang optimal, dengan jumlah partisipan yang kurang dari 200. Dalam kerangka metodologis, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang representativitas dan generalisabilitas hasil penelitian. Penelitian yang memanfaatkan sampel yang relatif kecil dapat menghadapi tantangan dalam memperoleh hasil yang dapat diandalkan dan secara signifikan mencerminkan populasi yang lebih besar. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk</p>	<p>Analisis menggunakan <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) memerlukan jumlah sampel yang memadai untuk memastikan keandalan dan validitas hasil. Dalam konteks ini, penelitian mengharapkan setidaknya 200 responden sebagai sampel untuk memastikan bahwa analisis SEM dapat dilakukan secara efektif. Sampel sebanyak ini dianggap cukup untuk menghasilkan estimasi parameter yang stabil dan dapat dipercaya, serta untuk mendukung generalisasi hasil penelitian. Pemilihan jumlah sampel yang memadai ini sejalan dengan prinsip-prinsip</p>

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
	<p>evaluasi lebih lanjut terhadap hasil analisis dan dihindari membuat generalisasi yang terlalu luas. Pemahaman akan keterbatasan ukuran sampel ini dapat membantu peneliti dalam merinci dan mengevaluasi temuan mereka dengan lebih cermat, serta memberikan dasar untuk pertimbangan lebih lanjut dalam interpretasi hasil.</p>	<p>memperluas ukuran sampel agar dapat meningkatkan keandalan temuan penelitian ini. Adapun peningkatan jumlah sampel, penting untuk tetap memperhatikan kriteria inklusi yang ketat dan menjaga kualitas data yang terkumpul. Selain itu, penelitian ini tetap harus merujuk pada sumber literatur dan metodologi yang relevan untuk memastikan keakuratan serta keabsahan interpretasi hasil.</p>	<p>statistik yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang lebih besar memiliki kecenderungan untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan dalam konteks analisis SEM. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan jumlah sampel minimal 200, penelitian ini dapat memastikan keakuratan interpretasi hasil analisis SEM, serta meningkatkan validitas temuan penelitian tersebut.</p>
5.	<p>Analisis regresi adalah metode statistik yang umumnya digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Dalam konteks analisis regresi, data yang diolah</p>	<p>Analisis jalur data yang dilakukan dapat melibatkan data dalam bentuk interval. Dalam konteks ini, penggunaan data interval menjadi aspek penting dalam pemahaman dan interpretasi proses jalur data. Proses analisis ini</p>	<p>Data yang dimanfaatkan dalam analisis struktur persamaan sem dapat berupa data ordinal maupun kontinu. Kedua jenis data ini memiliki peran penting dalam pemodelan sem, di mana data ordinal memberikan informasi mengenai</p>

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
	<p>dapat berupa data ordinal atau interval. Data ordinal memiliki tingkat peringkat atau urutan tertentu, sementara data interval menggambarkan jarak antara nilai-nilai. Kedua jenis data ini memainkan peran penting dalam membentuk model regresi, yang memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengukur sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Pentingnya pemilihan jenis data yang sesuai dengan konteks penelitian adalah untuk memastikan validitas dan interpretabilitas hasil analisis regresi. Terlebih lagi, mempertimbangkan karakteristik data ordinal atau interval juga dapat memengaruhi teknik analisis yang digunakan, memastikan bahwa</p>	<p>melibatkan pemahaman mendalam terhadap rentang nilai atau periode waktu tertentu, yang kemudian dapat diurai dan dievaluasi untuk mengidentifikasi hubungan kausal atau dampak antar variabel. Pemilihan data dalam bentuk interval memberikan keunggulan dalam menggambarkan variasi yang mungkin terjadi selama rentang waktu tersebut, sehingga memungkinkan peneliti atau analis untuk mengeksplorasi dinamika perubahan dengan lebih rinci. Dengan demikian, pendekatan ini menambahkan dimensi yang lebih kompleks dan kontekstual dalam menganalisis jalur data, memberikan landasan metodologis yang kuat untuk penelitian yang</p>	<p>tingkatan atau peringkat suatu variabel, sementara data kontinu memberikan informasi yang bersifat berkelanjutan. Penggunaan kedua jenis data ini dalam analisis sem memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menguji hubungan antarvariabel dengan lebih rinci dan akurat. Pendekatan sem yang memadukan keduanya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang struktur konseptual yang mendasari fenomena yang sedang diamati. Oleh karena itu, pemilihan dan pemahaman yang baik terhadap jenis data yang digunakan dalam analisis sem sangat krusial dalam memastikan keakuratan dan keberlakuan temuan</p>

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
	hasilnya dapat diandalkan dan relevan dalam mendukung temuan penelitian.	dilakukan.	penelitian.
6.	Analisis regresi menghadapi kendala yang signifikan ketika dihadapkan pada keberadaan data yang hilang. Meskipun demikian, metode ini belum sepenuhnya dapat menangani situasi di mana sebagian data tidak tersedia. Kelemahan ini dapat berdampak pada akurasi dan validitas hasil analisis regresi, mengingat ketidaklengkapan data dapat menghasilkan estimasi parameter yang bias atau tidak konsisten. Sebagai peneliti, penting untuk memahami keterbatasan analisis regresi dalam konteks ketidaklengkapan data, serta mempertimbangkan	Analisis jalur tidak dapat mengatasi tantangan yang muncul akibat kehilangan data. Metode ini memiliki keterbatasan dalam menangani situasi di mana informasi yang diperlukan tidak lengkap atau hilang. Ketergantungan pada data yang utuh menjadi hambatan utama, dan keberhasilan analisis jalur sangat terkait dengan ketersediaan data lengkap. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian atau analisis yang melibatkan kekurangan data, perlu dicari pendekatan alternatif atau metode yang lebih robust untuk memastikan hasil yang	Metode SEM memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat kehilangan data dalam konteks analisis statistik. SEM memberikan pendekatan analisis yang canggih dalam merinci hubungan kompleks antara variabel, sehingga dapat memberikan estimasi yang akurat bahkan ketika terdapat data yang hilang. Dalam literatur metodologi penelitian, SEM telah diakui sebagai suatu alat analisis yang dapat menghadapi masalah data yang hilang dengan menggunakan teknik seperti imputasi data dan pendekatan pemodelan statistik yang

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
	<p>strategi pengelolaan data yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pilihan yang tersedia melibatkan penggunaan teknik imputasi data atau pemodelan statistik yang lebih canggih untuk mengisi nilai yang hilang. Selain itu, penting juga untuk mencatat bahwa keputusan terkait penanganan data yang hilang ini dapat memengaruhi kesimpulan dan generalisasi dari hasil analisis regresi. Oleh karena itu, peneliti diharapkan untuk secara cermat mencatat dan melaporkan langkah-langkah yang diambil dalam menangani data yang hilang, sejalan dengan integritas metodologi penelitian dan mematuhi standar etika penelitian ilmiah.</p>	<p>dapat diandalkan. Hal ini penting untuk memahami keterbatasan analisis jalur dan mengenali ketidakmampuannya dalam menghadapi ketidaklengkapan data guna meminimalkan risiko distorsi interpretasi hasil penelitian.</p>	<p>memperhitungkan struktur kausalitas antar variabel. Oleh karena itu, dalam konteks riset statistik, SEM menunjukkan keunggulannya dalam menangani kekosongan data, yang dapat mendukung penelitian yang berkualitas dan menghasilkan temuan yang lebih reliabel.</p>

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
7	<p>Analisis regresi seringkali tidak dapat secara langsung menguji pengaruh variabel intervening dan variabel moderating. Variabel intervening, yang bertindak sebagai perantara dalam hubungan antara variabel independen dan dependen, sulit diidentifikasi secara langsung melalui teknik regresi konvensional. Sebaliknya, analisis mediasi mungkin diperlukan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap jalur kausal antara variabel tersebut. Di sisi lain, variabel moderating, yang memodifikasi kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen dan dependen, tidak selalu dapat diuji langsung melalui analisis regresi</p>	<p>Pengujian jalur dalam analisis jalur terbatas pada variabel intervening, dengan keterbatasan dalam kemampuannya untuk menguji variabel moderating. Metode ini fokus pada hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen melalui variabel yang berfungsi sebagai mediator. Meskipun analisis jalur efektif dalam mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dan memahami mekanisme di antara variabel, namun keterbatasannya dalam mengevaluasi pengaruh variabel moderating dapat menjadi kendala. Variabel moderating memiliki peran penting dalam mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara</p>	<p>SEM memiliki kemampuan untuk menguji variabel intervening dan variabel moderating dalam penelitian. Penggunaan SEM memungkinkan peneliti untuk menyelidiki hubungan kompleks antara variabel-variabel dengan mengidentifikasi variabel yang berperan sebagai intervening atau moderating. Variabel intervening adalah variabel yang memediasi atau menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, sementara variabel moderating mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara dua variabel tersebut. Dengan memanfaatkan SEM, peneliti dapat secara holistik memahami dinamika kompleks</p>

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
	<p>sendiri. Metode analisis interaksi dapat menjadi pendekatan yang lebih tepat untuk mengidentifikasi dampak variabel moderating. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi variabel intervening dan variabel moderating, peneliti seringkali perlu mengintegrasikan pendekatan analisis lainnya, seperti analisis mediasi atau analisis interaksi, untuk merinci dinamika kompleks dalam hubungan antar variabel.</p>	<p>variabel independen dan dependen, dan oleh karena itu, kekurangan dalam kemampuan analisis jalur untuk menguji variabel moderating membatasi keakuratannya dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika hubungan antarvariabel. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan analisis jalur perlu mempertimbangkan metode tambahan atau pendekatan lain yang dapat lebih efektif mengakomodasi variabel moderating untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat terkait dengan fenomena yang diteliti.</p>	<p>antara variabel-variabel dalam model penelitian mereka.</p>
8.	Analisis regresi menunjukkan	Analisis jalur menghadapi	Teknik analisis statistik SEM (<i>Structural</i>

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
	<p>keterbatasannya dalam menangani data yang tidak mengikuti distribusi normal. Secara khusus, ketika data tidak mematuhi asumsi normalitas, analisis regresi dapat menghasilkan estimasi yang bias atau tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, kehati-hatian diperlukan ketika menggunakan teknik ini dalam konteks data yang tidak normal. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap asumsi distribusi normal dapat mengakibatkan kerentanan terhadap kesalahan tipe I dan tipe II. Dalam mendekati permasalahan semacam ini, alternatif seperti transformasi data atau metode analisis yang lebih toleran terhadap asumsi distribusi</p>	<p>keterbatasan dalam mengatasi data yang tidak normal. Meskipun merupakan metode statistik yang kuat untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat di antara variabel-variabel yang kompleks, analisis jalur cenderung tidak efektif ketika dihadapkan dengan data yang tidak mengikuti distribusi normal. Keterbatasan ini dapat menyulitkan interpretasi hasil dan membuat estimasi parameter menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan penggunaan teknik lain atau transformasi data untuk menangani ketidaknormalan dalam konteks analisis jalur guna memperbaiki validitas dan keandalan hasil. Langkah-langkah tambahan atau</p>	<p><i>Equation Modeling</i>) memiliki kemampuan untuk menangani data yang tidak normal. SEM dikenal sebagai metode yang robust dan dapat diandalkan dalam menangani sejumlah variasi distribusi data, termasuk data yang tidak mengikuti distribusi normal. Kelebihan SEM dalam hal ini terletak pada kemampuannya untuk memodelkan hubungan kompleks antara variabel laten dan observasional, bahkan ketika distribusi data tidak mematuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, SEM membuktikan dirinya sebagai alat analisis yang fleksibel dan mampu memberikan hasil yang dapat diandalkan dalam situasi di mana data tidak memenuhi syarat normalitas. Hal ini</p>

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
	<p>mungkin perlu dipertimbangkan untuk meminimalkan risiko kesalahan interpretasi dan pengambilan keputusan yang tidak akurat. Penting untuk menyadari batasan ini agar hasil analisis regresi dapat diinterpretasikan dengan benar dalam konteks ketidaknormalan data yang mendasarinya.</p>	<p>pengembangan metodologi mungkin diperlukan agar analisis jalur tetap relevan dan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap hubungan antarvariabel yang diuji, terutama dalam konteks penelitian yang melibatkan dataset dengan karakteristik distribusi yang tidak normal.</p>	<p>penting karena memungkinkan peneliti untuk tetap menghasilkan interpretasi yang valid dan generalisasi yang akurat meskipun data yang dihadapi bersifat tidak normal.</p>
9.	<p>Dalam analisis jalur, penting untuk dicatat bahwa istilah "variabel laten" dan "variabel manifest" tidak digunakan. Konsep-konsep ini umumnya terkait dengan analisis regresi, di mana variabel laten merujuk pada konstruk abstrak yang tidak dapat diukur langsung, sementara variabel manifest adalah</p>	<p>Dalam konteks analisis jalur, penting untuk dicatat bahwa istilah "variabel laten" dan "variabel manifest" tidak dijumpai. Analisis jalur sendiri berfokus pada hubungan langsung antara variabel-variabel yang diukur secara langsung, tanpa memperkenalkan konsep variabel laten atau variabel manifest.</p>	<p>Dalam konteks analisis struktural persamaan, istilah "variabel laten" dan "variabel manifest" merujuk pada konsep fundamental dalam pengukuran konstruk. Variabel laten mencerminkan konstruk abstrak atau konsep Teoritis yang sulit diukur secara langsung. Sementara itu, variabel manifest adalah</p>

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
	<p>variabel yang dapat diukur secara langsung. Dalam konteks analisis jalur, fokusnya lebih pada hubungan kausal antara variabel-variabel yang terlibat dalam model. Oleh karena itu, istilah "variabel laten" dan "variabel manifest" tidak relevan dalam kerangka analisis jalur yang lebih menitikberatkan pada pemahaman dan visualisasi jalur pengaruh antarvariabel. Penekanan pada aspek kausalitas dapat membantu merinci hubungan sebab-akibat yang mungkin terjadi di dalam model analisis jalur.</p>	<p>Dengan demikian, dalam kerangka analisis jalur, perhatian tertuju pada pemahaman dan pengukuran variabel-variabel yang dapat diobservasi secara eksplisit, tanpa adanya lapisan variabel laten yang mungkin memperumit interpretasi hasil analisis.</p>	<p>representasi dari variabel laten yang dapat diukur secara langsung melalui observasi atau instrumen pengukuran. Kehadiran kedua jenis variabel ini mencerminkan pentingnya memahami hubungan antara konsep Teoritis yang kompleks dan pengukuran yang dapat diobservasi secara empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki dimensi yang lebih dalam dari fenomena yang diobservasi, membuka pintu untuk pemahaman yang lebih komprehensif dalam konteks analisis data. Seiring perkembangan metodologi penelitian, konsep ini telah menjadi elemen integral dalam pemodelan struktural, memberikan landasan Teoritis yang kokoh untuk menggambarkan</p>

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
			hubungan antara variabel laten dan manifest dalam upaya memahami fenomena kompleks.
10.	Analisis regresi dalam konteks ini menunjukkan keterbatasan dalam menguji moderasi dalam suatu model. Pengujian moderasi merupakan elemen penting dalam penelitian statistik untuk mengevaluasi sejauh mana suatu variabel moderator memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Namun, disayangkan bahwa analisis regresi tidak mampu menyediakan kerangka kerja yang memadai untuk menguji efek moderasi. Pentingnya pengujian moderasi terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi apakah keberadaan suatu	Analisis jalur tidak dapat menguji efektivitas model moderasi. Kelemahan ini menunjukkan bahwa meskipun metode analisis jalur dapat mengidentifikasi hubungan antara variabel, namun tidak mampu memberikan wawasan yang memadai terkait dengan kemampuannya untuk menguji dan mengukur efek moderasi suatu model. Dalam konteks penelitian, kurangnya kapabilitas analisis jalur dalam mengatasi moderasi dapat mengakibatkan keterbatasan dalam menjelaskan dan memahami dinamika	SEM memungkinkan untuk melakukan uji moderasi terhadap model statistik, di mana model tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan peran variabel moderator. Dalam konteks ini, SEM memberikan kemampuan untuk menguji apakah hubungan antara variabel independen dan dependen berubah sejalan dengan perubahan tingkat variabel moderator. Dengan kata lain, SEM memfasilitasi penilaian dampak moderasi

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
	<p>variabel ketiga memperkuat atau melemahkan hubungan antar variabel lainnya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan penggunaan metode atau teknik analisis tambahan yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan peran moderasi dalam model yang sedang diuji. Dengan mempertimbangkan kendala ini, peneliti dapat menggali alternatif yang lebih sesuai untuk menguji moderasi secara efektif guna memperkaya pemahaman terhadap hubungan antar variabel dalam kerangka kerja penelitian.</p>	<p>hubungan antarvariabel, terutama ketika variabel moderator memainkan peran kritis dalam mengubah kekuatan atau arah hubungan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan metode analisis alternatif yang lebih sesuai untuk mengatasi kompleksitas moderasi dalam konteks penelitian guna memperoleh hasil yang lebih akurat dan relevan.</p>	<p>terhadap hubungan antar-variabel, memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam kompleksitas hubungan di dalam model mereka. Sebagai suatu metode analisis yang canggih, SEM memberikan keunggulan dalam menangkap nuansa interaksi antar-variabel, yang dapat menjadi elemen kunci dalam analisis data penelitian. Dengan mengintegrasikan SEM ke dalam penelitian, peneliti dapat menjelajahi dan mengungkapkan dinamika yang lebih mendalam dalam kaitannya dengan variabel-variabel yang diamati, menjadikannya alat yang berharga dalam konteks penelitian sosial dan perilaku.</p>

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
11.	Analisis regresi memiliki keterbatasan dalam menguji hubungan timbal balik antar variabel dalam suatu model resiprokal. Dalam konteks ini, analisis regresi tidak mampu secara efektif mengidentifikasi dan mengukur hubungan saling memengaruhi antar variabel yang bersifat saling ketergantungan. Penggunaan model resiprokal, di mana variabel saling mempengaruhi satu sama lain, menjadi kompleks bagi analisis regresi karena metodenya lebih cenderung pada hubungan sebab-akibat unidireksional. Oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan ini, peneliti mungkin perlu mempertimbangkan pendekatan analisis lain	Analisis jalur memiliki keterbatasan dalam menguji hubungan timbal balik antar variabel dalam suatu model resiprokal. Dalam konteks ini, analisis jalur tidak dapat sepenuhnya mengakomodasi pengujian hubungan saling memengaruhi antar variabel dengan kesetaraan yang sama. Metode ini cenderung menekankan arah kausalitas dari satu variabel ke variabel lain, sehingga tidak mampu menyajikan gambaran yang komprehensif terkait interaksi timbal balik di antara variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan penggunaan metode analisis yang lebih tepat dalam menghadapi hubungan kompleks dan	Sementara model SEM (<i>Structural Equation Modeling</i>) secara umum digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dalam suatu kerangka kerja, perlu dicatat bahwa keunggulan SEM tidak terbatas pada analisis unidireksional. Sebaliknya, SEM memiliki kapabilitas yang signifikan dalam menguji hubungan timbal balik antar variabel dalam suatu model resiprokal. Dengan demikian, dalam konteks analisis ini, SEM mampu menyelidiki dan mengukur sejauh mana variabel saling memengaruhi secara simultan. Pendekatan ini memberikan keunggulan analisis yang lebih holistik dan akurat dalam memahami dinamika interaksi antar variabel.

No	Analisis Regresi	Analisis Jalur	SEM
	yang lebih sesuai untuk menangkap dan memahami hubungan timbal balik antar variabel dalam suatu model resiprokal, seperti model struktural persamaan simultan atau analisis jalur. Pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi kompleks antar variabel dalam konteks hubungan resiprokal.	saling memengaruhi, seperti analisis model resiprokal, guna memastikan kualitas analisis yang optimal dan interpretasi yang lebih holistik dalam rangka penelitian ilmiah.	Seiring kemampuannya dalam mengatasi kompleksitas hubungan timbal balik, SEM menjadi alat yang sangat berguna dalam konteks penelitian empiris dan pengembangan teori.

2. Uji Validitas

Uji validitas merupakan langkah kritis dalam penelitian yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu instrumen atau alat pengukuran dapat diandalkan dalam mengukur konstruk yang dimaksudkan (Amanda et al., 2019). Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap sejauh mana instrumen tersebut mampu mengukur dengan tepat dan konsisten sesuai dengan tujuan penelitian. Validitas, sebagai indikator kehandalan instrumen, menjadi parameter esensial dalam memastikan bahwa hasil yang diperoleh melalui alat pengukuran tersebut akurat dan dapat dipercaya.

Validitas tes menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu instrumen pengukuran dapat memberikan hasil yang tepat dan akurat sesuai dengan tujuan pengukuran. Tes dikatakan memiliki validitas tinggi apabila mampu menjalankan fungsi ukurnya dengan baik, menghasilkan data yang relevan dan sesuai dengan maksud diadakannya pengukuran. Sebaliknya, suatu tes

dapat dianggap memiliki validitas rendah jika menghasilkan data yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan tujuan pengukuran yang ditetapkan. Tabel 3.5 memberikan kriteria untuk menilai tinggi atau rendahnya validitas suatu tes, yang menjadi pedoman dalam mengevaluasi kualitas instrumen pengukuran. Dengan memahami dan menerapkan kriteria tersebut, peneliti atau praktisi dapat lebih memastikan bahwa tes yang digunakan memiliki validitas yang memadai untuk mendukung keakuratan dan ketepatan dalam pengukuran yang dilakukan.

Tabel 3. 5 Kriteria Uji Validitas

Interval	Kategori
0,00 – 0,19	Sangat Rendah
0,20 – 0,39	Rendah
0,40 – 0,59	Sedang
0,60 – 0,79	Tinggi
0,80 – 1,00	Sangat Tinggi

Sumber : Santoso (2021)

3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merujuk pada ukuran sejauh mana sebuah instrumen atau alat pengukuran mampu menghasilkan hasil yang konsisten, stabil, dan dapat diandalkan. Dalam konteks penelitian, reliabilitas mencerminkan tingkat kekonsistenan atau kestabilan hasil yang diperoleh melalui suatu instrumen pengukuran tertentu. Jika reliabilitas suatu instrumen tinggi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan instrumen tersebut akan menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya. Sebaliknya, apabila tingkat reliabilitas instrumen rendah, maka hasil pengukuran cenderung tidak konsisten dan kurang dapat diandalkan. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memastikan instrumen yang digunakan memiliki reliabilitas yang memadai guna mendukung validitas dan keandalan temuan penelitian.

4. Model Pengujian Hipotesis

Ada tujuh langkah yang perlu diambil dalam proses analisis SEM, sebagaimana Hair et al (2017), berikut ini.

1. Langkah pertama dalam teknik analisis SEM adalah melakukan identifikasi Teoritis terhadap permasalahan penelitian. Pada tahap ini, topik penelitian dianalisis secara mendalam, dan hubungan antar variabel yang akan dihipotesiskan harus didasarkan pada justifikasi teori yang kuat. SEM bertujuan mengonfirmasi kesesuaian data observasi dengan teori yang ada.
2. Langkah kedua melibatkan penggambaran kerangka penelitian dalam bentuk diagram alur, yang sering disebut path diagram. Diagram alur ini dapat dibuat dengan menggunakan panduan yang telah dikembangkan oleh AMOS atau LISREL.
3. Langkah ketiga adalah mengkonversikan diagram alur menjadi persamaan struktural dan persamaan model pengukuran. Proses ini biasanya dilakukan secara otomatis oleh program SEM seperti AMOS atau LISREL.
4. Langkah keempat mencakup pemilihan jenis matriks input dan metode estimasi model yang diusulkan. Tahapan ini terdiri dari estimasi model pengukuran (atau *Confirmatory Factor Analysis*) dan model struktur persamaan (*Structure Equation Model*). Pada tahap ini, asumsi-asumsi yang diperlukan dievaluasi, dan hipotesis penelitian diuji.
5. Langkah kelima melibatkan penanganan masalah identifikasi yang mungkin timbul, yang dapat membuat model menjadi tidak layak.
6. Langkah keenam adalah evaluasi Kriteria *Goodness of Fit*, termasuk uji kesesuaian dan uji statistik. Beberapa kriteria yang umum digunakan untuk mengukur kesesuaian model akan dievaluasi pada tahap ini.
7. Langkah terakhir dalam analisis SEM adalah pengujian hipotesis penelitian. Pada tahap ini, hasil analisis statistik akan memberikan informasi tentang apakah model yang diusulkan dapat diterima atau perlu dimodifikasi.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, analisis SEM dapat dilakukan secara sistematis dan akurat untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antar variabel dalam penelitian sehingga mendapatkan kecocokan model dengan parameter seperti tersaji pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Kriteria Goodness of Fit

<i>Good of Fitness Indices</i>	<i>Cut Off Value</i>
<i>Chi-square – χ^2</i>	Diharapkan kecil
<i>Probabilitas</i>	≥ 0.05
<i>CMIN/DF</i>	≤ 2.00
<i>RMSEA</i>	≤ 0.08
<i>GFI</i>	≥ 0.90
<i>AGFI</i>	≥ 0.90
<i>TLI</i>	≥ 0.90
<i>CFI</i>	≥ 0.90

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan diskusi yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menyiratkan beberapa temuan signifikan. Temuan tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman topik yang sedang dibahas. Secara lebih rinci, temuan-temuan tersebut menggambarkan pola-pola tertentu yang relevan dengan kerangka konseptual yang telah dibangun sebelumnya. Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada interpretasi data yang cermat dan pemahaman mendalam terhadap konteks penelitian. Oleh karena itu, kesimpulan ini menjadi landasan penting untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan pengetahuan dalam bidang ini.

1. Melalui kepemimpinan keteladanan berbasis trilogi pendidikan yang kuat, upaya pemberantasan korupsi dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.
2. Kepemimpinan keteladanan berbasis trilogi pendidikan memiliki efek kuat dalam mempengaruhi perkembangan keterampilan manajerial seorang pemimpin.
3. Keterampilan manajerial berperan dalam mengarahkan, mengorganisir, dan mengendalikan usaha pencegahan korupsi.
4. Keterampilan manajerial memainkan peran yang signifikan dalam memediasi pengaruh kepemimpinan keteladanan berbasis trilogi pendidikan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini mengungkapkan implikasi yang merentang dari aspek praktis hingga Teoritis serta kebijakan. Implikasi praktisnya dapat diterapkan dalam konteks praktik, memberikan kontribusi signifikan pada tingkat operasional. Pada tingkat ilmiah, penelitian ini memperkaya korpus pengetahuan

dengan menyumbangkan temuan baru yang dapat memperluas pemahaman kita terhadap suatu fenomena. Dari segi teori, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperdalam atau memperluas suatu kerangka konseptual atau paradigma tertentu. Selain itu, implikasi kebijakannya dapat memberikan arahan untuk perubahan kebijakan atau praktik yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berarti bagi praktisi, tetapi juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teori, dan perumusan kebijakan.

1. Praktis

- a. Organisasi terkait, dalam hal ini satuan pendidikan dapat membangun fondasi yang lebih kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Integrasi antara kepemimpinan keteladanan dan keterampilan manajerial kepala sekolah mendorong pengembangan budaya, praktik, dan kebijakan yang mengutamakan integritas dan transparansi.
- b. Organisasi terkait, dalam hal ini dinas pendidikan dapat merancang dan mengimplementasikan program pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan manajerial dan nilai-nilai kepemimpinan keteladanan yang relevan untuk upaya pemberantasan korupsi. Program ini dapat mencakup pelatihan bagi kepala sekolah dalam bidang komunikasi, pengawasan, pengambilan keputusan etis, dan perencanaan strategis.
- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pembentukan atau perubahan kebijakan organisasi terkait pemberantasan korupsi. Organisasi dapat mengintegrasikan nilai-nilai dan praktik kepemimpinan keteladanan dalam kebijakan anti-korupsi yang ada.

2. Ilmu

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka konseptual yang lebih komprehensif tentang bagaimana kepemimpinan keteladanan dapat mempengaruhi upaya pemberantasan korupsi melalui

penggunaan keterampilan manajerial. Hal ini dapat membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

- b. penelitian ini dapat mengkonfirmasi atau menguji teori-teori yang berkaitan dengan kepemimpinan keteladanan dan keterampilan manajerial dalam konteks pencegahan korupsi. Ini memperkuat pemahaman kita tentang hubungan antara variabel-variabel ini.
- c. Penelitian ini dapat membantu mengklarifikasi dan menjelaskan mekanisme bagaimana keterampilan manajerial menghubungkan kepemimpinan keteladanan dengan upaya pemberantasan korupsi. Ini dapat memberikan wawasan tentang jalur interaksi yang mungkin terjadi.
- d. Penelitian ini dapat memperluas literatur akademis dalam bidang kepemimpinan, manajemen, dan pemberantasan korupsi. Temuan dan analisis yang mendalam dapat menghasilkan pengetahuan baru yang dapat diakses oleh para akademisi dan peneliti.
- e. Penelitian ini dapat mempengaruhi pendekatan dan pertimbangan teoritis dalam penelitian-penelitian lain yang terkait dengan kepemimpinan, manajemen, dan korupsi. Temuan ini dapat dijadikan acuan untuk lebih memahami interaksi antara variabel-variabel ini dalam konteks lain.
- f. Penelitian ini dapat menyediakan data empiris yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk menganalisis dan menguji hipotesis-hipotesis terkait dengan kepemimpinan dan pencegahan korupsi.
- g. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada bidang interdisipliner, menghubungkan kepemimpinan, manajemen, dan isu pemberantasan korupsi dalam wacana yang lebih luas tentang etika, integritas, dan tata kelola.

3. Teori

- a. Implikasi penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan teori pemberantasan korupsi dengan menyoroti pentingnya peran kepemimpinan teladan dan keterampilan manajerial dalam menciptakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi praktik korupsi.

- b. Implikasi penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan teori perubahan organisasi dalam konteks pencegahan korupsi. Bagaimana kepemimpinan teladan dan keterampilan manajerial berkontribusi pada perubahan sikap, perilaku, proses dalam upaya pemberantasan korupsi.
- c. Implikasi penelitian ini berkontribusi dalam memberikan sumbangan terhadap teori budaya organisasi dengan menunjukkan bagaimana kepemimpinan keteladanan dan keterampilan manajerial berdampak pada pembentukan budaya organisasi yang menentang korupsi. Hal ini melibatkan perubahan norma dan sikap yang mendukung integritas dan transparansi.

4. Kebijakan

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan prosedur yang mendukung pemberantasan korupsi.
- b. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran tentang pencegahan korupsi harus ditanamkan dalam seluruh lapisan organisasi. Oleh karena itu, program pendidikan dan pelatihan anti-korupsi harus diterapkan secara terstruktur untuk memastikan bahwa seluruh anggota organisasi memahami dampak negatif korupsi dan bagaimana mencegahnya.
- c. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam merancang program pelatihan yang lebih efektif bagi pemimpin dan manajer di berbagai organisasi. Program tersebut dapat fokus pada pengembangan keterampilan manajerial yang diperlukan untuk menerjemahkan kepemimpinan keteladanan menjadi tindakan konkret dalam pemberantasan korupsi.

C. Saran dan Rekomendasi

1. Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengembangkan model pembelajaran pendidikan antikorupsi (PAk). Mengembangkan model pembelajaran pendidikan antikorupsi (PAk) melibatkan perancangan, implementasi, dan evaluasi suatu kerangka pembelajaran yang dirancang

khusus untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang mendukung pemahaman dan pencegahan korupsi.

2. Kepala sekolah wajib memperkuat pemahaman tentang konsep kepemimpinan keteladanan. Pahami bahwa kepala sekolah harus menjadi contoh yang baik bagi staf, guru, siswa, dan seluruh komunitas sekolah dalam hal integritas, etika, dan transparansi. Bangun budaya sekolah yang mendorong nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas tersebut. Pastikan bahwa nilai-nilai ini tercermin dalam praktik harian dan diakui oleh semua anggota komunitas sekolah. Selanjutnya identifikasi keterampilan manajerial yang relevan untuk konteks sekolah dan pemberantasan korupsi. Ini termasuk kemampuan dalam pengambilan keputusan etis, komunikasi efektif, pengelolaan sumber daya, dan pembuatan kebijakan yang transparan.
3. Dinas pendidikan terkait hendaknya dapat menyediakan pelatihan kepemimpinan dan pengembangan keterampilan manajerial bagi kepala sekolah. Fokus pada keterampilan yang relevan untuk pencegahan korupsi, seperti pengambilan keputusan etis dan komunikasi efektif. Selain itu Dinas pendidikan dapat menjalin kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, lembaga akademis, atau lembaga lain yang memiliki keahlian dalam bidang etika, integritas, dan pemberantasan korupsi. Kolaborasi ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif.
4. Kementerian pendidikan dan kebudayaan hendaknya bekerja sama dengan ahli untuk mengembangkan kurikulum khusus tentang pendidikan anti korupsi dan diterapkan secara masif secara nasional. Kurikulum ini dapat mencakup nilai-nilai integritas, etika, serta pemahaman tentang dampak negatif korupsi terhadap individu dan masyarakat. Selain itu kementerian pendidikan dan kebudayaan hendaknya melakukan pelatihan intensif bagi guru-guru tentang bagaimana mengintegrasikan isu-isu anti korupsi ke dalam pembelajaran sehari-hari. Guru dapat dipersiapkan untuk mengajarkan tentang nilai-nilai integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial kepada siswa.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya mendorong Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum tentang pendidikan anti korupsi dan untuk diterapkan secara masif pada semua jenjang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdeldayem, M. M., Al Deeb, H. M. A., Alazzawi, A. Y., & Al Ashar, M. J. (2019). Impact of Delegation on The Managerial Skills of Employees: Evidence From Bahrain.
- Abdul, K. (2022). Anti Korupsi dan Integritas. In: CV Media Sains Indonesia.
- Abid, H., & Rohaedi, E. (2020). The Urgency of Judge Integrity in Implementation of Law Enforcement and Justice in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(1), 379-384.
- Abun, D., Magallanes, T., Foronda, S. L., & Encarnacion, M. J. (2020). Students' Attitude toward Corruption and their Behavioural Intention to Corrupt or not to Corrupt in the Future: The Philippines' Context. *Journal of the Social Sciences*, 77-98.
- Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. In *Advances in experimental social psychology* (Vol. 2, pp. 267-299). Elsevier.
- Adner, R., & Helfat, C. E. (2003). Corporate effects and dynamic managerial capabilities. *Strategic management journal*, 24(10), 1011-1025.
- Agus, W. (2013). Manajemen pendidikan karakter di sekolah. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Al-Emran, M., Mezhuyev, V., & Kamaludin, A. (2018). PLS-SEM in information systems research: a comprehensive methodological reference. International Conference on Advanced Intelligent Systems and Informatics,
- Al-Gifari, D. A. (2020). *Analisis Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Al Mustaqim, D. (2023). Peran Pendidikan Profesi Guru untuk Meningkatkan Profesionalitas dan Kualitas Pembelajaran di Indonesia. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(02), 168-176.
- Alamsyah, W. (2020). Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020. *Dikutip dari from [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi SMTI](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan_Tren_Penindakan_Kasus_Korupsi_SMTI)*.
- Alzoubi, H. (2022). BIM as a tool to optimize and manage project risk management. *International Journal of Mechanical Engineering*, 7(1).
- Amanda, L., Yanuar, F., & Devianto, D. (2019). Uji validitas dan reliabilitas tingkat partisipasi politik masyarakat kota Padang. *Jurnal Matematika UNAND*, 8(1), 179-188.
- Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 328-344.

- Ariyanti, N., & Himsyah, U. Z. A. (2021). Pembentukan Karakter Kepemimpinan Profetik Berbasis Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui Kegiatan Kepramukaan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 6(1), 27-40.
- Azeem, M., Ahmed, M., Haider, S., & Sajjad, M. (2021). Expanding competitive advantage through organizational culture, knowledge sharing and organizational innovation. *Technology in Society*, 66, 101635.
- Azra, A. (2006). Kata Pengantar Pendidikan Anti Korupsi Mengapa Penting. *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*. CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bada, S. O., & Olusegun, S. (2015). Constructivism learning theory: A paradigm for teaching and learning. *Journal of Research & Method in Education*, 5(6), 66-70.
- Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. *Englewood Cliffs, NJ*, 1986(23-28).
- Bashir, M., & Hassan, S. (2020). The need for ethical leadership in combating corruption. *International Review of Administrative Sciences*, 86(4), 673-690.
- Bass, B. M., & Bass Bernard, M. (2005). Leadership and performance beyond expectations.
- Batista-Taran, L. C., Shuck, M. B., Gutierrez, C. C., & Baralt, S. (2013). The role of leadership style in employee engagement.
- Batubara, H. H. (2016). Penggunaan google form sebagai alat penilaian kinerja dosen di Prodi PGMI Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari. *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 8(1).
- Belsito, C. A., & Reutzell, C. R. (2020). SME employee performance appraisal formalization and trust in leadership change. *International Journal of Organizational Analysis*, 28(2), 434-456.
- Bijańska, J., & Wodarski, K. (2020). Model of process management system in enterprises of the hard coal mining industry. *Management Systems in Production Engineering*(28), 112-120.
- Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. Piscataway. In: NJ: Transaction Publishers.
- Borah, M. (2021). Motivation in learning. *Journal of Critical Reviews*, 8(2), 550-552.
- Bragança, S., Costa, E., Castellucci, I., & Arezes, P. M. (2019). A brief overview of the use of collaborative robots in industry 4.0: Human role and safety. *Occupational and environmental safety and health*, 641-650.
- Brauckmann, S., & Pashiardis, P. (2011). A validation study of the leadership styles of a holistic leadership theoretical framework. *International Journal of Educational Management*.
- Brioschi, C. A. (2017). *Corruption: a short history*. Brookings Institution Press.
- Burke, B. (2016). *Gamify: How gamification motivates people to do extraordinary things*. routledge.
- Bush, T. (2020). Theories of educational leadership and management. *Theories of Educational Leadership and Management*, 1-208.

- Caesaringi, I., Harsasto, P., & Manar, D. G. (2017). Reformasi Birokrasi Kota Tegal (Studi Kasus Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih BP2T dan RSUD Kardinah). *Journal of Politic and Government Studies*, 6(03), 541-550.
- Caiden, G. E., Dwivedi, O. P., Jabbra, J. G., ..., & et al. (2001). *Where corruption lives*. Kumarian Press Bloomfield, CT.
- Castro-Gonzalez, S., Bande, B., & Fernandez-Ferrin, P. (2021). Influence of companies credibility and trust in corporate social responsibility aspects of consumer food products: The moderating intervention of consumer integrity. *Sustainable Production and Consumption*, 28, 129-141.
- Chatib, M. (2009). *Sekolahnya manusia: sekolah berbasis multiple intelligences di Indonesia*. Kaifa.
- Chen, X.-P., Eberly, M. B., Chiang, T.-J., Farh, J.-L., & Cheng, B.-S. (2014). Affective trust in Chinese leaders: Linking paternalistic leadership to employee performance. *Journal of management*, 40(3), 796-819.
- Chinenye, T. C., & Ofojebe, W. (2020). Principals' application of Managerial Skills as A Correlate Of Teachers' job Performance in Secondary Schools in Anambra State, Nigeria. *European Journal of Education Studies*.
- Chowdhury, M. (2018). Emphasizing morals, values, ethics, and character education in science education and science teaching. *MOJES: Malaysian Online Journal of Educational Sciences*, 4(2), 1-16.
- Cornelissen, J. P., Akemu, O., Jonkman, J. G., & Werner, M. D. (2021). Building character: the formation of a hybrid organizational identity in a social enterprise. *Journal of Management Studies*, 58(5), 1294-1330.
- Crevani, L., Lindgren, M., & Packendorff, J. (2010). Leadership, not leaders: On the study of leadership as practices and interactions. *Scandinavian journal of management*, 26(1), 77-86.
- Custódio, C., Ferreira, M. A., & Matos, P. (2019). Do general managerial Skills spur innovation? *Management science*, 65(2), 459-476.
- Danim, S. (2016). Inovasi pendidikan: dalam upaya peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan.
- Dapodik. (2022, 2022). *Data Guru Prov. Lampung - Dapodikdasmen*. Retrieved 05 April from <https://dapo.kemdikbud.go.id/guru/1/120000>
- Darmawati, S. H. (2015). Revitalisasi Pendidikan Karakter Bagi Guru Dan Siswa Dengan Penerapan Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara di SMP 32 OKU. Prosiding Seminar Nasional,
- De Graaf, G., & Huberts, L. W. (2008). Portraying the nature of corruption using an explorative case study design. *Public Administration Review*, 68(4), 640-653.
- Demerjian, P., Lev, B., & McVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. *Management science*, 58(7), 1229-1248.
- Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70-81.

- Dewey, J. (1964). *How We Think*. Boston: D. C. Heath and Company, 1933..
Democracy and Education. 4th printing. In: New York: The MacMillan Company.
- Dharma, B. (2004). Korupsi dan Budaya. dalam Kompas.
- Diaz, O. G., Luna, G. G., Liao, Z., & Axinte, D. (2019). The new challenges of machining Ceramic Matrix Composites (CMCs): Review of surface integrity. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 139, 24-36.
- Dierdorff, E. C., Rubin, R. S., & Morgeson, F. P. (2009). The milieu of managerial work: An integrative framework linking work context to role requirements. *Journal of applied Psychology*, 94(4), 972.
- Dirani, K. M., Abadi, M., Alizadeh, A., Barhate, B., Garza, R. C., Gunasekara, N., . . . Majzun, Z. (2020). Leadership competencies and the essential role of human resource development in times of crisis: a response to Covid-19 pandemic. *Human Resource Development International*, 23(4), 380-394.
- Donate, M. J., & de Pablo, J. D. S. (2015). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. *Journal of Business Research*, 68(2), 360-370.
- El-Saady, H. (1998). Considerations on bribery in ancient Egypt. *Studien zur Altägyptischen Kultur*, 295-304.
- El-Sabaa, S. (2001). The Skills and career path of an effective project manager. *International Journal of Project Management*, 19(1), 1-7.
- Elwina, M. (2008). Pendidikan Anti Korupsi. Diunduh 26 Agustus 2008 (<http://web.pangudiluhur.org/html/artikel.php?h=41>)
- Erickson, A., Shaw, B., Murray, J., & Branch, S. (2015). Destructive leadership: Causes, consequences and countermeasures. *Organizational Dynamics*, 44(4), 266-272.
- Faizah, U. (2020). Etika lingkungan dan aplikasinya dalam pendidikan menurut perspektif aksiologi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(1), 14-22.
- Flores, E., Xu, X., & Lu, Y. (2020). Human Capital 4.0: a workforce competence typology for Industry 4.0. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 31(4), 687-703.
- Fockema, S., & Andrea, R. H. (1951). BIJ JB Wolter Uitgevermaat Schappij. In: NV Gronogen, Jakarta.
- Fornell, C. (1985). A second generation of multivariate analysis: Classification of methods and implications for marketing research.
- Govindaraju, V. (2021). A review of social cognitive theory from the perspective of interpersonal communication. *Multicultural Education*, 7(12), 1-5.
- Gupta, M. S., & Abed, M. G. T. (2002). *Governance, corruption, and economic performance*. International Monetary Fund.
- Hair, J. F., Gabriel, M., & Patel, V. (2014). AMOS covariance-based structural equation modeling (CB-SEM): Guidelines on its application as a marketing research tool. *Brazilian Journal of Marketing*, 13(2).
- Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Antikorupsi*. Penerbit Ombak.

- Hapsari, J., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Bbws Pemali Juana Semarang. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 25-42.
- Harefa, A. (2002). *Sekolah saja tidak pernah cukup: menyoal pendidikan persekolahan dan pencarian alternatif pembelajaran*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hermawati, R., Sugiyarti, L., Handayani, R., Sunarsi, D., Alfiah, S., & Maddinsyah, A. (2020). The Effect of trilogy leadership style and organization culture on school performance: Evidence form Indonesian senior high school. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 8512-8537.
- Herminingsih, A. (2015). Building employees' engagement through leadership, human resources management practices and organizational culture. *Journal of Business and Economics*, 6(9), 1613-1620.
- Herrera, S. A. (2017). *Exemplary leadership: A mixed-methods case study discovering how female chief executive officers create meaning* [Brandman University].
- Heywood, P. (1997). Political corruption: Problems and perspectives. *Political studies*, 45(3), 417-435.
- Hidayat, M. Y. (2022). *Konsep Trilogi Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara dan Relevansinya Dengan Pendidikan di Era Teknologi Informasi* [Universitas Islam Indonesia].
- Hoffman, M., & Tadelis, S. (2021). People management Skills, employee attrition, and manager rewards: An empirical analysis. *Journal of Political Economy*, 129(1), 243-285.
- Holmes, L. (2015). *Corruption: a very short introduction* (Vol. 426). Oxford University Press, USA.
- Humrey, E. (1975). Encyclopedia Internasional. In: New York: Grolier.
- Hurlock, E. B. (1980). Psikologi perkembangan. *Jakarta: erlangga*.
- Husni, H. (2019). Moderate Muslims' Views On Multicultural Education, Freedom Of Expression, And Social Media Hate Speech: An Empirical Study In West Java Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 199-224.
- Hussein, F. S. W. (2020). Tinjauan Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia pada Periode I dan II (2003-2011). *khazanah: Jurnal Edukasi*, 2(1), 1-28.
- Iacobucci, D. (2010). Structural equations modeling: Fit indices, sample size, and advanced topics. *Journal of consumer psychology*, 20(1), 90-98.
- Irawati, D., Masitoh, S., & Nursalim, M. (2022). Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai Landasan Pendidikan Vokasi di Era Kurikulum Merdeka. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 7(4).
- Ismantara, S., Sari, R. A. D. P., Elvira, C., & Rahaditya, R. (2021). Carut Marut Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Prosiding SENAPENMAS*, 1179-1188.

- Jamil, J., Dun, A. M., Sahrin, S., Marhali, R. D., & Joni, J. (2023). Freedom to Learn from Ki Hadjar Dewantara's Perspective and its Relevance for the Development of Character Education. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 2(11), 2841-2854.
- Javadin, S. R. S., Amin, F., Tehrani, M., & Ramezani, A. (2010). Studying the relationship between managerial Skills and efficiency of bank branches. *World Applied Sciences Journal*, 11(2), 170-177.
- Joko, S. (2020). Analisis Sosio-Legal terhadap Urgensitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dalam Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Universitas Wahid Hasyim].
- Joseph, J., & Padmanabhan, B. (2019). The Traits of Reciprocal Determinism in Helen Macdonald's *H Is for Hawk*. *IUP Journal of English Studies*, 14(1).
- Juharyanto, J., Nurabadi, A., & Gunawan, I. (2020). Debat Moral Sebagai Upaya Meningkatkan Integritas Kepala Sekolah. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 3(3), 272-282.
- Jumiarti, D. N. (2023). Penerapan Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Tentang Merdeka Belajar Di Taman Siswa 1922-1932. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(1).
- Kantabutra, S., & Ketprapakorn, N. (2020). Toward a theory of corporate sustainability: A theoretical integration and exploration. *Journal of Cleaner Production*, 270, 122292.
- Kanter, R. M. (2003). *Challenge of organizational change: How companies experience it and leaders guide it*. Simon and Schuster.
- Katz, R. (1955). Skills of an effective administrator. *Harvard Business Review*, Jan-Feb. 1955.
- Katz, R. L. (2009). *Skills of an effective administrator*. Harvard Business Review Press.
- Kemdiknas, T. P. (2011). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdiknas.
- Kemendikbud. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. *JDIH BPK RI Database Peraturan*, 1-21.
- Kemendikbud, R. (2013). Buku Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. In: Kemendikbud.
- Khasanah, F. (2023). Bab 2 Fungsi Komunikasi Pendidikan. *Teori Komunikasi Pembelajaran*, 11.
- Khoirina, Q. (2021). Analisis Terhambatnya Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dan Singapura Terkait Korupsi.
- Klitgaard, R. (1998). *Membasmi korupsi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2003). The five practices of exemplary leadership. *San Francisco*.
- Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2017). *The leadership challenge workbook*. John Wiley & Sons.
- Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2023). *The leadership challenge: How to make extraordinary things happen in organizations*. John Wiley & Sons.

- Kurniawan, H., & Rahayu, S. (2020). Pemeranan Dan Internalisasi Karakter Integritas Dalam Pelayanan Literasi Masyarakat. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 341-354.
- Kurniawati, S. (2020). Analysis of Influence of Managerial Skills, Company Diversification Policy, Audit Committee, and External Audit and Their Impact on the Financial Reporting Aggressiveness (Study in Public Listed Manufacturing Companies). *East African Scholars J Econ Bus Manag*, 3, 21-38.
- Kwon, I. (2014). Motivation, discretion, and corruption. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 24(3), 765-794.
- Li, H., Sajjad, N., Wang, Q., Muhammad Ali, A., Khaqan, Z., & Amina, S. (2019). Influence of transformational leadership on employees' innovative work behavior in sustainable organizations: Test of mediation and moderation processes. *Sustainability*, 11(6), 1594.
- Lickona, T. (2009). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam.
- Mahardika, I. (2023). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sangat Penting untuk Membantu Memperkuat Identitas Nasional di Era Abad 21. *KRAKATAU (Indonesian of Multidisciplinary Journals)*, 1(1), 27-34.
- Mahmud, A. Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 256-271.
- Mahmud, H., & Sanusi, S. (2021). Training, managerial Skills, and principal performance at senior high school in north luwu regency. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 27-39.
- Malihah, E., & Nurbayani, S. (2015). Teaching conflict resolution through general education at university: Preparing students to prevent or resolve conflicts in a pluralistic society. *Asian Social Science*, 11(12), 353.
- Man-wai, T. K. (2006). Formulating an effective anti-corruption strategy—the experience of Hong Kong ICAC. *Resource Material Series*, 69, 196-201.
- Manala, M. J. (2014). Servant leadership: A required leadership model for efficient and effective service delivery in a democratic South Africa. *Studia Historiae Ecclesiasticae*, 40, 249-266.
- Matheus, R., Janssen, M., & Maheshwari, D. (2020). Data science empowering the public: Data-driven dashboards for transparent and accountable decision-making in smart cities. *Government Information Quarterly*, 37(3), 101284.
- McLeod, S. (2011). Albert Bandura's social learning theory. *Simply Psychology*. London.
- Melki, J., Tamim, H., Hadid, D., Makki, M., El Amine, J., & Hitti, E. (2021). Mitigating infodemics: The relationship between news exposure and trust and belief in COVID-19 fake news and social media spreading. *PloS one*, 16(6), e0252830.
- Memisoglu, S. P. (2009). The perception of teachers about management Skills of school principals. *Management*, 136.

- Meyer-Sahling, J. H., & Mikkelsen, K. S. (2016). Civil service laws, merit, politicization, and corruption: The perspective of public officials from five East European countries. *Public administration*, 94(4), 1105-1123.
- Mintzberg, H. (1971). *Managerial Work: Analysis from Observation in the Great Writings in Management and Organizational Behavior* 2nd ed., (Boone, E. Louis and Bowen, Donland D., eds). In: Random House, Harper and Row, New York.
- Mohammed, U. D., Yusuf, M. O., Sanni, I. M., Ifeyinwa, T. N., Bature, N. U., & Kazeem, A. O. (2014). The relationship between leadership styles and employees' performance in organizations (a study of selected business organizations in Federal Capital Territory, Abuja Nigeria). *Leadership*, 6(22), 1-11.
- Montessori, M. (2012). Pendidikan Antikorupsi sebagai pendidikan karakter di sekolah. *Jurnal Demokrasi*, 11(1).
- Morse, B. A., Carman, J. P., & Zint, M. T. (2019). Fostering environmental behaviors through observational learning. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(10), 1530-1552.
- Muchlas, S., & Haryanto, M. (2012). Konsep dan model pendidikan karakter. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Mudana, I. G. A. M. G. (2019). Membangun karakter dalam perspektif filsafat pendidikan Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(2), 75-81.
- Mukarromah, I., Mudjito, M., & Purbaningrum, E. (2019). The Effect of managerial Skills (conceptual, human, and technical) of headmasters to the effectiveness of islamic senior high schools in jombang district. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(6), 539-544.
- Mulyasa, H. E. (2022). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bumi Aksara.
- Muraina, M. B. M. (2014). Principals managerial Skills and administrative effectiveness in secondary schools in Oyo State, Nigeria. *Global Journal of Management and Business Research*.
- Murphy, M. M. (2002). *Character education in America's blue ribbon schools: Best practices for meeting the challenge*. Scarecrow Press.
- Nabavi, R. T. (2012). Bandura's social learning theory & social cognitive learning theory. *Theory of Developmental Psychology*, 1(1), 1-24.
- Narimawati, U., & Sarwono, J. (2007). *Structural equation modeling (SEM) dalam riset ekonomi: menggunakan lisrel*. Gaya Medias.
- Nasir, R. (2006). *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Ndidi, E. P., & Alike, U. G. (2018). Principals' Application of Communication Skills as a Correlates of Teachers' Job Performance in Secondary Schools in Anambra State, Nigeria. *Online Submission*, 4(7), 229-236.
- Nickerson, C. (2022). Albert Bandura's social cognitive theory: Definition & examples. In.
- Nicolaides, A., & Manyama, T. P. (2020). Eradicating Corruption in Public Service Entities through Ethical Leadership. *Athens JL*, 6, 431.

- Nielsen, P. A., Boye, S., Holten, A. L., Jacobsen, C. B., & Andersen, L. B. (2019). Are transformational and transactional types of leadership compatible? A two-wave study of employee motivation. *Public administration*, 97(2), 413-428.
- Nikoloski, K. (2015). Charismatic leadership and power: Using the power of charisma for better leadership in the enterprises. *Journal of Process Management and New Technologies*, 3(2), 18-26.
- Normore, A., Javidi, M., & Long, L. (2019). *Handbook of Research on Strategic Communication, Leadership, and Conflict Management in Modern Organizations*. IGI Global.
- Ntayi, J. M., Ngoboka, P., & Kakooza, C. S. (2013). Moral schemas and corruption in Ugandan public procurement. *Journal of Business Ethics*, 112, 417-436.
- Nugroho, S., Susilowati, I., Fachrunnisa, O., Prastyadewi, M. I., & Furoida, A. N. (2022). The role of mothers in anti-corruption education: The development of "BUTIKO" as knowledge-sharing virtual community. *Frontiers in Education*,
- Nurkholis, N. (2013). Pendidikan dalam upaya memajukan teknologi. *Jurnal kependidikan*, 1(1), 24-44.
- Orazi, D. C., Turrini, A., & Valotti, G. (2013). Public sector leadership: new perspectives for research and practice. *International Review of Administrative Sciences*, 79(3), 486-504.
- Peter, B., & Sunday, O. A. (2018). Exemplary Leadership and Employee Commitment in Private Health Sector in Port Harcourt, Rivers State; Nigeria. *International Journal of Psychology and Cognitive Science*, 4(1), 1-8.
- Poerwadarminta, W. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. V. Jakarta: Balai Pustaka*.
- Pollitt, C. (2016). Alina Mungiu-Pippidi (2015) *The Quest for Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption*. In: SAGE Publications Sage UK: London, England.
- Polzenhagen, F., & Wolf, H.-G. (2021). Culture-specific conceptualisations of corruption in African English: Linguistic analyses and pragmatic applications. *Cultural Linguistics and World Englishes*, 361-399.
- Pratama, G., & Elistia, E. (2020). Analisis Motivasi Kerja, Kepemimpinan Transformasional Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Dimediasi Kepuasan Kerja Pada Angkatan Kerja Generasi Z. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 11(02).
- Raetze, S., Duchek, S., Maynard, M. T., & Wohlgemuth, M. (2022). Resilience in organization-related research: An integrative conceptual review across disciplines and levels of analysis. *Journal of applied Psychology*, 107(6), 867.
- Ramdhani, N., & Patria, B. (2018). *Psikologi untuk Indonesia maju dan beretika*. UGM PRESS.

- Rumjaun, A., & Narod, F. (2020). Social Learning Theory—Albert Bandura. *Science education in theory and practice: An introductory guide to learning theory*, 85-99.
- Saliman, M. P. (2005). A. Latar Belakang Sejarah Timbulnya Kepemimpinan.
- Santoso, L., & Meyrasyawati, D. (2015). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 5(01), 22-45.
- Santoso, S. (2021). Analisis Structural Equation Modelling (SEM) menggunakan AMOS 26.
- Saputra, F. (2022). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Pemberdayaan Manajemen Sekolah. *SKILLS: Jurnal Riset dan Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 46-56.
- Sari, I. (2018). Motivasi belajar mahasiswa program studi manajemen dalam penguasaan keterampilan berbicara (speaking) bahasa Inggris. *Jumant*, 9(1), 41-52.
- Saroni, M. (2011). Personal branding guru: Meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru. *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media*.
- Sbaffi, L., & Rowley, J. (2017). Trust and credibility in web-based health information: a review and agenda for future research. *Journal of medical Internet research*, 19(6), e218.
- Schuh, S. C., Zhang, X.-a., & Tian, P. (2013). For the good or the bad? Interactive effects of transformational leadership with moral and authoritarian leadership behaviors. *Journal of Business Ethics*, 116(3), 629-640.
- Schunk, D. H., & DiBenedetto, M. K. (2020). Motivation and social cognitive theory. *Contemporary educational psychology*, 60, 101832.
- Schunk, D. H., & DiBenedetto, M. K. (2021). Self-efficacy and human motivation. In *Advances in motivation science* (Vol. 8, pp. 153-179). Elsevier.
- Sedyastuti, K., Suwarni, E., Rahadi, D. R., & Handayani, M. A. (2021). Human Resources Competency at Micro, Small and Medium Enterprises in Palembang Songket Industry. 2nd Annual Conference on Social Science and Humanities (ANCOSH 2020),
- Siagian, S. P., & Manajerial, F.-f. (1992). Cet. II. *Jakarta: Bumi Aksara, t. th*.
- Simarmata, H. M. P., Sahri, S., Subagio, S., Syafrizal, S., Purba, B., Purba, P. B., . . . Nurhilmiyah, N. (2020). *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Yayasan Kita Menulis.
- Siswanto, A. (2021). Permohonan Praperadilan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 10(4).
- Smith, M. A. (2021). Social learning and addiction. *Behavioural Brain Research*, 398, 112954.
- Soeratin, H. (2023). Kepemimpinan Transformasional dan Kolaboratif: Solusi Efektif dalam Penanganan Korupsi di Era Digitalisasi 5.0 Dengan Pemanfaatan Media Sosial. *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 7(2), 399-423.
- Soetardjo, A. M. (2021). Sistem Pembuktian dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001. *LEX CRIMEN*, 10(7).

- Solaja, O. M., & Ogunola, A. A. (2016). Leadership style and multigenerational workforce: A call for workplace agility in Nigerian public organizations. *Leadership, 21*(01), 46-56.
- Spaho, K. (2013). Organizational communication and conflict management. *Management-Journal of Contemporary Management Issues, 18*(1), 103-118.
- Stone, A. G., Russell, R. F., & Patterson, K. (2004). Transformational versus servant leadership: A difference in leader focus. *Leadership & Organization Development Journal*.
- Stoner, J., & AF, F. (1992). R. Edward, Gilbert Jr., Daniel, R. 1996. *Manajemen, Jilid I*.
- Sunardiyah, M. A., Wibawa, S., Supriyoko, S., Susanto, M. R., & Sudirman, A. (2023). Using The Leadership Trilogy Of Ki Hadjar Dewantara As The Basis For Implementing The Flipped Classroom Model In Elementary Schools. *International Journal of Engagement and Empowerment, 3*(1), 77-97.
- Sundström, A. (2016). Violence And The Costs Of Honesty: Rethinking Bureaucrats'choices To Take Bribes. *Public administration, 94*(3), 593-608.
- Supandi, A., & Vernia, D. M. (2015). Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Nasional yang Bersih dari Korupsi. *Research and Development Journal Of Education, 1*(2).
- Supramono, G. (2020). *Hukuman korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi*. Prenada Media.
- Surjomiharjo, A. (1986). Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern, Sinar Harapan. In: Yogyakarta.
- Sutisna, O. (1983). *Administrasi pendidikan: dasar teoritis untuk praktek profesional*. Angkasa, Bandung.
- Suwahyu, I. (2018). Pendidikan Karakter Dalam Konsep Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, 23*(2), 192-204.
- Suyadi. (2013). *Strategi pembelajaran pendidikan karakter*. PT Remaja Rosdakarya.
- Syahril, S. (2019). Teori-teori kepemimpinan. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan, 4*(02), 208-215.
- Syauket, A. (2021). Buku Ajar Mata Kuliah" Pendidikan Anti Korupsi (Dalam Bingkai Pencegahan Indonesia Bebas Korupsi)".
- Taylor, T. (2010). Corruption and liberation: The experience of Nigeria. *Decaritas Journal of Management and Social Sciences, 2*(3), 1-9.
- Tilaar, H. A. R. (2000). *Paradigma baru pendidikan nasional*. Rineka Cipta.
- Treisman, D. (2007). What have we learned about the causes of corruption from ten years of cross-national empirical research? *Annual review of Political science, 10*(1), 211-244.

- Tsoraya, N. D., Khasanah, I. A., Asbari, M., & Purwanto, A. (2023). Pentingnya Pendidikan Karakter Terhadap Moralitas Pelajar di Lingkungan Masyarakat Era Digital. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(01), 7-12.
- Turenne, C. P., Gautier, L., Degroote, S., Guillard, E., Chabrol, F., & Ridde, V. (2019). Conceptual analysis of health systems resilience: a scoping review. *Social Science & Medicine*, 232, 168-180.
- Usher, E., & Ford, C. J. (2022). Social Cognitive Theory and Personal Agency. In Routledge.
- Vian, T. (2020). Anti-corruption, transparency and accountability in health: concepts, frameworks, and approaches. *Global health action*, 13(sup1), 1694744.
- Walker, J. (2009). *A Transformational Analysis of Leadership in Shakespeare's Henry V*
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.
- Waziri, F. (2010). Corruption and governance challenges in Nigeria. Conference proceedings. Cleen foundation monograph series,
- Wibowo, A. (2013). *Pendidikan Antikorupsi di sekolah: strategi internalisasi Pendidikan Antikorupsi di sekolah*. Pustaka Pelajar.
- Widianto, D., Pujiono, P., Purnaweni, H., Kismartini, K., & Astuti, R. (2021). Collaborative Governance of Corruption Prevention Covid-19 Management Fund in Central Java Government. Proceedings of the 5th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries, ICISPE 2020, 9-10 October 2020, Semarang, Indonesia,
- Wijayanti, D., & Praheto, B. E. (2020). Eksplorasi Penerapan Sistem Among Ki Hadjar Dewantara Melalui Pendekatan Pluralistik Dalam Pengelolaan Kelas Di Sd Negeri Timuran Yogyakarta. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 4(1), 388-396.
- Winkler, B. (2000). Which kind of transparency? On the need for clarity in monetary policy-making. *On the Need for Clarity in Monetary Policy-Making (August 2000)*.
- Wulandari, W. C. (2017). Implementasi Trilogi Ki Hadjar Dewantara Dalam Kepemimpinan Kepala Sekolah Di SD Negeri 1 Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. *Prodi PGSD Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Yamin, M. (2012). *Sekolah yang membebaskan: perspektif teori dan praktik membangun pendidikan yang berkarakter dan humanis*. Madani.
- Yamin, M. (2016). *Pendidikan Antikorupsi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Yue, C. A., Men, L. R., & Ferguson, M. A. (2019). Bridging transformational leadership, transparent communication, and employee openness to change: The mediating role of trust. *Public relations review*, 45(3), 101779.
- Yukl, G., Mahsud, R., Hassan, S., & Prussia, G. E. (2013). An improved measure of ethical leadership. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 20(1), 38-48.

- Yulia Rachmawati, S., & Santosa, A. B. (2020). Principal's Managerial Competence in Actualizing a Creative School. *Universal Journal of Educational Research*, 8(8), 3406-3416.
- Yulita, T. (2010). Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Perluakah. *Pusat Studi Urban Unika Soegijapranata*(4).
- Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 178-190.
- Zuchdi, D. (2010). Humanisasi pendidikan: menemukan kembali pendidikan yang manusiawi.
- Zulqarnain, Z., Ikhlas, M., & Ilhami, R. (2022). Perception of college students on civic and anti-corruption education: Importance and relevance. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 123-134.